

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

**(Studi Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
(BKBPM) & Masyarakat Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang,
Kota Malang).**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RIZKY DEANDRA ERNAWAN

NIM. 125030507111003



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

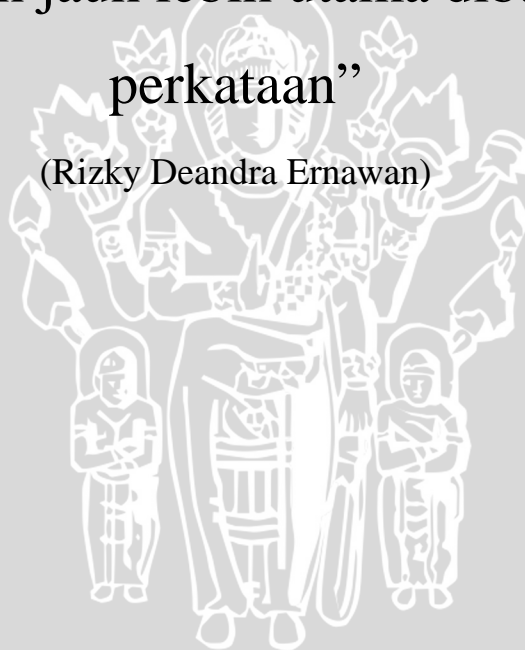
MALANG

2016

MOTTO

“Keteladanan jauh lebih utama dibandingkan
perkataan”

(Rizky Deandra Ernawan)

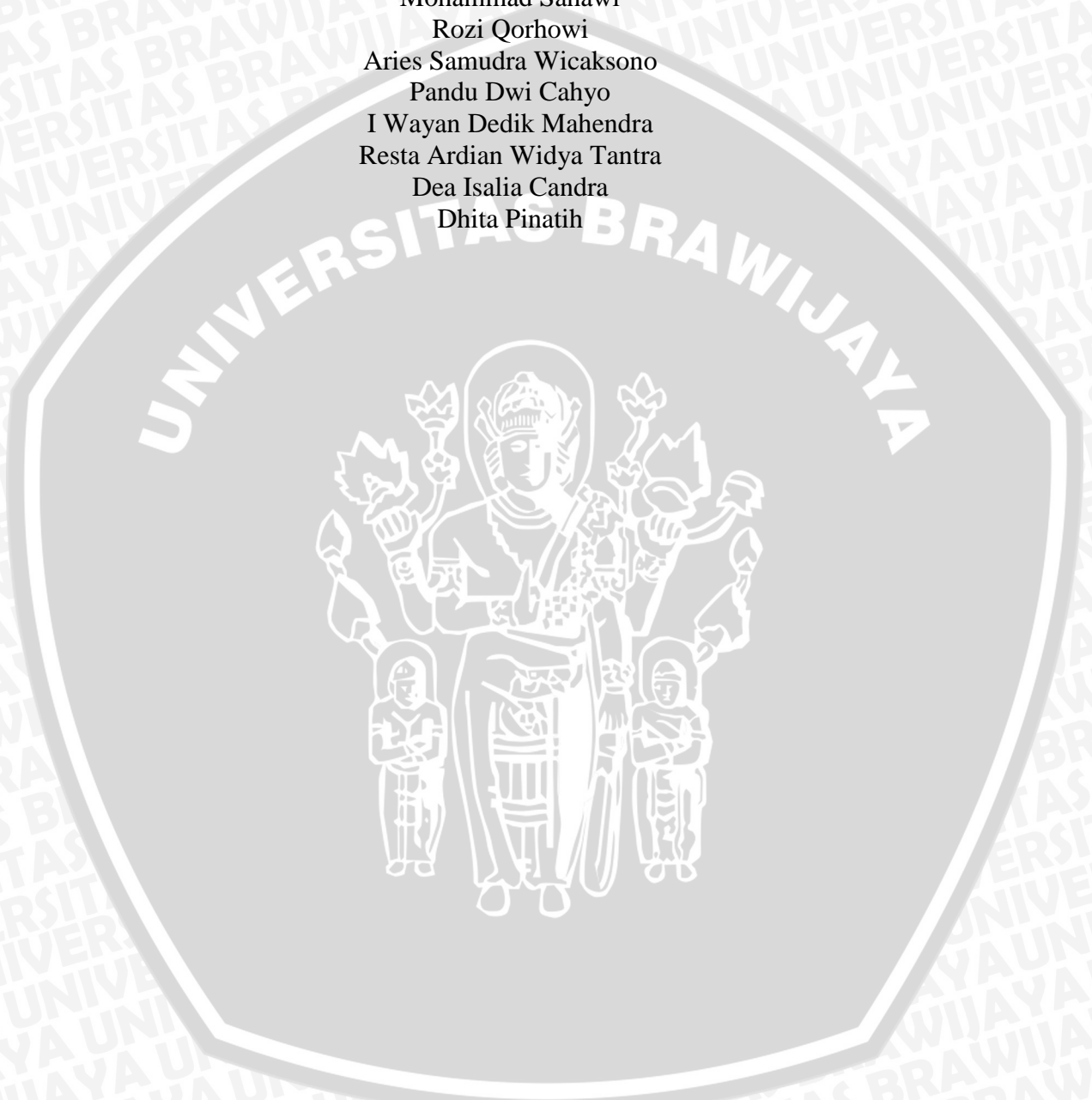


LEMBAR PERSEMBAHAN

Untuk Orang Tuaku Tersayang
Ir. Darmawan Setiabudi dan Sri Erna Utami,
SKM, MARS

Untuk Sahabat terbaikku

Mohammad Sahawi
Rozi Qorhowi
Aries Samudra Wicaksono
Pandu Dwi Cahyo
I Wayan Dedik Mahendra
Resta Ardian Widya Tantra
Dea Isalia Candra
Dhita Pinatih



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat
melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) (Study pada Badan Keluarga Berencana dan
Masyarakat Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang).

Disusun oleh : Rizky Deandra Ernawan

NIM : 125030507111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Ilmu Administrasi Pemerintahan

Malang, 9 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


Dr. Lety Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
19670217 199103 1 000

TANDA PENGESAHAN

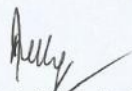
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada;

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Agustus 2016
Jam : 10.00-11.00 WIB
Skripsi atas nama : Rizky Deandra Ernawan
Judul : Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) & masyarakat Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang).

Malang, 21 Agustus 2016


Dan dinyatakan **LULUS**
MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota,



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 010

Penguji I



Dr. Drs. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Penguji II



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 9 Agustus 2016



Nama : Rizky Deandra Ernawan.

NIM : 125030507111003

RINGKASAN

Rizky Deandra Ernawan, 2016, Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. **Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) & Masyarakat Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang).** Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D, 155 halaman

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam pengembangan UMKM di Kota Malang adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro melalui upaya optimalisasi perannya antara lain : penyelenggaraan pelatihan keterampilan, penyalur dana hibah pelatihan, fasilitator pelaksanaan pelatihan dan penggerakan partisipasi masyarakat. Jenis pelatihan keterampilan yang diselenggarakan diantaranya pembuatan tas, budidaya jamur, komputer dan kerajinan tangan.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya BKBPM dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah upaya BKBPM dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan UMKM, hasil (*Output*) setelah dilakukan pelatihan keterampilan, faktor pendukung dan penghambat kegiatan dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.

Hasil penelitian tentang upaya yang telah dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang melalui pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro adalah optimalisasi peran BKBPM diantaranya penyelenggaraan pelatihan keterampilan, penyaluran dana hibah untuk pelatihan, fasilitator pelaksanaan pelatihan dan penggerakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan. Hasil (*Output*) pengembangan UMKM setelah dilakukan pelatihan keterampilan di Kelurahan Lesanpuro terlihat adanya perkembangan, inovasi produk dan strategi pemasaran berupa metode atau cara pemasaran produk UMKM. Adapun faktor pendukung dan penghambat kegiatan BKBPM dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro antara lain faktor pendukung terdiri dari sumber daya manusia, sumber dana, dan faktor jarak (aksesibilitas). Faktor penghambatnya adalah masalah permodalan, pelaksanaan koordinasi antar instansi dan pemasaran produk UMKM.

Hal-hal yang perlu dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang yaitu membangun koordinasi efektif dengan instansi lain yang juga menangani masalah pengembangan UMKM agar tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) dari peran, selain itu pemasaran dan promosi produk UMKM di Kelurahan Lesanpuro sebaiknya ada instansi yang membantu kelancaran dan kemudahan pelaksanaannya. Kontinuitas pelatihan di tahun berikutnya, perlu diupayakan ketersediaan dana dari sumber selain dana hibah misal dana APBD untuk kegiatan pelatihan yang terstruktur dan terprogram.

Kata Kunci: Upaya pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penanggulangan kemiskinan.

SUMMARY

Rizky Deandra Ernawan, 2016. Government Administration, Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya. **The Governmental Efforts in Community Empowerment through the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (Study of the Agency of Family Planning and Community Empowerment (BKBPM) and the Community of Lesanpuro Village, Kedungkandang District, Malang City)**. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D, 155 Pages.

Local Officer Working Unit with a prominent role for UMKM development in Malang City was the Agency of Family Planning and Community Empowerment (BKBPM). UMKM development in Lesanpuro Village was done through optimization efforts including: organizing the skill training, giving bequest grant for the training, facilitating the training, and mobilizing the community participation. The trained skills were bag making, mushroom cultivation, computer, and handicraft.

Research was aimed to describe and to analyze BKBPM efforts in community empowerment through the development of Micro, Small and Medium Enterprises in Lesanpuro Village, Malang City. Method of research was analytical description with qualitative approach. Data collection techniques included observation, in-depth interview, and documentation. Focus of research was given upon several subject matters such as BKBPM efforts in mitigating the poverty through UMKM development, the outcome (output) after the delivery of skill training, and the factors supporting and constraining UMKM development in Lesanpuro Village of Malang City.

Result of research about the efforts done by the Agency of Family Planning and Community Empowerment (BKBPM) through UMKM development in Lesanpuro was the optimization of BKBPM roles, that involved organizing the skill training, giving bequest grant for the training, facilitating the training, and mobilizing the community participation. The outcome (output) of UMKM development after the implementation of skill training in Lesanpuro Village included the development, product innovation, and marketing strategy in relevant with method or way of marketing of UMKM products. Some factors were supporting and constraining BKBPM activities in UMKM development in Lesanpuro Village. The supporting factors were human resource, fund source, and distance factor (accessibility). The constraining factors were capitalization, coordination between agencies, and marketing for UMKM products.

Things that must be done by the Agency of Family Planning and Community Empowerment (BKBPM) in Malang City were building effective coordination with other institutions that resolved UMKM development problems such that there would be not overlapping of roles. In concerning with marketing and promotion of UMKM products in Lesanpuro village, it should be an organization to help and facilitate these activities. Training must be continued for next year. The availability of funding was ensured by providing bequest grant from APBD for the more structured and programmed activities.

Keywords: Governmental Efforts, Community Empowerment, Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), Poverty Mitigation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) & Masyarakat Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc, selaku Ketua Minat Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya.
5. Bapak Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D, selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

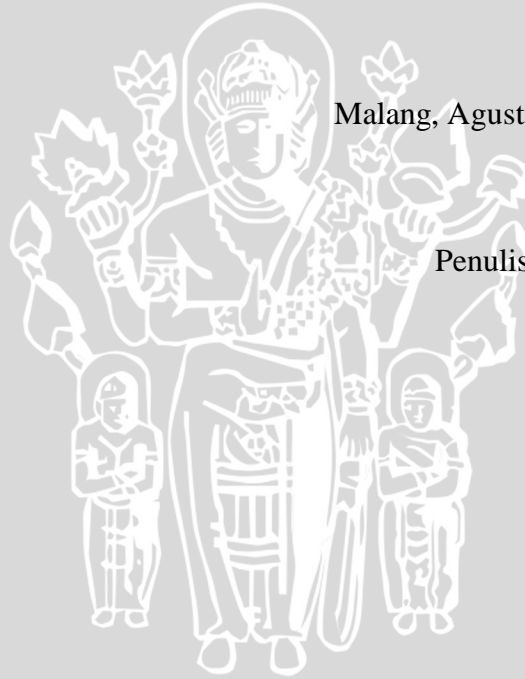
6. Kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga, sehingga saya dapat lulus dengan hasil yang baik.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberi semangat, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman sekelas sekaligus sahabat penulis selama berada di Kota Malang, Aries Samudra Wicaksono, Moh. Sahawi, Rozi Qordhowi, Pandu Dwi Cahyo, I Wayan Dedik Mahendra dan Resti Ardian Widya Tanta, Dea Isalia Candra dan Dhita Pinatih yang telah sabar dan tulus dalam memberikan kebaikan dan semangat yang luar biasa serta selalu menemani selama di Malang.
9. Teman-teman seperjuangan Administrasi Pemerintahan angkatan 2012 atas dukungan serta bantuan selama mengerjakan skripsi.
11. Ibu Arum Pawestri, ST, MT, M.Sc, selaku Kasubid Pengembangan Potensi Masyarakat BKBPM Kota Malang dan anggota yang selalu menyediakan tempat untuk saya ketika penelitian dan selalu memberikan informasi dan arahan demi kelancaran skripsi saya.
12. Bapak Ir. Darmawan Setiabudi selaku ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Lesanpuro yang telah bersedia saya wawancarai serta memberikan saya data mengenai pelaksanaan pelatihan di Kelurahan Lesanpuro.
13. Ibu Purwaningsi S.Sos Selaku Kelompok pelaksana fungsi Dinas pada Kelurahan Lesanpuro yang sudah bersedia untuk diwawancarai serta menjelaskan beberapa hal yang bersangkutan dengan skripsi saya.

14. Sebagian Masyarakat Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang membantu dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

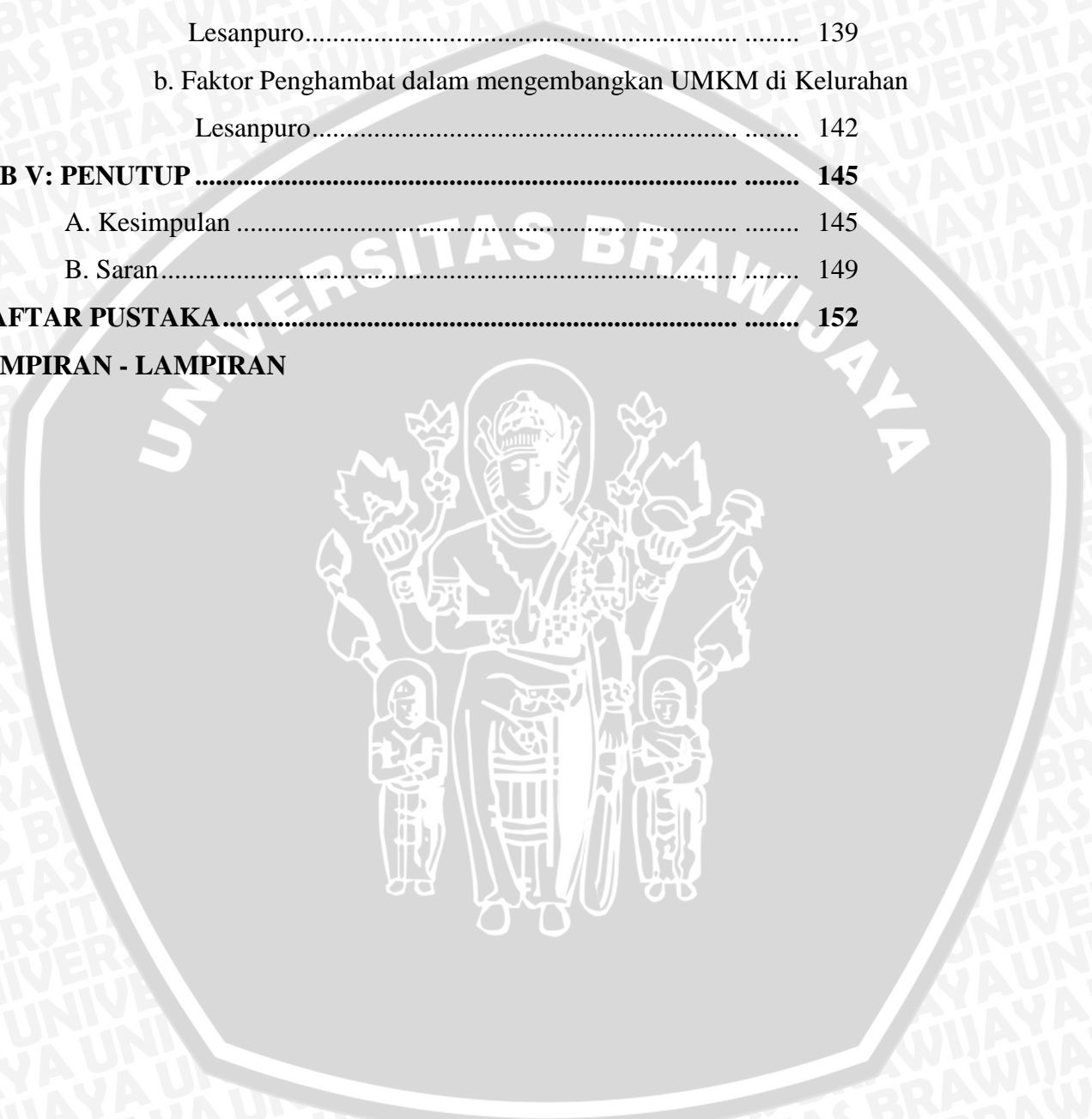
	Halaman
COVER	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Pemerintah Daerah.....	15
1. Pengertian Pemerintahan.....	15
2. Pengertian Pemerintah Daerah.....	16
B. Peran	18
1. Definisi Peran	18
2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan.....	20
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	21
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	21



2. Konsep Pemberdayaan.....	23
3. Tujuan Pemberdayaan	26
4. Indikator Pemberdayaan.....	27
5. Strategi Pemberdayaan	28
D. Kemiskinan	29
1. Definisi Kemiskinan	29
2. Konsep Kemiskinan	30
3. Kriteria Kemiskinan	31
E. Usaha Mikro Kecil Menengah.....	33
1. Definisi UMKM.....	33
2. Faktor Pengembangan UMKM.....	35
(1). Pemasaran.....	35
(2). Inovasi	37
(3). Sumber Daya Manusia	38
(4). Modal.....	39
(5). Aksesibilitas	40
F. Kerangka Konseptual.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Fokus Penelitian	46
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik pengumpulan Data.....	51
F. Instrumen Penelitian	54
G. Analisis Data	55
BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Kondisi Umum Kelurahan Lesanpuro	57
2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.....	60
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	68
1. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.....	71
a. Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan	72

b. Penyaluran dana hibah untuk pelatihan	86
c. Fasilitator pelaksanaan pelatihan	87
d. Penggerakan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan	88
2. Hasil (<i>Output</i>) pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setelah dilakukan pelatihan keterampilan	91
a. Perkembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang kota Malang	91
b. Inovasi pada UMKM di Kelurahan Lesanpuro	106
c. Metode pemasaran produk UMKM di Kelurahan Lesanpuro..	115
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan BKBPM Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang	121
a. Faktor Pendukung dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro	121
b. Faktor Penghambat dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro	126
C. Analisis Penyajian Data	129
1. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang	129
a. penyelenggaraan pelatihan keterampilan	130
b. Penyalur dana hibah	133
c. Fasilitator pelaksanaan pelatihan	133
d. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan	134
2. Hasil (<i>Output</i>) pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setelah dilakukan pelatihan keterampilan	136
a. Perkembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang kota Malang	136
b. Inovasi pada UMKM di Kelurahan Lesanpuro	137
c. Metode pemasaran produk UMKM di Kelurahan Lesanpuro	138

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan BKBPM Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.....	139
a. Faktor Pendukung dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro.....	139
b. Faktor Penghambat dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro.....	142
BAB V: PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tipe Ideal Peranan Pemerintah (Negara) Dalam Pembangunan Masyarakat.....	3
Tabel 1.2 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Periode Maret 2014-Maret 2015	8
Tabel 4.1 Angka Kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang	68
Tabel 4.2 Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro.....	69
Tabel 4.3 Kegiatan Pelatihan di Kelurahan Lesanpuro	75
Tabel 4.4 Daftar Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Tas yang Mengembangkan UMKM dan Tidak Mengembangkan.....	92
Tabel 4.5 Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Pembuatan Tas.....	93
Tabel 4.6 Daftar Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Jamur yang Mengembangkan UMKM dan Tidak Mengembangkan.....	95
Tabel 4.7 Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Budidaya Jamur.....	96
Tabel 4.8 Daftar Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan tangan yang Mengembangkan UMKM dan Tidak Mengembangkan.....	98
Tabel 4.9 Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Kerajinan Tangan.....	100
Tabel 4.10 Daftar Jumlah Peserta Pelatihan Komputer yang Mengembangkan UMKM dan Tidak Mengembangkan.....	103
Tabel 4.11 Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Komputer.....	104
Tabel 4.12 Kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Kelurahan Lesanpuro.....	113



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.....	61
Gambar 4.2 Alur Tata Kerja BKBPM dalam pengembangan UMKM.....	74
Gambar 4.3 Pelatihan Pembuatan Tas.....	77
Gambar 4.4 Pelatihan Budidaya Jamur.....	79
Gambar 4.5 Pelatihan Kerajinan Tangan (<i>Handycraft</i>).....	81
Gambar 4.6 Pelatihan Komputer (Desain Grafis).....	84
Gambar 4.7 Contoh Budidaya Jamur yang ditekuni Ibu Maria.....	98
Gambar 4.8 Contoh Tas berbahan dasar kain levis dan kulit sintetis.....	109
Gambar 4.9 Contoh Tas beratribut klub sepak bola.....	109
Gambar 4.10 Kerajinan tangan tempat permen Berbahan dasar kertas bungkus.....	111
Gambar 4.11 Kerajinan tangan tempat tisu berbahan dasar kertas kalender.....	112
Gambar 4.12 Kerajinan tangan tempat air gelas dengan hiasan kain perca.....	112
Gambar 4.13 Larutan Bio Slurry.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset Fakultas
2. Surat Pengantar Riset BAKESBANGPOL
3. Instrumen Penelitian
4. Contoh Proposal Permohonan Dana Kegiatan Pelatihan di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang



B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di daerahnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, daya saing serta pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana tertulis dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Prinsip otonomi seluas-luasnya yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 diatas dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Munir (2010:19) peran pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya diantaranya *Entrepreneur*, Koordinator & Fasilitator. Jadi yang dimaksudkan dari peran pemerintah sebagai *Entrepreneur* (Wirausaha) adalah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi potensial sehingga memberi keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Seperti pada program pemberdayaan serta penyuluhan kepada masyarakat terkait potensi yang ada di daerah mereka. Adanya potensi tersebut mempunyai nilai jual sehingga kedepannya bisa memajukan daya saing masyarakat serta menjadi mata pencaharian bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut.

Peranan pemerintah daerah dalam fungsi koordinator yaitu pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan. Peran fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudional*, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan.

Peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan

daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Pada akhirnya masyarakat dapat berswasembada dengan adanya proses pemberdayaan tersebut.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Secara otomatis strategi yang paling jitu pada keberhasilan pembangunan nasional adalah melalui pemberdayaan. Dengan pemberdayaan masyarakat bisa termotivasi dan berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial ekonomi dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat. Selain itu menurut Suryono (2010:88) terdapat tipe ideal peranan pemerintah (negara) dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tipe Ideal Peranan Pemerintah (Negara) Dalam Pembangunan Masyarakat

PEMERINTAH	PERANAN	MASYARAKAT
- Perencanaan - Programming - Implementasi	Lebih besar	- Hanya melaksanakan
- Perencanaan dan bimbingan	Lebih besar	- Persetujuan dan Implementasi
- Inisiatif, Pengarahan dan Bimbingan	Sama	- Perencanaan dan Pelaksanaan
- Penyuluhan dan bimbingan	Lebih kecil	- Mulai dari Inisyatif sampai Pelaksanaan
- Bimbingan atas permintaan sebagai	Lebih kecil	- Masyarakat Swasembada

PEMERINTAH	PERANAN	MASYARAKAT
fasilitator dan regulator		

Sumber : *Suryono (2010:88)*

Berdasarkan tabel 1. bahwasanya dalam melaksanakan suatu pembangunan hendaknya pemerintah dan masyarakat berperan bersama-sama, dimana pemerintah memiliki peran dalam perencanaan, pembuat program, hingga proses implementasi yang kemudian pada proses implementasi tersebut mengikutsertakan masyarakat yaitu memberi pengarah dan bimbingan terhadap suatu program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian pada pelaksanaan program pembangunan, masyarakat dapat meluangkan pikiran serta inisiatifnya agar program pembangunan tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan.

Pemberdayaan Masyarakat dinilai berhasil apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat. Pemberdayaan dapat diimplementasikan melalui berbagai macam kegiatan atau program. Berbagai macam program pemberdayaan telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta dalam pengentasan kemiskinan salah satunya melalui pembentukan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masing masing daerah berdasarkan potensi pada daerah tersebut.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah

maupun masyarakat lokal. Penempatan UMKM pada posisi yang strategis guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi sehingga susah memperoleh pekerjaan. Menurut Azrin (2009:48), UMKM memiliki keunggulan-keunggulan yaitu: 1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk; 2. Berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian; 3. Kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja; 4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis; 5. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan; 6. Dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia; 7. Tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif. Dengan adanya pemberdayaan UMKM akan berdampak pada pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing melalui potensi masing-masing daerah yang ada di Indonesia.

Kota Malang memiliki beragam potensi UMKM. Dengan keberadaan Kota Malang yang terkenal dengan potensi pariwisata dan pendidikan, tentu bisa menarik minat para pendatang untuk sekedar singgah maupun menetap. Hal ini bisa menjadi latar belakang untuk memberdayakan masyarakat melalui sektor UMKM. Banyak UMKM yang berkembang di Kota Malang,

baik itu di bidang kerajinan tangan, pangan dan lain-lain. Hal ini terlihat pada data Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang menunjukkan adanya perkembangan jumlah UMKM dalam kurun 5 Tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009 sebanyak 213 unit dan pada tahun 2015 lebih kurang sebanyak 800 Unit.

Kota Malang memiliki 5 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Pada masing-masing Kelurahan yang berada di dalam Kecamatan tersebut memiliki potensi dalam mengembangkan UMKM. Salah satunya Kelurahan Lesanpuro yang berada di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada Kelurahan tersebut memiliki potensi dalam mengembangkan UMKM, hal ini nampak pada banyaknya usaha kecil yang tumbuh dan berkembang pada wilayah tersebut. Namun, usaha kecil tersebut belum memiliki wadah dalam pengembangannya sehingga UMKM yang berada di Kelurahan Lesanpuro ini tidak berkembang dengan terarah.

Salah satu badan /Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam pengembangan UMKM di Kota Malang adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Peran BKBPM yang semula sebagai pengkoordinir pelaksanaan program keluarga berencana, saat ini juga berperan penting dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Malang yaitu sebagai fasilitator. Pada pengembangan UMKM , BKBPM berperan pada pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Sehingga masyarakat

yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya dengan memiliki modal baik itu berupa keterampilan atau materi, begitu juga dengan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dengan peran Badan Keeluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) sebagai fasilitator tadi juga dapat menjadi wadah dalam pengembangan UMKM yang ada di masing-masing Kelurahan yang ada di Kota Malang baik itu pada permodalan maupun peningkatan keterampilan pada bidang bisnis yang mereka tekuni. Pada akhirnya dengan peran BKBPM sebagai fasilitator tersebut akan berimplikasi pada penanggulangan kemiskinan dengan berkurangnya pengangguran melalui pengembangan sektor UMKM yang ada di Kota Malang.

Menurut Bryan and White dalam Suryono (2004:35) mengemukakan implikasi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan salah satunya adalah pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*), yang juga berarti salah satu indikator kesuksesan dalam pembangunan adalah pada kesejahteraan masyarakatnya. Jika berbicara kesejahteraan masyarakat seringkali dikaitkan dengan seberapa besar kemiskinan yang bisa dientaskan, jadi dapat dikatakan semakin besar pengentasan kemiskinan itu berarti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan berhasil.

Kemiskinan seperti cerita yang tiada bagian akhirnya, menurut Soekanto (1982:10), kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental,

maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada provinsi Jawa Timur menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 angka kemiskinan juga mengalami peningkatan dari bulan September 2014 berkisar 12,28% kemudian pada bulan Maret 2015 menjadi 12,34% kemiskinan yang ada di kota maupun di desa, seperti yang tertera pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi September 2014–Maret 2015													
Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)						Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
		Sep'14	Mar'15	Sep'14	Mar'15	Sep'14	Mar'15	Sep'14	Mar'15	Sep'14	Mar'15	Sep'14	Mar'15
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35	Jawa Timur	1.531,89	1.524,62	3.213,53	3.264,50	4.746,42	4.769,12	8,30	8,19	15,92	16,18	12,28	12,34

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Sedangkan angka kemiskinan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, pada awal 2014 sebesar 5,20% atau 43.953 penduduk dari 845.252 penduduk Kota Malang. Begitu juga dengan Kelurahan Lesanpuro angka kemiskinan lebih kurang 850 jiwa atau sekitar 4,86% dari 17.462 jiwa penduduk Kelurahan tersebut. Tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Malang salah satunya di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedung Kandang. Secara umum, ada beberapa hal yang diduga sebagai faktor penyebab kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro, Kota Malang antara lain :

1. Adanya kebijaksanaan Pemerintah yang setiap saat berubah misalnya :

- a. Kenaikan harga 9 bahan pokok dan BBM yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diperolehnya.
 - b. Adanya regulasi pemerintah tentang kelistrikan dan Air minum yang diserahkan kepada swasta, sehingga kenaikan harga tergantung kepada kebijaksanaan institusi tersebut. Kenaikan harga sering dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, hal inilah yang menyebabkan beban masyarakat semakin berat.
 - c. Adanya kebijaksanaan pemerintah tentang perburuhan yang cukup memberatkan usahawan dan kecilnya kenaikan UMR bagi buruh, sehingga muncul PHK besar-besaran di penghujung tahun ini.
2. Adanya faktor-faktor yang bersifat individual misalnya :
- a. Belum memperoleh atau tidak mendapat pekerjaan.
 - b. Tanggungan keluarga yang banyak sehingga penghasilannya tidak mencukupi.
 - c. Penghasilan perbulannya di bawah UMR
 - d. Karena malas bekerja.

Berdasarkan kasus diatas, pengentasan kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan partisipatif, atau dengan kata lain melibatkan peran aktif masyarakat. Menurut Sumodiningrat (2011:45) Program pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakat harus merupakan program yang dapat terus-menerus berjalan dan dapat mandiri, atau dalam artian penduduk miskin mendapat peningkatan salam kemampuan untuk

menolong diri mereka sendiri, karena posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang bergantung pada pemberian dari pihak luar, seperti pemerintah. Keberadaan masyarakat berposisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri sehingga pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakat diadakan untuk meningkatkan pola pikir masyarakat miskin agar dapat melakukan kegiatan secara produktif serta pelaksanaan mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Dengan diketahuinya berbagai faktor yang diduga sebagai penyebab kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam bagaimana upaya pemerintah melalui optimalisasi peran dan kerjasamanya yaitu instansi instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan UMKM tersebut dalam sebuah Penelitian dengan Judul : **UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Study Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) & Masyarakat Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian penjelasan pada latar belakang serta rencana penelitian, maka permasalahan disusun dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah (BKBPM) dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan (UMKM) Usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) yang dilaksanakan oleh BKBPM Kota Malang di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemerintah (BKBPM) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan pengembangan UKM yang dilaksanakan oleh BKBPM Kota Malang di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a) Meningkatkan kemampuan penalaran dan analisis dalam menyikapi fenomena yang ada dan sebagai usaha menerapkan disiplin ilmu administrasi publik yang diperoleh.
- b) Dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi dan kajian lebih lanjut terkait Peran Instansi terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan .

2. Manfaat secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.

b) Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi BKBPM dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang serta dapat melakukan perbaikan untuk diimplementasikan pada Kelurahan lainnya di Kota Malang.

c) Bagi peneliti lain

Sebagai informasi pembanding bagi peneliti lain yang membahas tentang strategi pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

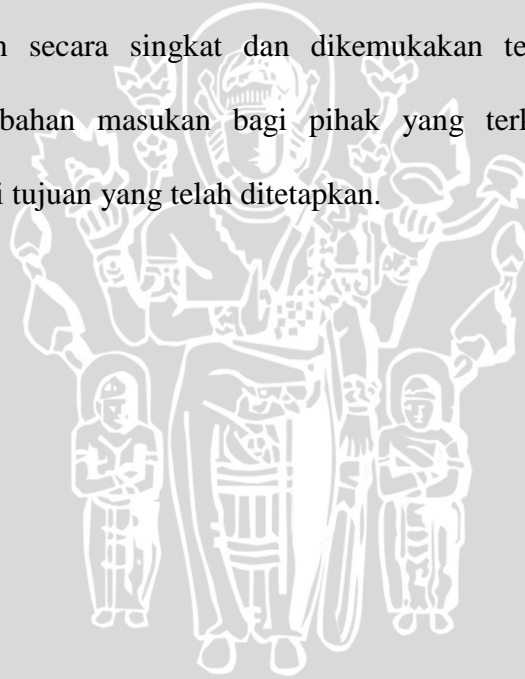
E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, selanjutnya disampaikan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam setiap bab, yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka memuat uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan BKBPM (Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Rangka Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
- BAB III** : Metode Penelitian sosial, dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang dilakukan peneliti, penentuan fokus penelitian, lokasi penelitian, penentuan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data.
- BAB IV** : Hasil dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan meliputi penyajian data yang diperoleh di lapangan berdasarkan fokus penelitian, yaitu

upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) dan faktor-faktor penghambat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

BAB V : Penutup, dalam bab ini meliputi kesimpulan dari seluruh uraian tentang data-data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan secara singkat dan dikemukakan tentang saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan

Sejak zaman Yunani Kuno, beberapa ratus tahun sebelum tahun masehi, diantara para cendekiawan Yunani ada anggapan bahwa di dunia ini ada tiga macam pemerintahan yaitu Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.

Prinsip dari perbedaan antara ketiga macam pemerintahan ini berdasarkan atas jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan. Untuk memahami pengertian pemerintahan, kita dapat memaknai dari asal katanya.

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut W.Y.S Poerwadarmita (1983:74) perintah diartikan sebagai berikut:

- ❖ Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- ❖ Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- ❖ Menurut Samual Edward Finer (1974:3-4)

Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah serta mengakui ada Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit yakni:

- a) Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.

- b) Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.
- ❖ Menurut Inu Kencana Syafie (2001:20) pengertian pemerintah sebagai berikut:

“Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni karena berapa banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sistematis secara spesifik (khas)”.

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan kata lain Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993:17). Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kemampuan aparatur yang ada di lembaga pemerintah sangat penting arti dan

keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa ditunjang dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang.

Pengembangan kemampuan SDM pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan sehingga dapat dicapai efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ukuran dan target yang diharapkan. Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:20-27) adalah:

- a) Fungsi otonomi
Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b) Fungsi pembantuan
Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
- c) Fungsi Pembangunan
Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks
- d) Fungsi lainnya
Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:
 - 1) Pembinaan wilayah
 - 2) Pembinaan masyarakat

- 3) Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal, dimana wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya. Upaya pemerintah daerah dalam membina masyarakat adalah salah satu peran dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, fungsi lain dari pemerintah daerah yaitu pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum. Fungsi pemerintah daerah tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena fungsi dasar dari pemerintah itu sendiri adalah memberikan pelayanan misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat lemah atau ditindas oleh kaum penguasa. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan advokasi terhadap kaum-kaum tertindas, misalnya adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

B. Peran

1. Definisi Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Selain itu, peran juga memiliki beberapa definisi yaitu :

❖ Menurut Soekanto (2002:243)

Mengatakan Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

❖ Menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa

“Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus”.

❖ Menurut Thoah (1997:80) menyatakan bahwa

“Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan, uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya”.

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku

atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan

Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam kemajuan dan kesejahteraan pembangunan di daerah. Ada empat peran yang dapat diambil pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif - inisiatif pembangunan daerahnya (Arsyad, 1999:120):

1. Entrepreneur

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD).

2. Koordinator

Pemerintah daerah sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses. Dalam peranannya ini, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi.

3. Fasilitator

Pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

4. Stimulator

Peran pemerintah daerah menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk industri-industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pemerataan.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan & Pemberdayaan Masyarakat

Bila membuka paparan dari *webster dictionary*, kata *empower* (pemberdayaan) mengandung dua arti. Pertama adalah *to give power or authority to*. kedua berarti *to give ability or enable*. pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. sedangkan pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Namun beberapa ahli juga mempunyai beberapa definisi tentang pemberdayaan (*empowerment*), berikut adalah definisi pemberdayaan menurut para ahli:

- ❖ Menurut Suhendra (2006:75) mengatakan bahwa :

“Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara strategis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif. Dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

- ❖ Menurut Ife (dalam Suhendra 2006:77) pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung “*empowerment aims to increase the power of disadvantage*”.
- ❖ Reonard D.White (dalam Suhendra 2006:2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*).
- ❖ Swift dan Levin (1987:13) *empowerment* atau pemberdayaan sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (*reallocation of power*).
- ❖ Rappaport (1984:3) *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.
- ❖ Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007, 1-2)

Membagi tiga proses pemberdayaan :

pertama, tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan “pencerahan” dengan memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Mereka harus diberikan motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kedua, tahap pengkapasitasan, tahap ini terdiri dari tiga jenis pengkapasitasan yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk

meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” didalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

Ketiga, tahap penyadaran pada tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006:72) globalisasi yang terjadi pada millenium ketiga atau pembangunan dunia ketiga ini membawa proses transformasi global yang dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan transportasi. Dengan adanya arus globalisasi, semua negara diseluruh penjuru dunia dengan cepat maupun lambat akan terjamah oleh perubahan politik, ekonomi, sosial budaya dan aspe-aspek kehidupan lainnya. Tidak heran apabila pada era globalisasi ini setiap negara berusaha untuk mampu memprediksi dampak dari globalisasi itu sendiri yang dapat melihat peluang serta mengembangkannya. Namun globalisasi juga harus dilihat dari segi ancamannya juga, dimana ancaman tersebut dapat dijinakkan menjadi motivasi dalam mencapai visi dan misi negara. Selain itu modal setiap negara untuk mempertahankan eksistensinya bahkan maju adalah sumber daya manusia (*human resorces*), kekayaan alam (*natural resources*), dan teknologi yang dimiliki. Ketiga sumber daya tersebut penting akan tetapi kuncinya adalah sumber daya manusia, Manusia dalam arti kuantitas maupu kualitas.

Indonesia dewasa ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Republik Rakyat Cina (RRC), India, dan Amerika Serikat. Selain itu dengan banyaknya jumlah pengangguran terbuka maupun tertutup di Indonesia menyebabkan angka ketergantungan di Indonesia sangat tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat produktivitas nasional *Gross National Product* tidak optimal. Keberadaan jumlah tenaga kerja jauh melebihi jumlah lapangan kerja yang tersedia. Sebagian penganggur merupakan mereka yang berpendidikan dan berketrampilan rendah.

Dengan sumber daya manusia yang banyak, Indonesia mampu memainkan politik luar negeri, hubungan ekonomi internasional, memberi kontribusi perdamaian dunia yang hakekatnya melaksanakan empat tugas pokok yang diamanatkan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun empat tugas pokok Nasional yaitu:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b) Memajukan kesejahteraan umum.
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian.
- e) Abadi dan keadilan sosial.

Dengan sumberdaya manusia yang handal, negara-negara maju sudah merubah jenis ekonomi rakyat dan negara secara evolutif maupun cepat. Tidak dapat dipungkiri banyak negara yang sumber daya alamnya tidak terlalu menjanjikan, akan tetapi dengan sumber daya manusia yang

berkualitas, bisa menjadi negara maju atas hasil sektor jasanya. Untuk itu dalam proses perubahan jenis ekonomi dari agraris ke sektor jasa mutlak memerlukan pemberdayaan masyarakat (SDM) yang berkualitas seiring dengan peranan sentral terhadap pembangunan sumber daya manusia, Konosuke Matsushita (dalam Suhendra, 1988:31) menyatakan: “*we make people before we make product*”. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa sebelum memproduksi barang dan jasa, kita menyiapkan sumber daya manusianya terlebih dahulu untuk membuat barang dan jasa tersebut dan juga sebagai konsumen yang mempunyai daya beli.

Konsep pemberdayaan masyarakat sendiri adalah sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengalaman, dan pelaksanaan demokrasi. Menurut Sewell Coppock (dalam Suhendra 2006:77) ada dua alasan penting bagi perencanaan pembangunan untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan yaitu alasan intrinsik dan alasan pragmatis. Secara intrinsik, setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan menyampaikan pendapatnya terhadap issue pembangunan, sedang secara pragmatis, pemerintah selaku perencana dapat menggali aspirasi masyarakat.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Jamasy (2004:42) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004:80) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

4. Indikator Pemberdayaan

Hashemi dan Riley (dalam Suharto:2008) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan:

- a) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop,

- rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b) Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c) Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

- f) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi (Hanna dan Robinson, 1994 dalam Hikmat, 2006 : 141).

- 1) Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.

- 2) Strategi direct-action membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
- 3) Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

D. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

❖ Hall dan Midgley (2004:14)

Menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

❖ Suryawati, (2005: 122)

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup

❖ BAPPENAS (1993) menyatakan bahwa

“mendefinisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak”.

❖ Menurut BPS (2008),

“berbagai masalah kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat terminologi, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut menurut BPS, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilai minimum kebutuhan dasar yang dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin”.

2. Konsep Kemiskinan Menurut Para Ahli

Hasil-hasil studi tentang pembangunan yang terarah pada kebijakan negara dan masalah kemiskinan telah lama menjadi prioritas. Akan tetapi, teori pembangunan konvensional yang berkembang justru semakin kompleks sehingga keberhasilan pembangunan semakin tidak jelas Rondinelli (dalam Surjono & Nugroho 2008:40). Menurut SMERU (dalam Soerjono & Nugroho 2008:40) menyatakan dimensi kemiskinan sebagai berikut :

- a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan).
- b) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi parit bersih, dan transportasi).
- c) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

- g) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
- h) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- i) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Kompleksnya dimensi kemiskinan tersebut yang dipaparkan tersebut menandakan suatu negara yang tidak dapat mengentaskan warganya dari kemiskinan, sedangkan banyaknya warga negara tersebut masih harus banyak membangun untuk mengatasi berbagai dimensi kemiskinan tersebut.

3. Kriteria Kemiskinan

- a) Menurut BPS, ada 14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS:
 - 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
 - 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
 - 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
 - 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
 - 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
 - 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
 - 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah

- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiskinan adalah (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12)

besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

E. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain:

❖ Menurut Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

(KUMKM, 2004), mendefinisikan Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Mempunyai omzet penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c) Milik warga Negara Indonesia.
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum (termasuk koperasi).

❖ **Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:**

a) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

❖ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

2. Faktor Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

(1). Pemasaran

a. Definisi Pemasaran Menurut Para Ahli

Pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok dalam suatu perusahaan untuk mempertahankan hidup dan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen agar perusahaan tetap bisa berkembang, atau konsumen mempunyai pandangan baik terhadap perusahaan tersebut.

- ❖ Menurut Kotler dan Armstrong (2008:6),

Pemasaran merupakan proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.

- ❖ Menurut Tjiptono (2008:5)

Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak yang paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal.

- ❖ Menurut Daryanto (2011 : 1)

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.

b. Konsep Pemasaran

Konsep Pemasaran Bagi perusahaan yang berorientasi pada konsumen (pasar), maka kegiatan pemasaran akan bermula dan berakhir pada konsumen. Artinya dimulai dari menentukan apa yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup perusahaan seperti yang tercermin dalam konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Dharmesta (2008:104) bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah

bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup

(2). Inovasi

a. Definisi Inovasi

Secara umum, inovasi adalah proses pembaharuan/ pemanfaatan/ pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Inovasi juga dapat diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Dalam suatu usaha atau bisnis tentunya juga menuntut untuk melakukan suatu inovasi agar produk yang dihasilkan terlihat unggul.

❖ Menurut Raharso (2006: 8)

Menyatakan kinerja organisasi pada dasarnya tergantung keserasian dari inovasi teknik dan inovasi administratif. Inovasi teknik berhubungan dengan aktivitas kerja dasar yang bisa berpengaruh secara langsung terhadap produk maupun proses. Inovasi administratif adalah inovasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas dasar organisasi. Misal penggunaan komputer untuk melakukan pembukuan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pengukuran inovasi dapat ditinjau dalam inovasi produk, Inovasi proses inovasi administrasi dan inovasi teknologi.

❖ Menurut Hurley and Hult dalam (Kusumo, 2006:22)

Inovasi produk adalah sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran – pemikiran baru, gagasan-gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan.

Berdasarkan sudut pandang UKM (Usaha Kecil Mikro),

❖ Menurut Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dan Forda UKM Jawa Timur (2007:80) menyebutkan bahwa Agar produk dapat diterima masyarakat, tentunya dibutuhkan inovasi,

- inovasi yang pertama adalah dengan membuat inovasi pada desain agar dipandang lebih unggul
- inovasi yang kedua yaitu sebelum produk diluncurkan, selalu dilakukan penelitian – penelitian. Baik dalam hal teknologi maupun daya serap pasarnya.

(3). Sumber Daya Manusia

a. Definisi Sumber Daya Manusia

❖ Menurut Sumarsono (2003 : 4)

Sumber Daya Manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

- ❖ Menurut Hariandja (2002 : 2)

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

- ❖ Hasibuan (2003 : 244)

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

(4). Modal

a. Definisi Modal

- ❖ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Nugraha (2011:9)

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

- ❖ Menurut Irawati (2006:7)

Modal diartikan sebagai kumpulan dari barang-barang modal yaitu, semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.

- ❖ Menurut Riyanto (2001:18)

Modal adalah kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan modal yang terdapat di neraca-neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud barang-barang modal adalah barang-barang yang ada di dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.

(5). Aksesibilitas

a. Definisi Aksesibilitas

- ❖ Menurut Susantono (2004:1)

Aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.

Kemudian Susantono (2004:24) menambahkan bahwa :

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan. Karakteristik sistem transportasi ditentukan oleh aksesibilitas. Aksesibilitas memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan atau tata guna lahan. Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada pola perjalanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini kemudian mempengaruhi jaringan transportasi dan akan pula memberikan pengaruh pada sistem transportasi secara keseluruhan.

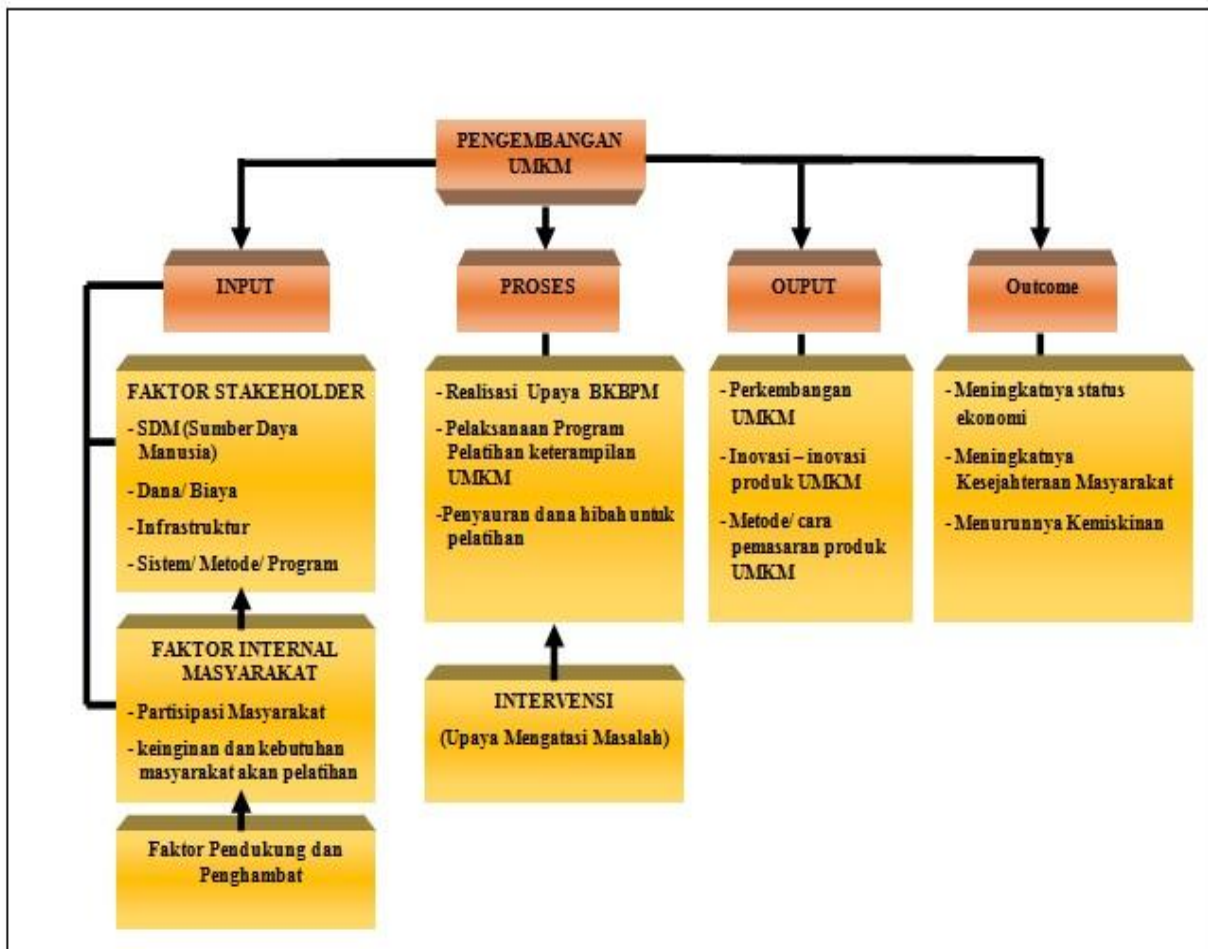
- ❖ Menurut Blunden dan Black (1984) dalam Tamin (1997: 52) menyatakan bahwa :

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran

kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 'mudah' atau 'susah' nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.

F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



(Sumber: Diolah Peneliti, 2016)

Pada penelitian ini mengulas menggunakan metode pendekatan sistem yang dimulai dari input yang meliputi faktor Sumber Daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, biaya, Infrastruktur/ material serta sistem yang dapat berfungsi sebagai faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan peran dari BKBP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Malang selaku stakeholder/ pemerintah dalam hal ini optimalisasai peran sebagai upaya BKBP dalam pengembangan Usaha Kecil Miro Menengah (UMKM)

Faktor input yang berasal dari faktor internal masyarakat, meliputi partisipasi masyarakat serta keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pelatihan dalam rangka mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sehingga pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dapat terwujud. Faktor internal masyarakat, juga berfungsi sebagai faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan peran BKBPM dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan dan pengembangan UMKM.

Faktor proses peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui realisasi Upaya BKBPM dalam pelaksanaan pembentukan dan pengembangan UMKM, proses pengembangan UMKM antara lain realisasi upaya BKBPM dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi serta menganalisis pemberdayaan masyarakat peneliti juga melaksanakan wawancara dan observasi lapangan kepada para pelaku UMKM tentang pelaksanaan program pelatihan keterampilan. Hal lain yang peneliti amati adalah bagaimana penyaluran dana hibah untuk pelatihan.

Faktor *output* meliputi data primer dan data sekunder antara lain data jumlah peserta pelatihan, hasil pelatihan yang diadakan BKBPM dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro, yaitu perkembangan setelah pelatihan yang meliputi: peningkatan penghasilan, inovasi produk UMKM serta metode/cara pemasaran produk UMKM. Faktor (*Outcome*) atau

manfaat melihat atau menganalisis peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah pelatihan pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh BKBPM dan pada akhirnya akan menganalisis penurunan kemiskinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang membuahkan berbagai penemuan yang tak dapat dicapai dan diperoleh dengan data statistik seperti layaknya apa yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang digunakan dalam metode penelitian adalah apa yang ada di dalam masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, dan juga beberapa hal di dalam masyarakat yang lain. Metode yang digunakan ini adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan akan apa yang ada di balik segala hal yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, terkadang apa yang terjadi tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang sulit untuk dimengerti sehingga membutuhkan data penjas untuk memahami hal tersebut (Strauss dan Corbin:2003) Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena aktual secara teratur.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif akan membuat seorang peneliti mampu melihat secara lebih luas dan mendalam fenomena yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi antara aparat pemerintah daerah dengan masyarakat maupun sebaliknya. Jadi, penelitian

mencoba mendeskripsikan, memberikan gambaran, menguraikan, membahas permasalahan yang terjadi serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu Upaya Pemerintah/ BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat) dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang dengan melihat upaya melalui optimalisasi peran instansi tersebut, implementasi kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta faktor-faktor baik pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan dan pengembangan UMKM tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan objek ketika melakukan penelitian. Pada prinsipnya perumusan fokus adalah untuk membatasi studi bagi peneliti. Moleong (2006:94), berpendapat bahwa penetapan fokus penelitian atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di area atau lapangan penelitian. Adapun fokus pada penelitian ini yang membahas mengenai upaya BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat) dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang antara lain :

1. Upaya pemerintah /BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) antara lain :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan.
 - b. Penyaluran dana hibah untuk pelatihan.
 - c. Fasilitator pelaksanaan pelatihan.
 - d. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan.
2. Hasil (*Output*) pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setelah dilakukan pelatihan keterampilan.
 - a. Perkembangan UMKM.
 - b. Inovasi – inovasi produk UMKM.
 - c. Metode/ cara pemasaran produk UMKM.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membentuk dan mengembangkan UMKM
 - a. Faktor pendukung
 - (1) Sumber Daya Manusia.
 - (2) Sumber Dana/ Biaya.
 - (3) Faktor Jarak dan lokasi (Aksesibilitas).

b. Faktor penghambat

- 1) Permodalan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi antar instansi.
- 3) Pemasaran Produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang diteliti berlangsung. Sesuai penjelasan tersebut dan untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara praktis atau kenyataannya maka peneliti mengambil lokasi pada Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti memperoleh dan menangkap keadaan atau fenomena dari objek yang diteliti, yaitu mencakup seluruh tempat dimana saja peneliti yang tepat maka peneliti akan mudah mendapatkan dan memahami fenomena yang berkembang sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun situs penelitian yang digunakan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM); Kantor Kelurahan Lesanpuro; Sekretariat BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Lesanpuro Kota Malang dan beberapa tempat Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdapat di Kelurahan Lesanpuro, kota Malang.

Adapun alasan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Situs Penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan Kelurahan Lesanpuro daerah pinggiran Kota Malang. Pada Wilayah Kelurahan Lesanpuro terdapat kawasan perumahan yang notabene mayoritas warganya berpendidikan

tinggi, mempunyai pekerjaan yang layak, serta kondisi perekonomian yang berkecukupan. Sedangkan disisi lainnya terdapat perkampungan serta terletak di sekitar Gunung Buring yang mayoritas warganya terdiri dari fakir miskin, berpendidikan rendah serta pekerjaan yang kurang layak bahkan terdapat banyak pengangguran. Adanya kesenjangan sosial di Kelurahan Lesanpuro nampak begitu jelas sehingga patut mendapat perhatian dari pemerintah daerah melalui peran suatu badan atau instansi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yaitu tepatnya melalui pembentukan dan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Penulis ingin mengetahui bagaimana peran instansi yang menangani masalah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan UMKM di kelurahan Lesanpuro yaitu BKBPM (Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Masyarakat) karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut juga memiliki tugas pokok dan fungsi serta peran tentang pengembangan UMKM.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu orang-orang, peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen dan data-data. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan

penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari aktivitas wawancara secara langsung kepada narasumber dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagian Pembangunan Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang.
- b) Sekretaris Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.
- c) BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.
- d) Masyarakat Kelurahan Lesanpuro sebagai Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen, arsip, perpustakaan dan laporan-laporan penelitian terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder juga sebagai data yang telah tersedia, merupakan data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta arsip- arsip yang berkaitan dengan penelitian yang ada di Badan Keluarga Berencana & Pemeberdayaan Masyarakat (BKBPM) dan Kelurahan Lesanpuro Kota Malang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Tupoksi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang.
- b) Profil Wilayah Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.
- c) Data mengenai proses dan hasil (*Output*) pada proses pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pembentukan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.
- d) Dokumentasi gambar proses dan hasil Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan melalui pembentukan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada kegiatan penelitian diperlukan teknik untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperanserta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi menurut (Usman 2008:54) ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia,

proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Pengumpulan data dengan observasi ini memiliki berbagai macam jenis seperti yang diungkap Jahoda dalam Sukardi (1985) yaitu *Observasi Partisipasi* (bersifat eksploratif), *Observasi Sistematis* (Observasi berkerangka) dan *Observasi Eksperimental* (variasi Situasi).

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi berkerangka (*overt observasi Sistematis*). Dimana ketika mengumpulkan data peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan atau kuesioner terhadap narasumber maupun sumber data agar data yang diperoleh benar benar valid sesuai arah tujuan penelitian dan memiliki pedoman. Namun Peneliti juga memperhatikan arah tujuan pertanyaan atau kuesioner yang ditujukan kepada narasumber atau instansi terkait, yaitu menghindari pertanyaan yang mengarah pada hal yang sensitif atau rahasia bagi instansi terkait sebagai narasumber. Observasi peneliti dengan melakukan kunjungan ke Kantor Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang, Kantor Kelurahan Lesanpuro Kota Malang & Sekreariat BKM Kelurahan Lesanpuro

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (Interviewee). Menurut Bungin (2010:155) terapat macam macam wawancara

yaitu: wawancara oleh tim atau panel, wawancara tertutup, wawancara riwayat secara lisan dan wawancara terstruktur tidak terstruktur.

Pihak yang diajak bicara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang.
- b) Sekretaris Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.
- c) Ketua BKM Lesanpuro Kota Malang.
- d) Beberapa masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan melalui Pembentukan dan Pengembangan UMKM oleh Instansi terkait seperti BKBPM, BKM Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Lesanpuro di Kota Malang dalam bentuk arsip, monografi, buletin, artikel surat kabar yang semuanya menyangkut data demografis dan data yang berkenaan dengan fokus penelitian. Data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada seperti berikut:

- a) Output Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan melalui pembentukan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro.

- b) Kuesioner Untuk wawancara dengan instansi terkait.
- c) Foto Kegiatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian akan sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu penelitian, adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti Sendiri

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah manusia sebagai alat (instrumen) sehingga peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alternatif pengumpulan data utama. Kedudukan peneliti dalam penelitian merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia akan menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2000:121).

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sebagai sumber data dalam penelitian. Dengan mempergunakan pedoman wawancara yang baik dengan susunan pertanyaan yang jelas maka wawancara yang dilakukan akan tetap terarah.

3. Peralatan Pendukung lain

Peralatan pendukung yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa alat-alat tulis menulis serta peralatan lainnya.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010:337) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (penyajian data)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Darwing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, untuk itu penelitian ini menggunakan model metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hal ini dikarenakan model interaktif analisis data berlangsung secara terus menerus. Seperti ketika melakukan wawancara tetapi jawabannya kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai memperoleh data yang kredible. Dengan analisis data tersebut diharapkan dapat bersifat sistematis sehingga dapat menghasilkan data yang bersifat akurat dan sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Umum Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

a. Karakteristik dan Lokasi Wilayah

(1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kelurahan Lesanpuro merupakan salah satu dari 57 Kelurahan di Kota Malang dan salah satu Kelurahan dari 11 Kelurahan pada Kecamatan Kedungkandang. Kelurahan Lesanpuro terdiri dari 11 Rukun Warga (RW). Kelurahan Lesanpuro memiliki luas wilayah 354.883 km². Kelurahan Lesanpuro memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kelurahan Madyopuro.
2. Timur : Kelurahan Kedungkandang.
3. Selatan : Kelurahan Cemorokandang.
4. Barat : Kelurahan Sawojajar.

(2) Letak dan Kondisi Geografis

Kelurahan Lesanpuro terletak pada sebelah timur Kota Malang, dan memiliki orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 5 km
- c. Jarak dari Kota/ Ibukota Kabupaten : 5 km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 100 km

Kelurahan Lesanpuro memiliki kawasan yang sebagian terletak pada gunung yaitu Gunung Buring dan sebagian terletak pada kawasan perumahan yaitu Perumahan Dirgantara dan sebagian Perumahan Sawojajar.

(3) Topografi

Kelurahan Lesanpuro dahulunya merupakan kawasan persawahan yang kemudian adanya peralihfungsian lahan menjadi permukiman penduduk berupa perumahan dan perkampungan. Sebagian wilayahnya merupakan perumahan terbesar se-Asia Tenggara yaitu Perumahan Sawojajar Malang. Selain itu juga terdapat perumahan Dirgantara. Seiring berjalannya waktu kini banyak pengembangan ke arah perdagangan, hal ini nampak dengan banyaknya didirikan pertokoan atau ruko. Sebagian wilayah Kelurahan Lesanpuro juga terletak di Gunung Buring dimana tanahnya memiliki kemiringan sekitar 35° hingga 40° . Sehingga banyak masyarakat sekitar Gunung Buring tersebut mempergunakan sebagian lahan mereka untuk bercocok tanam seperti ubi, ketela buah-buahan dan lain sebagainya.

(4) Demografi

Jumlah penduduk Kelurahan Lesanpuro pada Tahun 2014 sekitar 17.462 Jiwa, terdiri dari 8170 jiwa penduduk laki-laki dan 9282 penduduk perempuan. Kelurahan Lesanpuro memiliki penduduk miskin tercatat pada Tahun 2014 sekitar 435 KK (Kepala Keluarga). Wilayah Kelurahan Lesanpuro tergolong ke dalam kelurahan yang memiliki tipologi pada bidang jasa maupun perdagangan dimana penduduknya sebagian besar mata

pencahariannya di bidang jasa maupun perdagangan, seperti yang tertera pada kerangan di bawah ini :

a. Karyawan

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1). Pegawai Negeri Sipil | : 2.028 orang |
| 2). ABRI | : 316 orang |
| 3) Swasta | : 2.565 orang |

b. Wiraswasta/ Pedagang : 138 orang :

c. Tani : 28 orang

d. Pertukangan : 932 orang

e. Buruh Tani : 68 orang

f. Pemulung : 8 orang

g. jasa : 217 orang

h. Pensiunan : 3.023 orang

Ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakatnya:

a. Tingkat Pendidikan Umum

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) Taman Kanak-Kanak | : 1 orang |
| 2) Sekolah Dasar | : 4.564 orang |
| 3) SMP | : 3.069 orang |
| 4) SMA/ SMU | : 422 orang |
| 5) Akademi/ D1-D3 | : 1.201 orang |
| 6) Sarjana | : 1.161 orang |
| 7) Pascasarjana | : 854 orang |

2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang

a. Visi dan Misi

Visi

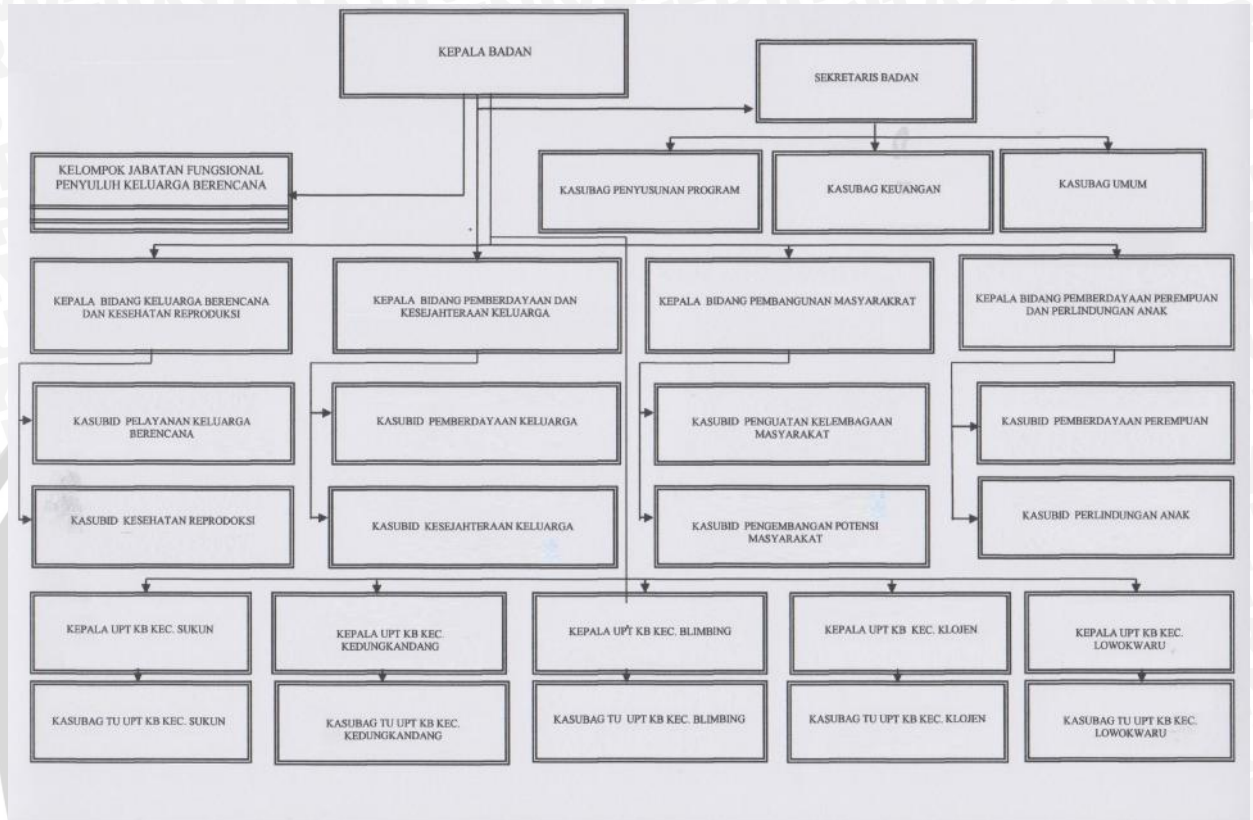
”Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan”.

Misi

- Peningkatan ketahanan masyarakat;
- Pemantapan nilai sosial budaya masyarakat;
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
- Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat.



b. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

(Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang)

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : (a). Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan

perempuan dan anak; (b). Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan anak; (c). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan; (d). Penyusunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (e). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Pembahasan lebih lanjut akan menspesifikkan terhadap tugas pokok dan fungsi Bidang Pembangunan Masyarakat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang. Hal ini karena bidang tersebut sebagai tempat penulis menemukan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

(1). Bidang Pembangunan Masyarakat

Bidang Pembangunan Masyarakat melaksanakan tugas pokok pengelolaan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi :

- (a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pembangunan Masyarakat.
- (b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembangunan masyarakat.
- (c) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat.

- (d) pelaksanaan penyusunan program pengembangan, penguatan kelembagaan, dan potensi masyarakat.
- (e) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).
- (f) pelaksanaan penyusunan Profil Kelurahan.
- (g) pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pembangunan di Kelurahan.
- (h) pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- (i) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan di Kelurahan.
- (j) pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan, pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- (k) pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan Partisipasi Keswadayaan Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan.
- (l) pelaksanaan penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- (m) pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku sumberdaya manusia Kelembagaan Masyarakat.
- (n) pelaksanaan pembinaan kerjasama antar Kelembagaan Masyarakat dalam menunjang pembangunan.
- (o) pelaksanaan fasilitasi Kesekretariatan Tetap (Sektap) Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin).

- (p) pelaksanaan fasilitasi bantuan stimulan Dana Pembangunan Masyarakat.
- (q) pengumpulan bahan dan penyusunan program usaha ekonomi masyarakat.
- (r) pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
- (s) pelaksanaan fasilitasi usaha sektor informal.
- (t) pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam di Kelurahan.
- (u) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- (v) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
- (w) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- (x) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- (y) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (z) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- (aa) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

(2). Bidang Pembangunan Masyarakat membawahi :

- (a). Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat, (b) Subbidang Pengembangan Potensi Masyarakat. Masing-masing Subbidang di pimpin

oleh Kepala Subbidang yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(3) Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Subbidang:

(a). Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyiapan dan penerapan langkah-langkah penguatan kelembagaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penguatan kelembagaan masyarakat,
- penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penguatan kelembagaan masyarakat,
- pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan/atau pelatihan LPMK,
- penyiapan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan,
- penyiapan penguatan kelembagaan masyarakat dan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- penyiapan fasilitasi peningkatan pengetahuan sumber daya manusia kelembagaan masyarakat,

- pelaksanaan pembinaan kerja sama antar kelembagaan masyarakat dalam menunjang pembangunan,
- penyiapan fasilitasi bantuan stimulan dana pembangunan masyarakat,
- penyiapan fasilitasi potensi sumber daya alam di kelurahan,
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP),
- pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI),
- pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

(b). Subbidang Pengembangan Potensi Masyarakat.

Subbidang Pengembangan Potensi Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyiapan dan penerapan upaya-upaya pengembangan potensi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbidang Pengembangan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan potensi masyarakat;
- penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan potensi masyarakat;

- pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pengembangan potensi masyarakat;
- pengumpulan, pengolahan dan analisa data profil kelurahan;
- penyiapan pelaksanaan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat kelurahan;
- penyiapan kegiatan bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- penyiapan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
- pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan usaha sektor informal;
- pelaksanaan fasilitasi kesekretariatan tetap (Sektap) Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin);
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Pada masing-masing kelurahan memiliki potensi dalam pemberdayaan masyarakatnya. Salah satu cara pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di kelurahan tersebut melalui pembekalan keterampilan dan lain sebagainya, dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Diantara 57 Kelurahan tersebut peneliti memfokuskan pada Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sesuai dengan lokus penelitian. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Purwaningsi S.Sos pada tanggal 29 April 2016 jam 09:30 WIB bahwasanya:

“...57 Kelurahan di Kota Malang tentunya masing-masing daerah kelurahan tersebut memiliki potensi. Namun potensi yang dimiliki kelurahan ini akan sia-sia apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan di Kota Malang tersebut upaya paling tepat yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Sebelumnya, masyarakat diberikan pembekalan dahulu melalui pelatihan-pelatihan agar nantinya masyarakat memiliki keterampilan dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya melalui sektor UMKM, sehingga ke depannya dapat mengurangi jumlah pengangguran serta dapat menanggulangi kemiskinan...”

Tabel 4.1 Angka Kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang

2014	2015
435 Jiwa	413 Jiwa

(Sumber: Kelurahan Lesanpuro, 2016)

Berdasarkan tabel diatas, adanya pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang membuat jumlah angka kemiskinan turun. Hal ini tidak terlepas dari adanya keterampilan

dari masing-masing individu yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam membuat produk-produk UMKM. Masyarakat mempunyai usaha baru yang bisa mendatangkan nilai ekonomis dari barang yang mereka produksi sehingga membuat masyarakat menjadi mandiri dan memiliki jiwa berwirausaha. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) di Kota Malang khususnya di Kelurahan Lesanpuro, seperti yang tercantum di tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro

Jumlah UMKM Tahun 2014	Jumlah UMKM Tahun 2015
23 UMKM	72 UMKM

(Sumber :Kelurahan Lesanpuro Kota Malang, 2016)

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) pada Kelurahan Lesanpuro banyak sekali ragamnya mulai dari usaha yang dilakukan secara manual sampai memakai alat yang sederhana. Secara garis besar UMKM yang ada di Kelurahan Lesanpuro terbagi menjadi bebarapa kelompok antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Makanan dan minuman dan kue-kue misalnya usaha krupuk rambak, krupuk samiler, cilok, minuman kesehatan dan keripik buah.
2. Kelompok mainan anak-anak yang dibuat dengan bahan kayu dan kertas bekas.

3. Kelompok pembuatan permen muai dari jenis lolipop sampai permen rasa buah.
4. Kelompok pembuat alat olah raga misalnya pembuatan *shuttlecock*.
5. Kelompok pertanian misalnya usaha pupuk dari kotoran sapi/kambing, usaha pupuk dari buangan biogas berupa pupuk cair yang disebut *Bioslury*.
6. Kelompok Kerajinan tangan dari bahan bekas, sudah banyak menghasilkan produk berupa hiasan di rumah tangga ataupun karya yang bernilai tinggi.
7. Kelompok pembuatan tas yang sudah memproduksi berbagai macam tas baik dari kulit ataupun sintesis.
8. Kelompok budidaya jamur yang menghasilkan berbagai makanan berbasis jamur misalnya kripik jamur, jamur crispy dan dijual tanamannya untuk sayur
9. Kelompok usaha yang berbasis komputer misalnya design grafis dan percetakan.

Pengelompokan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kelurahan Lesanpuro ini untuk memudahkan pendataan dan apabila terdapat bantuan dana bagi usaha kecil dari pemerintah pada Kelurahan Lesanpuro menjadi tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwaningsi S.Sos pada tanggal 29 April 2016 jam 09:45 WIB diketahui :

“... Usaha Mikro Kecil Meengah (UMKM) yang ada di Lesanpuro kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok usaha, tujuannya agar kami dapat mengidentifikasi permasalahan apa yang mereka hadapi, sehingga bantuan yang kami berikan baik itu berupa

pemberian modal maupun dana untuk pelatihan menjadi tepat sasaran...”

Berdasarkan wawancara diatas bantuan dari pemerintah bagi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dapat berupa dana bantuan modal maupun pelatihan pada suatu bidang usaha kecil tersebut. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan sektor informal seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ditempuh dengan berbagai upaya. Tentu dalam setiap upaya tersebut terdapat peran dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang, baik itu sebagai fasilitator ataupun regulator. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengentasan kemiskinan banyak dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, sistem sosial budaya, dan tokoh masyarakat. Upaya BKBPM dalam pengentasan kemiskinan beserta faktor penghambat dan pendukungnya diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

- 1. Upaya pemerintah (BKBPM) dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).**

Pemerintah Kota Malang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) melakukan upaya dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan UMKM. Upaya tersebut mengacu pada UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pasal 5 yaitu mengenai tujuan pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yaitu: mewujudkan struktur perekonomian

nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Sesuai dengan amanat UU tersebut, maka upaya BKBPM dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan

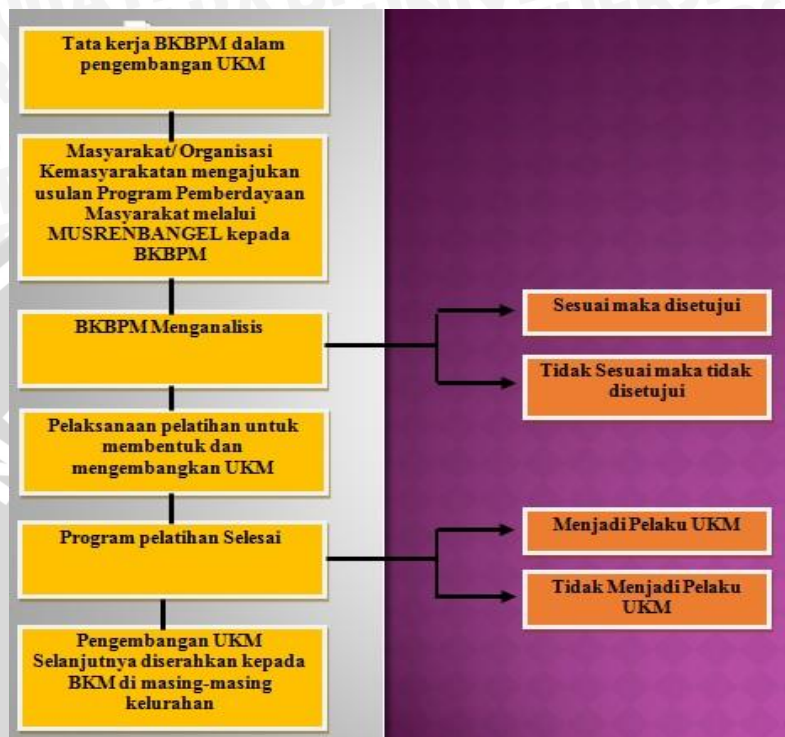
Upaya pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat di Kelurahan Lesanpuro agar siap menjadi pelaku di sektor UMKM. Tahapan pelaksanaan pelatihan diawali dengan penyusunan proposal (usulan pelatihan) hasil dari MUSRENBANGKEL (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) kepada BKBPM. Setelah usulan-usulan disetujui oleh BKBPM, maka lembaga tersebut mengadakan pelatihan keterampilan bagi pelaku UKM yang berfungsi meningkatkan keahlian para calon usahawan. Pelatihan yang diberikan oleh BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) tersebut bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh masing - masing individu masyarakat, agar kedepannya masyarakat memiliki keterampilan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Selain untuk menambah penghasilan

bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dapat menjadi potensi lapangan pekerjaan yang baru. Namun pada pelaksanaan kegiatan pelatihan di Lesanpuro BKBPM hanya bersifat mengawasi, Pelaksana yang berada di lapangan saat pelatihan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Berdasarkan wawancara dengan Arum Pawestri, ST, MT, M.Sc selaku Kasubid Pengembangan Potensi Masyarakat BKBPM Kota Malang pada tanggal 29 April 2016 jam 09:15 WIB diketahui:

“... Setelah usulan – usulan mengenai pelatihan keterampilan yang ditampung melalui MUSRENBANGKEL (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) mendapat peretujuan dari kami, maka kami menentukan waktu pelaksanaan pemberian keterampilan pada masyarakat yang menginginkan untuk kami latih. Kemudian kami juga mendatangkan *Trainer* (Pelatih) yang berkompeten pada bidang keterampilan yang diinginkan. Selain itu kami juga mengelompokkan para peserta pada masing – masing bidang pelatihan yang kami selenggarakan, agar sesuai dengan minat masing – masing peserta pelatihan, kemudian pelaksanaan pelatihan. Sehingga, harapan kami para peserta pelatihan yang berasal dari masyarakat pada masing – masing Kelurahan tersebut kedepannya dapat memiliki suatu keterampilan dan menjadi suatu Usaha Kecil Mikro yang merupakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Kelurahan tersebut. Dengan begitu masyarakat bisa lebih berdaya dan dapat mengurangi angka Kemiskinan, Namun pada pelaksanaan pelatihan pada Kelurahan Lesanpuro kami tidak turun langsung sebagai pelaksana, namun keiatan tersebut ditangani oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Kelurahan Lesanpuro...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pelatihan keterampilan, melalui tahapan yang diawali dengan musyawarah masyarakat Kelurahan Lesanpuro. Hal ini mencerminkan bahwa peatihan keterampilan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tahapan pelaksanaan pelatihan ditetapkan dapat

dilihat dalam alur perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2 Alur Tata Kerja BKBPM dalam pengembangan UMKM
(Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2016)

Pada gambar diatas terlihat alur pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang, dimulai dari proses pengajuan usulan program atau proposal, pelaksanaan hingga pasca kegiatan pelatihan tersebut. Pelatihan yang diberikan bermacam-macam diantaranya seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Kegiatan Pelatihan di Kelurahan Lesanpuro

No	Nama kegiatan Ketrampilan	Biaya dari Pemerintah	Jumlah peserta Pelatihan	Keterangan
1.	Kerajinan tangan dari bahan bekas/ handycraft	Rp 8.000.000	23 peserta	- Bersifat non fisik - Swadaya masyarakat Rp 500.000
2.	Pembuatan tas	RP 8.000.000	23 peserta	- Bersifat non fisik - Swadaya masyarakat Rp500.000
3.	Pelatihan Komputer	Rp 8.000.000	25 peserta	- Bersifat non fisik - Swadaya masyarakat Rp 500.000
4.	Pelatihan budidaya jamur	Rp 4.000.000	23 peserta	- Bersifat non fisik - Swadaya masyarakat Rp500.000
Jumlah		Rp. 28.000.000	94 peserta	Rp. 2.000.000

(Sumber: Diolah Penulis, 2016)

Berdasarkan tabel diatas, pelatihan yang diadakan di Lesanpuro terdiri dari 4 Pelatihan yaitu kerajinan tangan (*Handycraft*), pembuatan tas, pelatihan komputer (desain grafis), dan budidaya jamur. Pelatihan tersebut bersifat nonfisik dengan total peserta 94 orang serta biaya dari pemerintah dan sedikit dana dari swadaya masyarakat. Dari pelatihan tersebut

diharapkan peserta atau masyarakat Kelurahan Lesanpuro dapat menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masing-masing bidang pelatihan yang mereka ikuti.

Proses pelaksanaan pelatihan para calon pelaku usaha tersebut, dijabarkan sebagai berikut :

❖ **Pelatihan pembuatan tas**

Perencanaan pelatihan pembuatan tas di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dimulai dari pengajuan proposal yaitu untuk memohon bantuan dana dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) melalui dana hibah yang berasal dari pemerintah. Setelah proposal tersebut disetujui oleh BKBPM kemudian ketua panitia pelatihan tas membentuk tim panitia dalam pelatihan pembuatan tas yang terdiri dari 4 orang yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan 2 anggota panitia. Setelah panitia pelatihan tas terbentuk, panitia pelatihan membuat daftar nama calon penerima pelatihan pembuatan tas yang terdiri dari 23 orang. Kemudian panitia mengundang calon penerima pelatihan pembuatan tas tersebut dalam suatu pertemuan pada 19 Mei 2014 dengan pihak dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan pihak pemberi pelatihan. Selanjutnya panitia mempersiapkan bahan dan peralatan penunjang pelatihan. Pelatihan pembuatan tas ini dilaksanakan pada bertempat di Aula Kelurahan Lesanpuro pada 22 Mei 2014 dan dihadiri 23 peserta.

Pada pelatihan pembuatan tas ini pihak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) bekerjasama dengan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan panitia internal masyarakat melibatkan beberapa pengrajin tas sebagai pihak yang membimbing peserta dalam pembuatan tas. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan Purwaningsi S.Sos selaku pihak dari BKBPM pada tanggal 29 April 2016 jam 09:00 WIB menerangkan bahwa:

“...Pada pelatihan pembuatan tas ini, kami bekerjasama dengan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) serta melibatkan dan menunjuk pihak yang ahli dalam pembuatan tas sebagai mentor peserta dalam pembuatan tas, dengan harapan nantinya para peserta akan dapat mengembangkan UMKM pada sektor pembuatan tas...”



Gambar 4.3 Pelatihan Pembuatan Tas
(Sumber: Data BKM Kelurahan Lesanpuro, 2016)

Berdasarkan gambar diatas, pada pelaksanaan kegiatan pelatihan tas dapat dilihat instruktur yang sedang memberikan contoh proses

pembuatan tas yang terdiri dari pengukuran bahan hingga proses menjahit, kemudian dipraktikkan oleh peserta hingga menjadi satu produk tas.

❖ **Pelatihan budidaya jamur**

Pelatihan budidaya jamur di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berawal dari pengajuan proposal bantuan dana dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) melalui dana hibah yang berasal dari pemerintah. Setelah proposal tersebut disetujui oleh BKBPM kemudian ketua panitia membentuk tim panitia dalam pelatihan budidaya jamur yang terdiri dari 4 orang yang terdiri dari sekretaris, bendahara, logistik dan pelaksana lapangan. Setelah panitia pelatihan terbentuk, panitia pelatihan membuat daftar nama calon penerima pelatihan budidaya jamur yang terdiri dari 23 orang. Kemudian panitia mengundang calon penerima pelatihan budidaya jamur tersebut dalam suatu pertemuan pada 19 Mei 2014 dengan pihak dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan pihak yang ahli pada budidaya jamur ini. Selanjutnya panitia mempersiapkan bahan dan peralatan penunjang pelatihan budidaya jamur. Pelatihan budidaya ini dilaksanakan pada bertempat di Aula Kelurahan Lesanpuro pada 22 Mei 2014 dan dihadiri 23 peserta.

Pada pelatihan budidaya jamur ini melibatkan beberapa petani jamur atau orang yang membudidayakan jamur, yaitu pada jenis jamur tiram karena budidaya jamur memerlukan perlakuan khusus, berbeda dengan budidaya bunga atau tanaman pada umumnya. Hal ini sesuai dengan

pendapat Ir. Darmawan Setiabudi selaku pihak dari BKM pada tanggal 31 April 2016 jam 08:45 WIB menerangkan bahwa:

“...Pada pelatihan budidaya jamur ini, kami melibatkan beberapa pihak yang ahli dalam budidaya jamur yaitu petani jamur. Dikarenakan budidaya jamur berbeda dengan budidaya tanaman pada umumnya dan memerlukan perlakuan khusus yaitu seperti media tanam yang biasanya menggunakan serbuk hasil dari pengampelasan kayu dan suhu udara ruang yang lembab serta...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pada pelatihan budidaya jamur tersebut melibatkan petani jamur sebagai instruktur dalam pelatihan jamur yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro. Serta tanaman jamur yang memerlukan perlakuan khusus seperti pada media tanamnya dan ruang yang khusus.



Gambar 4.4 Pelatihan Budidaya Jamur
(Sumber: Data BKM Kelurahan Lesanpuro, 2016)

Berdasarkan gambar diatas, pada pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya dapat dilihat beberapa contoh media untuk membudidayakan jamur dan terlihat beberapa contoh jamur jenis tiram yang sudah mulai tumbuh. Kemudian peserta diberikan arahan mengenai cara membudidayakan jamur tersebut. Setelah pengarahan mengenai budidaya jamur selesai, masing-masing peserta mendapat media untuk membudidayakan jamur. Hal ini sesuai dengan pendapat Ir. Darmawan Setiabudi selaku koordinator BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) pada tanggal 30 April 2016 menerangkan bahwa :

“Para peserta pelatihan budidaya jamur mendapatkan pengarahan tentang budidaya jamur yaitu mengenai media tanamnya, mengenai perkiraan rentang waktu tanam dengan masa panen jamur dan mengenai manfaat dan peluang bisnis dari jamur tiram ini. Untuk itu setelah pelatihan selesai masing – masing dari peserta dibagikan media tanam jamur, agar berkembang dan menjadi peluang bisnis atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bidang jamur tiram ini di Kelurahan Lesanpuro...”

❖ **Pelatihan Kerajinan tangan (*handycraft*)**

Perencanaan pelatihan kerajinan tangan (*Handycraft*) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang diawali dari pengajuan proposal permohonan bantuan dana dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) BKBPM melalui dana hibah yang berasal dari pemerintah. Setelah proposal tersebut disetujui oleh BKBPM kemudian ketua panitia pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) membentuk tim panitia KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam pelatihan tersebut. Panitia terdiri dari 5 orang yaitu Ketua, sekretaris, Bendahara, dan 2 pelaksana

lapangan (anggota). Setelah panitia pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) terbentuk, panitia membuat daftar nama calon penerima pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) yang terdiri dari 23 orang. Kemudian panitia mengundang calon penerima pelatihan tersebut dalam suatu pertemuan pada 19 Mei 2014 dengan pihak dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) yang diwakili oleh fasilitator kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan pihak pemberi pelatihan yaitu pengrajin yang berada di sekitar Kelurahan Lesanpuro. Setelah pertemuan pihak - pihak yang bersangkutan, panitia mempersiapkan bahan dan perlatan penunjang pelatihan. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan pada bertempat di Aula Kelurahan Lesanpuro pada 22 Mei 2014 dan dihadiri 23 peserta, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.5 Pelatihan Kerajinan Tangan (*Handycraft*)
(Sumber: Data BKM Kelurahan Lesanpuro, 2016)

Pada gambar diatas, dapat dilihat kegiatan pelatihan kerajinan tangan (*Handycraft*) dimana pihak BKBPM bekerjasama dengan BKM (Badan

Keswadayaan Masyarakat) dan panitia internal masyarakat melibatkan beberapa pihak pembuat kerajinan tangan (*Handycraft*) yang merupakan warga Kelurahan Lesanpuro. Beberapa pengrajin tersebut nantinya membimbing peserta dalam pembuatan kerajinan tangan (*handycraft*) yang bahannya berasal terdiri dari bahan bekas dan plastik (*acrylic*), Pelatihan ini bertujuan agar nantinya peserta dapat memanfaatkan bahan bekas menjadi suatu kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mengurangi limbah rumah tangga seperti plastik bungkus kopi, kalender dan lain sebagainya yang dapat mencemari lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan Dra. Nurbeti, selaku ketua panitia pelatihan kerajinan tangan (*Handycraft*) yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 1 Mei 2016 jam 09:00 WIB menerangkan bahwa :

“...Pelatihan kerajinan tangan (*Handycraft*) ini bertujuan untuk mengubah bahan bekas menjadi barang yang bernilai ekonomis (bersifat daur ulang), seperti: kalender bekas; plastik bekas bungkus kopi, plastik bekas bungkus mie dan lain sebagainya. Selain itu dengan memanfaatkan barang bekas terutama yang berbahan plastik akan dapat mengurangi pencemaran lingkungan paling tidak di sekitar Kelurahan Lesanpuro. Namun bahan yang kami gunakan tidak hanya berbahan dari barang bekas, tetapi juga kami padukan dengan bahan plastik (*acrylic*) untuk lebih mempercantik produk kerajinan tersebut. Dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing ini maka paling tidak akan mengurangi masalah pengangguran dengan mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada sektor kerajinan tangan daur ulang ini. Sehingga masalah kemiskinan dapat berkurang atau ditanggulangi...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dengan keterampilan yang dimiliki oleh peserta dalam pemanfaatan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan dasar daur ulang maka akan bermanfaat bagi lingkungan dan

mengurangi masalah pengangguran di wilayah Kelurahan Lesanpuro sehingga permasalahan kemiskinan yang ada di Lesanpuro dapat teratasi.

❖ **Pelatihan komputer (Desain Grafis)**

Perencanaan pelatihan komputer (Desain Grafis) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang diawali dari pengajuan proposal mengenai bantuan dana dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) BKBPM melalui dana hibah yang berasal dari pemerintah. Setelah proposal tersebut disetujui oleh BKBPM kemudian ketua panitia pelatihan komputer membentuk tim panitia KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam pelatihan tersebut. Panitia terdiri dari 5 orang yaitu Ketua, sekretaris, bendahara, logistik dan pelaksana lapangan (anggota). Setelah panitia pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) terbentuk, panitia membuat daftar nama calon penerima pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) yang terdiri dari 25 orang. Kemudian panitia mengundang calon penerima pelatihan tersebut dalam suatu pertemuan pada 19 Mei 2014 dengan pihak dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) yang diwakili oleh fasilitator kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan pihak pemberi pelatihan yaitu ahli pada bidang desain grafis yang berasal dari Kelurahan Lesanpuro. Kemudian, panitia mempersiapkan bahan dan peralatan penunjang pelatihan seperti jaringan internet dengan penyediaan modem wireless sejumlah 25, flashdisk dan peralatan multimedia lainnya. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan pada bertempat di Aula Kelurahan

Lesanpuro pada 22 Mei 2014 dan dihadiri 25 peserta dan beberapa peserta membawa laptop masing - masing, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.6 Pelatihan Komputer (Desain Grafis)
(Sumber: Data BKM Kelurahan Lesanpuro, 2016)

Pada gambar diatas, dapat dilihat kegiatan pelatihan komputer (Desain grafis) dimana pihak BKBPM bekerjasama dengan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan panitia internal masyarakat melibatkan beberapa pihak instruktur pelatihan komputer yang berbasis desain grafis yang merupakan warga Kelurahan Lesanpuro. Beberapa desainer grafis

tersebut nantinya membimbing peserta dalam membuat desain grafis seperti pembuatan iklan, poster maupun banner. Dengan pelatihan desain grafis ini peserta diharapkan mampu untuk membuat kreasinya melalui desain grafis sehingga memiliki peluang untuk mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di bidang percetakan elektronik atau *digital printing*. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan Bapak Subandrio, selaku ketua panitia pelatihan komputer (desain grafis) yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 3 Mei 2016 jam 10:00 WIB menerangkan bahwa :

“...Pelatihan komputer (desain grafis) yang diselenggarakan di Kelurahan Lesanpuro bertujuan agar peserta yang kami latih, yang merupakan warga Kelurahan Lesanpuro sendiri memiliki keterampilan di bidang desain grafis yang bisa dikembangkan menjadi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di bidang percetakan digital atau *digital printing*. Karena sebagaimana kita tahu pada zaman sekarang banyak bisnis-bisnis atau usaha-usaha baru bermunculan, secara otomatis untuk memperkenalkan suatu produk dari bisnis itu memerlukan suatu media yaitu iklan. Iklan dapat berupa banner, poster, stiker, baliho dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi dasar yaitu adanya peluang untuk mengembangkan usaha pada bidang percetakan digital yang juga menggunakan desain grafis. Untuk itu dalam pelatihan kami memberikan pembekalan mengenai dasar-dasar maupun teknik-teknik mengenai desain grafis. Selain itu kami juga memberikan salinan (*copy*) mengenai panduan desain grafis kepada masing – masing peserta...”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas pelatihan komputer yang diselenggarakan di Kelurahan Lesanpuro akan menjadi peluang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada masyarakat di Kelurahan Lesanpuro pada bidang desain grafis seperti percetakan *digital*.

b. Penyaluran dana hibah untuk pelatihan

Diketahui bahwa dana hibah merupakan dana yang Bersumber dari APBN 95 % dan dari APBD 5% diterima secara bertahap yaitu tahap I 60% (dari APBN), tahap II 35 % (dari APBN) dan tahap III 5% (dari APBD). Mekanisme pencairan dana melalui DDUB-APBD diserahkan kepada masing – masing kabupaten/ kota yang mengacu pada UU No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Permendagri No 39 tahun 2011. Dana yang disalurkan sesuai dengan rencana kegiatan yang diusulkan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) selaku penanggung jawab program di tingkat kelurahan dan telah disetujui oleh tenaga fasilitator tingkat kelurahan, yang peruntukannya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan berupa pelatihan-pelatihan. Pada Kota Malang penyaluran dana hibah tersebut melalui BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Malang. Berdasarkan wawancara dengan Purwaningsi S.Sos selaku petugas BKBPM yang berada di kelurahan Lesanpuro pada tanggal 29 April 2016 jam 10:30 WIB diketahui:

“... Jika mendapat bantuan dana hibah yang peruntukannya untuk pemberdayaan masyarakat baik itu berasal dari APBN maupun APBD untuk kota Malang sendiri penyalurannya melalui BKBPM. Nantinya dana tersebut akan kami alokasikan untuk pelatihan maupun modal untuk pengembangan usaha kecil mikro yang ada di kelurahan – kelurahan di kota Malang seerti pelatihan yang diadakan di kelurahan Lesanpuro tersebut, dana hibah dari pemerintah penyalurannya melalui kami. harapan kami kedepannya masyarakat dapat memilki pekerjaan melalui Usaha Kecil Mikro tersebut...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa apabila mendapatkan dana hibah baik itu melalui APBN maupun APBD yang penyalurannya melalui BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) maka dialokasikan salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat seperti pemberian pelatihan keterampilan bagi masyarakat maupun modal bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

c. Fasilitator pelaksanaan pelatihan

Upaya lain dari BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberayaan Masyarakat) adalah sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi dan merealisasikan usulan-usulan program peningkatan pemberdayaan yang berasal dari MUSRENBANGKEL (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) dengan melibatkan organisasi pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan misalnya BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Klurahan Lesanpuro. Berdasarkan wawancara dengan Purwaningsi S.Sos pada tanggal 29 April 2016 jam 09:00 WIB diketahui:

“...Sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di kota Malang yang memiliki tugas pokok diantaranya “Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan Penyusunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna”. Untuk itu dalam upaya implementasi tugas pokok tersebut pada Kelurahan Lesanpuro, kami memberikan fasilitasi dalam program - program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu melalui realisasi usulan-usulan yang masuk melalui musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) melalui kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan masyarakat yang berada di masing-masing kelurahan tersebut, serta melibatkan organisasi yang

berperan juga dalam pemberdayaan di tingkat kelurahan seperti BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) beserta masyarakat ...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam implementasi salah satu tugas pokoknya diantaranya “Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan Penyusunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna”, pada Kelurahan Lesanpuro BKBPM berupaya merealisasikan usulan-usulan dari masyarakat melalui program – program pelatihan. Selain itu dalam implementasi pelatihan tersebut juga melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di Kelurahan Lesanpuro beserta masyarakat yang bersangkutan.

d. Penggerakan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan.

Sedangkan peran dari masyarakat pada pelatihan yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro tersebut akan dijelaskan adalah sebagai objek penerima pelatihan dan panitia internal masyarakat. Berikut penjelasan dari peran masyarakat tersebut pada pelatihan keterampilan masyarakat yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro :

❖ Masyarakat sebagai objek penerima pelatihan

Dalam Pelatihan yang diadakan di Lesanpuro ini masyarakat merupakan sasaran pada pemberdayaan melalui pelatihan tersebut. Dengan harapan hasil dari pelatihan ini, masyarakat/ peserta pelatihan tersebut akan mempunyai ketrampilan tambahan dan dapat menjadi pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Kelurahan Lesanpuro sehingga dapat

menanggulangi masalah kemiskinan pada kelurahan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Erni Agustin sebagai salah satu peserta pelatihan kerajinan tangan (*Handycraft*) pada tanggal 29 April 2016 jam 10:30 WIB

“...Pelatihan yang kami ikuti dahulu membawa dampak yang cukup signifikan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang kerajinan tangan yang kami kembangkan. Dengan mengikuti pelatihan tersebut kami dapat mengembangkan model atau bentuk dari kerajinan tangan mengikuti permintaan pasar. Sehingga dahulunya model kerajinan tangan kami yang terkesan *monoton* kini menjadi lebih bervariasi. Selain itu kami juga dapat menyerap 3 tenaga kerja yang juga berasal dari peserta pelatihan tersebut, sehingga kami juga turut serta dalam mengurangi pengangguran...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas merupakan contoh dari salah satu masyarakat Kelurahan Lesanpuro sebagai objek penerima pelatihan yang kini mendapatkan dampak positif dalam pelaksanaan pelatihan tersebut yaitu Usaha Kecil Mikro Menengah pada bidang kerajinan tangan dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja sehingga membantu mengurangi pengangguran di Kelurahan Lesanpuro.

❖ Masyarakat sebagai panitia internal

Pada umumnya beberapa kegiatan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang ada di Kota Malang, pelaksanaannya ditangani langsung oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Namun pada acara pelatihan keterampilan yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro tersebut BKBPM memiliki peran yang sangat minim sebagai pelaksana kegiatan pelatihan, sehingga urusan kepanitiaan melibatkan masyarakat sendiri dengan dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ir. Darmawan Setiabudi selaku ketua BKM Kelurahan Lesanpuro:

“...Pelatihan yang diadakan di Lesanpuro pada kepanitiaannya melibatkan masyarakat dengan dibantu BKM (Badan keswadayaan Masyarakat). Agar calon peserta penerima pelatihan lebih tepat sasaran, dikarenakan kami lebih mengetahui karakteristik dan demografi pada masyarakat di Kelurahan Lesanpuro akan tetapi nantinya tetap ada laporan pertanggungjawaban kepada BKBPM...”

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelatihan keterampilan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Lesanpuro melibatkan BKBPM dan masyarakat Kelurahan Lesanpuro. Peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang dalam pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang berada di kelurahan tersebut adalah sebagai penyalur dana hibah, fasilitator dan pelaksana pelatihan. Meskipun pada peran pelaksana pelatihan di Kelurahan Lesanpuro BKBPM hanya sebatas mengawasi atau perannya minim. Sedangkan masyarakat Kelurahan Lesanpuro dalam pelatihan yang diadakan tersebut memiliki peran sebagai penerima pelatihan atau sebagai peserta pelatihan dan sebagai panitia internal pelatihan. Tujuan diadakan pelatihan tersebut agar masyarakat menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro.

2. Hasil (*Output*) pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setelah dilakukan pelatihan keterampilan

a. Perkembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

❖ Hasil (*Output*) Pelaksanaan pelatihan pembuatan tas

Selama satu tahun setelah pelaksanaan pelatihan yaitu pada tahun 2014, pada periode tahun 2015 hingga tahun 2016 dapat dilihat hasil (*Output*) perkembangan peserta pelatihan keterampilan yang diadakan oleh BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Lesanpuro, yaitu terdapat peserta pelatihan yang dapat mendirikan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sesuai pada bidang pelatihan yang mereka ikuti, pada lain sisi juga terdapat peserta pelatihan yang hanya menjadi karyawan dikarenakan tidak memiliki modal yang cukup sehingga peserta tersebut menjadi karyawan peserta yang dapat mendirikan UMKM yang sesuai bidang pelatihan mereka. Begitu juga dengan kegiatan pelatihan tas di Kelurahan Lesanpuro terdapat peserta yang melanjutkan Usaha Miro kecil Menengah dan ada yang tidak melanjutkan atau hanya sebagai karyawan atau buruh saja. Hal ini seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Daftar Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Tas yang Mengembangkan UMKM dan Tidak Mengembangkan

No	Nama Kegiatan Keterampilan	Jumlah Peserta Pelatihan UMKM	Jumlah Peserta Yang Berwirausaha Dalam Bentuk UMKM	Jumlah Peserta Yang Tidak Berwirausaha (Ikut Orang Lain Sbg Karyawan)
1.	Pembuatan tas	23	12 (52,2%)	11 (47,8%)

(Sumber: Data Primer yang Diolah Penulis 2016)

Berdasarkan tabel diatas, pada bidang keterampilan pembuatan tas hanya 12 orang dari 23 orang peserta yang berwirausaha (Pelaku UMKM) sisanya tidak berwirausaha dan menjadi pekerja (buruh) dalam pembuatan tas ini, berdasarkan hal tersebut, peserta hanya 52 % yang berwirausaha di bidang kerajinan tas. Menurut Purwanto selaku pengusaha, koordinator sekaligus instruktur pelatihan bidang kerajinan tas Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 30 April 2016 jam 08:00 WIB hal ini disebabkan oleh :

- “... 1. Bahan baku pembuatan produk mahal, karena pelaku usaha dibidang pembuatan tas harus menyediakan bahan baku dari kulit baik asli ataupun sintesis
2. Alat utama yang harus disediakan berupa mesin jahit harus tersedia dan mahal.
3. Pemasaran produk sangat sulit, karena belum ada yang bertndak selaku pengepul dan banyak masyarakat yang memakai tas dari kain parasit dengan harga yang lebih murah.
4. Untuk bersaing dengan tas yang mahal umumnya kalah di permodalan dan desainnya.
5. Munculnya pendapat dari peserta pelatihan yang mengatakan, bahwa bekerja sebagai buruh pabrik pembuatan tas lebih aman daripada usaha mandiri...”

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi minat peserta dalam berwirausaha di bidang kerajinan

tas dipengaruhi oleh bahan, alat, permodalan, pemasaran, desain serta dalam persaingan.

Selain itu, tujuan dari pelatihan pembuatan tas di Kelurahan Lesanpuro tersebut kedepanya agar peserta penerima pelatihan yang sebagian besar terdiri dari kategori miskin dapat berdaya dan dapat mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), dilain sisi juga terdapat manfaat atau hasil yang positif bagi peserta pelatihan yang berwirausaha yaitu mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bidang pembuatan tas. Para pelaku UMKM di bidang pembuatan tas ini mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini nampak pada peningkatan penghasilan pada beberapa peserta pelatihan pembuatan tas sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Pembuatan Tas

No	Jenis usaha	Nama pelaku usaha	Status kepemilikan & jabatan	Penghasilan bersih rata-rata sebelum mengikuti pelatihan	Penghasilan bersih rata-rata setelah mengikuti pelatihan	Prosentase kenaikan
1.	Kerajinan pembuatan tas	Purwanto (RW 04)	Pemilik bekerja sendiri	1,0-1,1 jt/bln	1,5-1,6 jt/bln	45,4 %
2.	Kerajinan tas kulit	Imam Hanafi (RW 05)	Pemilik bekerja sendiri	2,5-3,0jt/bln	3,5-4,0 jt/bln	33.3 %
3.	Kerajinan pembuatan tas	Taufiq Zailani (RW 05)	Pemilik bekerja sendiri	3.0-3.5 jt/bln	4 .5-5.0 jt/bln	27.2 %
4.	Kerajinan pembuatan tas	Sri Rahayu (RW 06)	Pemilik bekerja sendiri	600 ribu-800 ribu/bulan	1,2-1,5jt/bln	46.6 %

No	Jenis usaha	Nama pelaku usaha	Status kepemilikan & jabatan	Penghasilan bersih rata-rata sebelum mengikuti pelatihan	Penghasilan bersih rata-rata setelah mengikuti pelatihan	Prosentase kenaikan
5.	Kerajinan pembuatan tas	Sucik waraswati (RW 04)	Pemilik dengan 3 orang pekerja	2.0-2,5juta/bln	3,0-3.5 jt/bln	50 %
6.	Kerajinan pembuatan tas	Kunarti (RW 06)	Pemilik bekerja sendiri	700-800 ribu/bln	1jt-1,2 jt/bln	42,8 %
7.	Kerajinan Pembuatan tas	Nurjannah RW 02	Pemilik bekerja sendiri	700-800 rb/bln	1,1-1.5 jt/bln	42.8 %

(Sumber: Data Primer yang Diolah Penulis, 2016)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan rata-rata penghasilan pada beberapa peserta sesudah pelatihan pembuatan tas, dikarenakan minat peserta dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah di bidang pembuatan tas ini sangat tinggi, selain bahan baku yang mudah dan cukup murah cara pembuatan tas juga cukup mudah. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Purwanto pada tanggal 30 April 2016 jam 09:00 WIB:

“...Penghasilan yang kami dapatkan sebelum pelatihan tidak seberapa yaitu dengan berjualan sembako atau membuka toko kelontong, setelah mengikuti pelatihan pembuatan tas kami mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup lumayan dengan merintis usaha kecil di bidang pembuatan tas. Seperti tas slempang, tas pinggang dan jenis tas lainnya...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pelatihan pembuatan tas yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro membawa dampak yang positif bagi peningkatan pendapatan bagi beberapa peserta pelatihan, salah satu diantaranya adalah Bapak Purwanto yang mendapatkan penghasilan tambahan dari merintis usaha kecil Mikro Menengah pada bidang

pembuatan tas. Peningkatan rata-rata penghasilan ini juga didapati pada peserta pelatihan pembuatan tas lainnya, seperti tertera pada tabel 4.5 diatas.

❖ Hasil (*Output*) pelatihan budidaya jamur

Pada periode tahun 2015 – tahun 2016 hasil dari pelatihan bidang budidaya jamur menunjukkan bahwa jumlah peserta yang berwirausaha dalam bentuk UMKM berjumlah 10 dari 23 peserta pelatihan. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Daftar Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Jamur yang Mengembangkan UMKM dan Tidak Mengembangkan

No	Nama Kegiatan Ketrampilan	Jumlah Peserta Pelatihan UMKM	Jumlah Peserta Yang Berwirausaha Dalam Bentuk UMKM	Jumlah Peserta Yang Tidak Berwirausaha (Ikut Orang Lain Sbg Karyawan)
1.	Budidaya jamur	23	10 (43 %)	13 (56 %)

(Sumber: Data Primer yang Diolah Penulis)

Tabel diatas, menunjukkan bahwa minat peserta untuk berwirausaha pada bidang budidaya jamur ini tidak begitu besar, yaitu mencapai 56 %. Menurut Ibu Maria Maqda selaku pengusaha, koordinator pelatihan bidang budidaya di Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 1 Mei 2016 jam 11:45 WIB diketahui bahwa minat peserta pelatihan untuk berwirausaha pada bidang kurang begitu besar, disebabkan antara lain :

“...Kurangnya minat dari peserta pelatihan budidaya jamur untuk mengembangkannya menjadi Usaha Mikro Kecil Menengah dikarenakan media tanam budidaya jamur yang terkadang sulit ditemui selain itu banyak dari peserta yang masih kurang paham dalam budidaya jamur ini. Kemudian yang paling banyak dikeluhkan oleh warga ini pada budidaya jamur ini membutuhkan modal yang begitu besar sehingga beberapa peserta yang paham mengenai budidaya jamur ini namun tidak memiliki modal pada akhirnya menjadi buruh petani pada

pengusaha jamur tiram baik itu di daerah Kelurahan Lesanpuro maupun pada daerah lainnya ...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kurangnya minat dari peserta untuk melanjutkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada bidang budidaya jamur ini disebabkan faktor pengetahuan dan modal. Namun bagi peserta yang mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang budidaya jamur juga mendapatkan manfaat atau dampak yang cukup signifikan yakni bagi beberapa peserta penerima pelatihan yang sebagian besar terdiri dari kategori miskin saat ini lebih berdaya dan dapat memanfaatkan peluang usaha yaitu dengan mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) pada bidang budidaya jamur tiram. Begitu juga dengan peserta yang sebelumnya sudah menjalankan budidaya jamur kini lebih berkembang daripada sebelumnya Hal ini nampak pada peningkatan penghasilan pada beberapa peserta pelatihan pembuatan budidaya jamur sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Budidaya Jamur

NO	Jenis usaha	Nama pelaku usaha	Status kepemilikan & jabatan	Penghasilan bersih rata rata sebelum mengikuti pelatihan	Penghasilan bersih rata rata setelah mengikuti pelatihan	Prosentase kenaikan
1.	Budidaya jamur	Maria maqda (RW 10)	Pemilik dg 2 orang pekerja	6-6,5 jt/bln	8,5- 9 jt/bln	30,76 %
2.	Budidaya jamur	Haris Amrullah (RW 10)	Pemilik bekerja sendiri	500-600 ribu/bln	900 ribu- 1 jt/bln	40 %

(Sumber: Data Primer yang Diolah Penulis 2016)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan rata-rata penghasilan pada beberapa peserta sesudah pelatihan budidaya jamur yang diadakan di kelurahan Lesanpuro. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ibu Maria Maqda sebagai salah satu peserta pelatihan jamur di Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 1 Mei 2016 jam 12.00 WIB:

“...Sebelumnya kami sudah sempat mengembangkan budidaya jamur ini serta menjalankan usaha kecil yang menjual jamur tiram siap olah. Namun seiring berjalannya waktu ukuran jamur tiram yang kami kembangkan semakin tidak menentu akhirnya usaha kecil kami sempat tutup. Namun setelah beberapa lama tutup kami sempat mengikuti pelatihan budidaya jamur yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro, pada pelatihan tersebut kami juga diajarkan tentang tata cara membudidayakan jamur dengan benar dan tepat. Setelah pelatihan tersebut kami mempraktikkan tentang budidaya jamur yang telah kami dapatkan. Pada akhirnya selang beberapa bulan jamur tiram yang kami kembangkan kuitasnya melebihi harapan. Hingga saat ini kami berhasil mengembangkan usaha ini hingga mengangkat beberapa pegawai yang juga peserta pelatihan budidaya jamur tersebut dan penghasilan dari budidaya jamur ini hasilnya menguntungkan...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa ibu Maria Maqda dapat dikatakan berhasil dalam pengembangan budidaya jamur hingga menjadi Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang juga mengangkat beberapa karyawan yang juga peserta pelatihan budidaya jamur di Kelurahan Lesanpuro dan berikut gambar dari budidaya jamur tiram yang ditekuni oleh ibu Maria :



Gambar 4.7 Contoh Budidaya Jamur yang ditekuni Ibu Maria
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016)

❖ **Hasil (Output) pelatihan kerajinan tangan (handycraft)**

Pada periode tahun 2015-2016 satu tahun setelah kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan, dapat dilihat hasil atau *output* dari kegiatan pelatihan tersebut yaitu terdapat peserta yang melanjutkan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bidang kerajinan tangan namun terdapat pula peserta yang menjadi karyawan pada pengusaha UMKM pada bidang kerajinan tangan ini. Hal ini seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8 Daftar Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan tangan yang Mengembangkan UMKM dan Tidak Mengembangkan

No	Nama Kegiatan Ketrampilan	Jumlah Peserta Pelatihan UMKM	Jumlah Peserta Yang Berwirausaha Dalam Bentuk UMKM	Jumlah Peserta Yang Tidak Berwirausaha (Ikut Orang Lain Sbg Karyawan)
1.	Kerajinan tangan	23	20 (86,9%)	3 (13,1%)

(Sumber: Data Primer yang Diolah Penulis)

Pada Tabel diatas, yaitu hasil dari pelatihan bidang keterampilan kerajinan tangan menunjukkan bahwa jumlah peserta yang berwirausaha dalam bentuk UMKM berjumlah 20 dari 23 peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa minat peserta untuk berwirausaha pada bidang kerajinan tangan (*Handycraft*) ini sangat tinggi, yaitu mencapai 86,9 %. Menurut Dra. Nurbeti selaku pengusaha, koordinator sekaligus instruktur pelatihan bidang kerajinan tangan di Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 1 Mei 2016 jam 10:00 WIB diketahui bahwa tingginya minat peserta pelatihan untuk berwirausaha pada bidang kerajinan tangan ini, disebabkan antara lain :

“...Tingginya minat peserta pelatihan dalam mengembangkan UMKM pada sektor kerajinan tangan (*handycraft*) dikarenakan bahan baku pembuatan produk sangat murah dan mudah didapat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan bersifat fleksibel dan bisa dilakukan paruh waktu. Kemudian produk yang dihasilkan dan memenuhi standard akan diterima langsung oleh pelaku usaha yang sejenis, sehingga yang bersangkutan langsung menerima uang atau penghasilan. Serta kegiatan usaha bisa dilakukan secara berkelompok sebagai industri rumahan ...”

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa minat peserta dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah pada sektor kerajinan tangan ini sangat tinggi dikarenakan bahan baku pembuatan yang mudah, waktu yang tidak mengikat dan penghasilan yang didapatkan juga menguntungkan. Selain itu pada pelatihan kerajinan tangan ini membawa manfaat atau dampak yang positif bagi beberapa peserta yang menerima pelatihan. Bagi beberapa peserta pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) tersebut keterampilan yang dimiliki dapat dimanfaatkan menjadi sebuah peluang usaha yaitu dengan mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah

(UMKM) pada bidang kerajinan tangan berbahan dasar daur ulang dan plastik (*acrylic*). Hal ini nampak pada peningkatan penghasilan pada beberapa peserta pelatihan kerajinan tangan di Kelurahan Lesanpuro sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9 Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Kerajinan Tangan

NO	Jenis usaha	Nama pelaku usaha	Status kepemilikan & jabatan	Penghasilan bersih rata-rata sebelum mengikuti pelatihan	Penghasilan bersih rata-rata setelah mengikuti pelatihan	Prosentase kenaikan
1.	Kerajinan tangan (<i>handycraft</i>)	Dra Nurbeti (RW 08)	Pemilik dengan 10 orang pekerja	9,5-10jt/bln	14-15 jt/bln	47,6 %
2.	Kerajinan tangan (<i>Handycraft</i>)	Erni Agustin (RW 08)	Pemilik dengan 6 orang pekerja	5,5- 6 jt/bln	7,2- 7.5/bln	21.8 %
3.	Kerajinan tangan (<i>Handycraft</i>)	Evi Tutut (RW 08)	Pemilik dengan 5 orang pekerja	4.5-5,5 jt/bln	6,0-6,5 jt/bln	18.18 %
4.	Kerajinan tangan & (<i>handycraft</i>)	Ika Rahmawati (RW 08)	Pemilik bekerja sendiri	1,5-1,5 jt/bln	2,0-2,25 jt/bln	33.34 %
5.	Kerajinan tangan & (<i>handycraft</i>)	Airin Dwi Anah RW 08	Pemilik bekerja sendiri	1.5-1,75 jt/bln	2.0-2,25 jt/bln,	22,22 %
6.	Kerajinan tangan & <i>handycraft</i>	Wiwik Ambar (RW 01)	Pemilik dengan 2 orang pekerja	2,25- 2,5 jt/bln	2,75- 3 jt/bln	20 %

NO	Jenis usaha	Nama pelaku usaha	Status kepemilikan & jabatan	Penghasilan bersih rata-rata sebelum mengikuti pelatihan	Penghasilan bersih rata-rata setelah mengikuti pelatihan	Prosentase kenaikan
7.	Kerajinan tangan & handycraft	Zulaika (RW 02)	Pemilik bekerja sendiri	650-700 ribu/bln	1,0-1,2 jt/bln	53 %
8.	Kerajinan tangan & handycraft	Eni Hariyati (RW 03)	Pemilik dan bekerja sendiri	600-700 ribu/bln	750-850 ribu/bln	21,4 %

(Sumber: Data Primer yang Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa pelatihan keterampilan yaitu kerajinan tangan membawa manfaat bagi peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan tangan daur ulang (*handycraft*) yaitu dengan adanya kenaikan penghasilan dari penjualan produk – produk kerajinan tangan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa warga di Kelurahan Lesanpuro. Hal ini sesuai dengan pendapat Erni agustin selaku peserta pelatihan yang saat ini menjadi pelaku UMKM di bidang kerajinan tangan daur ulang yang berada di Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 13.00 WIB :

“...Pelatihan mengenai kerajinan tangan yang kami ikuti di Kelurahan Lesanpuro ini membawa manfaat yang baik bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang kami tekuni sebelumnya yaitu di bidang kerajinan tangan. Sebelum mengikuti pelatihan kami sempat mengembangkan usaha di bidang kerajinan tangan ini, namun usaha yang kami kembangkan terkesan kembang kempis dikarenakan kurangnya varian produk yang saya jual yaitu sebatas pada souvenir pernikahan dimana banyak sekali pesaing lainnya. Pada saat itu kami mendapat kesempatan menjadi peserta penerima pelatihan kerajinan tangan dikarenakan panitia pelatihan mengetahui kami sedang mengembangkan usaha kecil di bidang kerajinan tangan. Pada waktu pelatihan kami mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai kerajinan tangan menggunakan

bahan daur ulang dan plastik (*acrylic*), kemudian kami juga mendapat buku pembuatan panduan kerajinan tangan yang berisi tentang varian – varian kerajinan tangan berbahan dasar daur ulang maupun *acrylic*. Setelah mengikuti pelatihan tersebut kami mencoba mengembangkan varian produk kerajinan tangan berbahan dasar daur ulang dan *acrylic* dan hasil penjualan yang kami dapatkan semakin meningkat karena pembeli tertarik kepada produk buatan kami. Sekarang kami bisa mengangkat beberapa orang pegawai yang merupakan peserta pelatihan tersebut dan tetangga sekitar...”

Berdasarkan Wawancara diatas bahwa ibu Erni Agustin mendapatkan manfaat yang cukup signifikan bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di bidang kerajinan tangan yang sedang ditekuni yaitu pada pengembangan varian produk yang semakin beragam. Selain itu dari Usaha Kecil ibu Erni yang semakin berkembang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari peserta pelatihan kerajinan tangan tersebut dan tetangga sekitarnya. Dalam hal ini, pelatihan kerajinan tangan membawa manfaat bagi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang berada di Kelurahan Lesanpuro dengan adanya penyerapan beberapa tenaga kerja pada kelurahan tersebut.

❖ Hasil (*Output*) pelatihan komputer (Desain Grafis)

Hasil pelatihan komputer (desain grafis) yang diselenggarakan di Kelurahan Lesanpuro pada tahun 2014 tersebut, saat ini dapat dilihat yaitu adanya peserta yang melanjutkan Usaha Kecil di bidang desain grafis tersebut serta ada yang tidak melanjutkan atau melanjutkan sebagai karyawan atau buruh pabrik. Hal tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10 Daftar Jumlah Peserta Pelatihan Komputer yang Mengembangkan UMKM dan Tidak Mengembangkan

No	Nama Kegiatan Keterampilan	Jumlah Peserta Pelatihan UMKM	Jumlah Peserta Yang Berwirausaha Dalam Bentuk UMKM	Jumlah Peserta Yang Tidak Berwirausaha (Ikut Orang Lain Sbg Karyawan)
1.	Pelatihan komputer	25	15 (60 %)	10 (40%)

(Sumber: Data Primer yang Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan, pada bidang keterampilan komputer yaitu pada desain grafis menunjukkan bahwa hanya 15 orang dari 25 orang peserta pelatihan komputer yang berwirausaha dibidang desain grafis ataupun percetakan, itu berarti hanya sekitar 60 % dari 25 peserta pelatihan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa peserta pelatihan belum sepenuhnya menghasilkan wirausahawan yang berbasis komputer. Menurut Subandrio selaku pengusaha dan koordinator pelatihan komputer (desain grafis) di Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 3 Mei 2016 jam 10.40 WIB, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

“...Rendahnya minat peserta pelatihan dalam megembangkan Usaha mikro Kecil Menengah dibidang desain grafis ini diakibatkan oleh Modal kerja untuk usaha yang berbasis komputer sangat tinggi, kemudian banyaknya peserta yang belum paham tentang design grafis, sehingga sangat sulit untuk membuka usaha dibidang desain grafis. Selain itu. Pemilihan peserta pelatihan yang kurang selektif sehingga banyak peserta yang tidak senang di komputer ikut pelatihan tersebut...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kurangnya minat peserta pelatihan dalam mengembangkan usaha kecil dibidang desain grafis ini disebabkan oleh modal usaha yang lumayan tinggi, pengetahuan yang

kurang serta beberapa peserta yang kurang minat terhadap pelatihan tersebut. Namun pada beberapa peserta pelatihan desain grafis yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Bagi beberapa peserta yang dapat mengembangkan (UMKM) Usaha Mikro Kecil Menengah di bidang desain grafis mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11 Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Komputer

NO	Jenis usaha	Nama pelaku usaha	Status kepemilikan & jabatan	Penghasilan bersih rata-rata sebelum mengikuti pelatihan	Penghasilan bersih rata-rata setelah mengikuti pelatihan	Prosentase kenaikan
1.	Desain grafis /komputer	Beni Pambudi (RW 02)	Pemilik dgn 2 orang pekerja	3.5-4 jt/bln	4,0-4,5 jt/bln	12.5 %
2.	Desain grafis /komputer	Subandrio (RW 03)	Pemilik bekerja sendiri	1,9-2,3 jt/bln	2,5-3.0jt/bln	30.4 %
3.	Desain grafis/ komputer	Lukman Hadi (RW 01)	Pemilik dan bekerja sendiri	500-600 ribu/bln	800 ribu – 1,2 juta/bln	40 %

(Sumber: Data Primer yang Diolah Penulis, 2016)

Berdasarkan tabel diatas beberapa peserta pelatihan mendapatkan tambahan penghasilan tambahan setelah mengikuti pelatihan yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro, hal ini dikarenakan beberapa peserta tersebut mendapat tambahan pengetahuan mengenai desain grafis dan terus mencoba untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah pada bidang desain grafis yang mereka tekuni. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Beni

Pambudi sebagai salah satu peserta pelatihan yang berhasil mengembangkan usaha kecilnya di bidang desain grafis pada tanggal 3 Mei 2016 Pukul 12.45 WIB :

“...Sebelum mengikuti pelatihan kami sempat mengembangkan usaha di bidang desain grafis, namun ilmu pengetahuan kami mengenai desain grafis sangat terbatas. Pada akhirnya kami hanya melayani pesanan desain hanya pada tetangga sekitar naupun pada RW lainnya saja, sehingga penghasilan yang kami dapat sangatlah minim. Namun setelah mendapatkan pelatihan di bidang desain grafis yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro mengenai desain grafis usaha kami di bidang desain grafis semakin berkembang hal ini dikarenakan kami mendapatkan pelatihan yang cukup komunikatif dan mendapatkan salinan (*copy*) panduan untuk desain grafis, Kemudian kami terus mempraktikkan dan mencoba mempelajarinya. Pada akhirnya kami dapat mengembangkan usaha kecil di idang desain grafis tersebut dan saat ini kami mendapat tambahan penghasilan dikarenakan jangkauan usaha kami tidak hanya terbatas pada lingkungan satu RW saja namun lebih luas...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelatihan desain grafis yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro membawa manfaat yang positif bagi beberapa peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, karena mereka giat berlatih sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah pada bidang desain grafis yang mereka tekuni dapat berkembang.

Melihat hasil (*Output*) dari di atas dapat disimpulkan bahwa hampir semua pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengikuti pelatihan mendapatkan kenaikan penghasilan rata-rata antara 18,18 % sampai 50 %, hal ini membuktikan bahwa keempat pelatihan tersebut memiliki pengaruh terhadap penghasilan sebagian besar dari peserta keempat pelatihan yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro.

b. Inovasi - inovasi produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang

Berawal dari pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Lesanpuro yang difasilitasi oleh BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Lesanpuro dan juga partisipasi masyarakat setempat. Pelatihan yang terdiri dari pelatihan pembuatan tas, kerajinan tangan (*Handycraft*), desain grafis dan budidaya jamur ini telah berhasil mengantarkan sebagian besar peserta menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masing – masing bidang yang diikuti. Selain itu peserta yang sudah memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga mengalami peningkatan pendapatan yang berasal dari inovasi produknya, yaitu dengan mengubah desain bentuk produk agar selalu *up to date* sehingga calon pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut. Inovasi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut membutuhkan suatu upaya atau usaha agar dalam pengembangannya menjadi pesat melalui suatu inovasi, dimana tujuan awal dari sebuah inovasi adalah agar produk – produk yang dikeluarkan tidak terkesan monoton dan ketinggalan jaman. Begitu juga dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Lesanpuro juga memerlukan suatu inovasi, agar produk yang dihasilkan tidak monoton dan membosankan.

Seperti pada produk kerajinan tangan (*Handycraft*) dan produk kerajinan tas kedua produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kelurahan Lesanpuro memerlukan suatu inovasi pada pengembangan

produknya agar produksi dapat terus berjalan. Berikut ini penjelasan mengenai inovasi yang dikembangkan pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bidang tas dan kerajinan tangan (*Handycraft*) yang ada di Kelurahan Lesanpuro.

❖ **Inovasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pembuatan tas di Kelurahan Lesanpuro**

Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan pada UMKM di Kelurahan Lesanpuro adalah pembuatan tas. Seiring berjalannya waktu model suatu barang akan terus mengikuti perkembangan zaman, tidak terkecuali tas. Untuk itu, pelaku UMKM atau pengusaha kecil di bidang pembuatan tas dituntut juga dalam mengembangkan bentuk atau model produk suatu tas. Sebagaimana diketahui produksi tas yang berada di Kelurahan Lesanpuro rata – rata pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada kelurahan tersebut masih memproduksi tas slempang dan tas pinggang yang berbahan dasar plastik atau sintetis. Untuk itu diperlukan suatu cara inovasi pengembangan produk agar pelaku – pelaku Usaha Mikro di bidang pembuatan tas tersebut dapat terus memproduksi sesuai permintaan pasar. Seperti Bapak Purwanto sebagai salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang pembuatan tas yang berada di Kelurahan Lesanpuro telah menerapkan suatu inovasi agar Usaha Mikro yang dimilikinya dapat berkembang . Pada awalnya Bapak Purwanto hanya memproduksi tas slempang dan tas pinggang yang berbahan dasar plastik dan kain sintetis. Namun seiring berjalannya waktu permintaan pasar berubah seperti adanya tas slempang berbahan dasar levis atau *jeans* dan

berbahan dasar kulit. Untuk itu Bapak Purwanto berusaha mengembangkan tas berbahan dasar kain levis maupun kulit walaupun berkualitas 2 atau menambahkan suatu gambar ataupun atribut sebagai hiasan tas tersebut agar terlihat lebih menarik, seperti atribut bola dikarenakan banyaknya masyarakat penggemar bola. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Purwanto pada tanggal 6 Mei 2016 jam 15.00 :

“...Permintaan pasar pada suatu tas dapat berubah sewaktu- waktu. Seperti model (bentuk) dan bahan, sehingga kami harus mengembangkan suatu inovasi agar dapat menarik pembeli yaitu dengan menggunakan bahan dari *jeans* maupun kulit sintetis. Selain itu kami juga menambahkan atribut beberapa team sepak bola agar lebih menarik, dikarenakan banyaknya peminat bola pada kalangan masyarakat. Dengan adanya inovasi yaitu perubahan bahan kami harapkan usaha yang kami rintis ini bisa semakin berkembang dan dapat bersaing dengan tas hasil produksi Cina maupun perusahaan tas lainnya...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya inovasi dari bahan pembuatan tas dengan bahan dasar kain levis maupun kulit sintetis ini, diharapkan tas yang dibuat oleh Bapak Purwanto ini dapat bersaing dengan tas hasil dari produksi Cina maupun tas produksi perusahaan lainnya agar (UMKM) Usaha Mikro Kecil Menengah di bidang kerajinan tas pada Kelurahan Lesanpuro ini semakin berkembang. Contoh inovasi pada bahan pembuatan tas seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.8 Contoh Tas berbahan dasar kain levis dan kulit sintetis
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016)



Gambar 4.9 Contoh Tas beratribut klub sepak bola
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016)

Berdasarkan gambar diatas, bahwa Bapak Purwanto mengembangkan inovasi pada bahan pembuatan tas yaitu menggunakan kain levis, kulit sintetis dan tambahan atribut klub sepak bola agar produk tasnya dapat bersaing dengan produk tas buatan industri lainnya.

❖ **Inovasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kerajinan tangan di Kelurahan Lesanpuro**

Kerajinan tangan umumnya menggunakan bahan dari barang bekas yang nantinya akan diubah menjadi barang bernilai yang memiliki nilai ekonomi. Seperti Dra. Nurbeti sebagai salah satu pengusaha mikro di

bidang kerajinan tangan (*handycraft*) yang berada di Kelurahan Lesanpuro yang juga mengembangkan produk-produk berbahan daur ulang menjadi suatu produk yang berguna bagi kehidupan sehari – hari.

Pada awal pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di bidang kerajinan tangan (*Handycraft*) Dra. Nurbeti hanya mengembangkan kerajinan tangan berbahan dasar plastik *acrylic* yang kemudian diubah menjadi hiasan rumah saja. Pada saat itu produk kerajinan yang dihasilkan tersebut laku di pasaran. Namun seiring berjalannya waktu, produk kerajinan tangan Dra. Nurbeti berkurang peminatnya. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan oleh beliau terkesan monoton. Demi kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah di bidang kerajinan tangan (*handycraft*) yang Dra. Nurbeti kembangkan, maka beliau membuat suatu inovasi yaitu kerajinan tangan yang tidak hanya bernilai ekonomis, namun bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari seperti tempat tisu, tempat permen, tempat air mineral gelas dan lain sebagainya. Selain itu bahan yang digunakan juga mudah di dapat seperti kalender bekas, kertas pembungkus makanan, kardus dan juga kain bekas potongan jahitan baju. Setelah inovasi tersebut dikembangkan minat pembeli terhadap produk kerajinan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dra Nurbeti pada tanggal 2 Mei 2016 pada jam 16.00 :

“...Pada awal pembentukan UMKM, produk yang kami kembangkan hanya berupa hiasan dinding maupun hiasan perabot rumah. Namun lama kelamaan minat pembeli pada produk kami mulai menurun, mungkin karena varian produk yang kami kembangkan hanya terbatas pada hiasan saja. Tetapi kami berusaha

untuk mempertahankan agar UMKM ini tetap berjalan, yaitu membuat suatu perubahan model atau desain produk kami menjadi benda yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, seperti tempat tisu, tempat permen dan wadah tempat minuman gelas. Selain itu kami juga menggunakan bahan – bahan daur ulang yang mudah di dapatkan seperti kalender bekas, kain perca, kertas pembungkus makanan hingga plastik bekas bungkus kopi, dari sinilah kemudian pembeli tertarik kembali untuk membeli produk kerajinan barang kami...”

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa untuk mempertahankan Usaha Mikro Kecil Menengah di bidang kerajinan tangannya, Dra. Nurbeti berinovasi dalam merubah desain produk menjadi kerajinan yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu bahan yang digunakan juga terbilang cukup mudah untuk didapatkan. Berikut contoh hasil inovasi produk kerajinan tangan (*Handycraft*) dari Dra. Nurbeti :



Gambar 4.10 Kerajinan tangan tempat permen Berbahan dasar kertas bungkus
(Sumber: Dokumentasi Penulis)



Gambar 4.11 Kerajinan tangan tempat tisu berbahan dasar kertas kalender

(Sumber: Dokumentasi Penulis)



Gambar 4.12 Kerajinan tangan tempat air gelas dengan hiasan kain perca

(Sumber: Dokumentasi Penulis)

❖ **Inovasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari hasil Pembangunan Fisik di Kelurahan Lesanpuro**

Selain berupa pelatihan, upaya pengentasan kemiskinan yang berada di Kelurahan Lesanpuro juga melalui pembangunan fisik seperti pembangunan instalasi biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak pengganti elpiji dan penerangan. Berikut rincian dari pembangunan biogas yang berada di Kelurahan Lesanpuro:

Tabel 4.12 Kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Kelurahan Lesanpuro

No	Kegiatan pembangunan infrastruktur	Biaya	Lokasi	Keterangan
1	Pembangunan instalasi Biogas I (Kesatu)	Rp 13.000.000	RW 09 Kel Lesanpuro	-bersifat fisik & swadaya masy Rp 2.000.000
2.	Pembangunan instalasi Biogas II (Kedua)	Rp 10.500.000	RW 06 kel Lesanpuro	- bersifat fisik & swadaya masy Rp 2.000.000

(Sumber: BKM Kelurahan Lesanpuro)

Pada tabel 4 diketahui, bahwa pembangunan 2 unit Biogas yang ada di wilayah RW 06 dan RW 09 telah dapat menekan pengeluaran untuk memasak maupun penerangan, di lain sisi limbah hasil pembuangan biogas (bioslurry) juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai Usaha Mikro Kecl Menengah (UMKM). Bioslurry dapat digunakan pada bidang pertanian yang berfungsi sebagai pupuk tanaman. Pada pembangunan instalasi biogas memiliki

manfaat ekonomi, menurut Ir. Darmawan Setiabudi selaku ketua BKM

Kelurahan Lesanpuro Pada tanggal 29 April 2016 jam 13.00 WIB :

1. Jika dipandang dari sudut ekonomi. Apabila satu orang penduduk di wilayah tersebut dalam satu minggu membutuhkan satu tabung gas elpiji seharga rata rata Rp. 17.000 maka satu bulan dia harus mengeluarkan biaya Rp. 68.000. Jika satu orang mengeluarkan Rp. 68.000 per bulan maka, jumlah pemakaian biogas sebanyak 50 KK maka, dalam satu bulan di dua RW tersebut bisa menghemat Rp. 3.400.000.
2. Jika dipandang dari sudut usaha, hasil buangan dari biogas berupa cairan yang bernama bioslurry. Bioslurry merupakan pupuk cair yang bsangat bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan maupun untuk perikanan (Beternak ikan di kolam). Pada kedua wilayah RW yaitu RW 6 dan 9 yang ada instalasi biogas, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) biogas juga menjual pupuk cair tersebut menggunakan kemasan jerigen atau sekitar 5 dengan harga per- jerigen yaitu Rp. 15.000. Sedangkan hasil bioslurry sehari mencapai 30 hingga 50 liter, dengan kata lain hasil sehari bio Slurry sekitar 6 hingga 10 jerigen perharinya..."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dari pembangunan 2 unit biogas yang ada di Kelurahan Lesanpuro, selain dapat menghemat pengeluaran listrik dan bahan bakar memasak pada beberapa RW Limbah hasil pembuangannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman yang bermanfaat bagi bidang pertanian. Hal ini merupakan suatu inovasi yang dikembangkan untuk menjadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bidang pertanian. Berikut ini adalah contoh cairan Bio Slurry hasil limbah dari biogas yang menjadi peluang usaha dari pembangunan fisik pada Kelurahan Lesanpuro :



Gambar 4.13 Larutan Bio Slurry
(Sumber: BKM Kelurahan Lesanpuro)

c. Metode pemasaran produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang

Pada suatu produk, pemasaran merupakan elemen terpenting dalam penjualan. Karena dapat diketahui bahwa pemasaran merupakan penghubung antara perusahaan kepada konsumen. Tujuan utama pemasaran adalah untuk mencapai hubungan yang harmonis antara perusahaan dan konsumen. Begitu juga pada pemasaran produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di Kelurahan Lesanpuro. Seperti pada UMKM yang berasal dari keempat bidang pelatihan yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro tersebut, yaitu bidang pembuatan tas; kerajinan tangan (*Handycraft*); budidaya jamur dan komputer (desain grafis) juga memerlukan pemasaran agar terus berkembang. Pada proses pemasaran ini, Peran BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) sangat minim. Hal ini sesuai dengan pendapat Arum Pawestri, ST, MT, M.Sc pada tanggal 29 April 2016 jam 11:15:

“...Peran yang kami miliki pada upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Lesanpuro hingga pelatihan saja. Sehingga pada pemasaran produknya peran kami sangat minim. Jadi pada pemasarannya produknya, para pelaku

UMKM yang merupakan masyarakat Kelurahan Lesanpuro tersebut yang memasarkan produknya sendiri...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pemasaran produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang berada di Lesanpuro dilakukan oleh masyarakat sendiri yaitu masing - masing pelaku UMKM yang dahulu merupakan peserta pelatihan keterampilan pada Kelurahan Lesanpuro.

Pemasaran yang dilakukan masyarakat yaitu pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro pada umumnya masih menggunakan metode yang sederhana, dikarenakan beberapa pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan modal dan kurang mengerti sistem informasi digital. Metode yang digunakan dalam pemasaran produk UMKM di Lesanpuro diantaranya menggunakan metode mulut ke mulut, menggunakan perjanjian konsinyansi serta menjajakan dagangannya secara langsung. Berikut ulasan mengenai sistem pemasaran yang digunakan oleh beberapa peserta pelatihan yang menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang

(1). Sistem Pemasaran mulut ke mulut (*Word of Mouth*)

Pada sistem pemasaran mulut ke mulut (*Word of Mouth*) pada umumnya menggunakan kekuatan rekomendasi pribadi dari rekan maupun orang terdekat, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Selain itu pemasaran dari mulut ke mulut juga tidak membutuhkan biaya, bisa dibilang ini adalah strategi pemasaran gratis yang

sangat efektif. Terlebih lagi masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan suka bersosialisasi dan berkumpul hanya untuk sekedar berbagi cerita, sehingga kesempatan untuk menyebarkan informasi sebuah produk atau jasa yang sering mereka gunakan sangat terbuka lebar. Metode pemasaran mulut ke mulut (*Word of Mouth*) juga dipergunakan dalam pemasaran produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di Lesanpuro. Seperti pada bidang kerajinan tangan (*Handycraft*) beberapa pelaku UMKM masih menggunakan metode ini dalam pemasarannya. Karena sebagaimana diketahui wilayah Kelurahan sebagian wilayahnya masih masyarakat paguyuban dan sering berkumpul, sehingga cara pemasaran mulut ke mulut merupakan cara efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Eni Hariati sebagai salah satu pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di bidang kerajinan tangan pada Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 6 Mei 2016 jam 14.50:

“...Usaha kecil pembuatan kerajinan yang kami rintis biasanya memproduksi hiasan rumah. Dalam pemasarannya kami menggunakan metode yang sedikit berbeda yaitu melalui mulut ke mulut. Cara pemasaran seperti ini kami gunakan karena karakteristik wilayah kami yang masyarakatnya merupakan masyarakat paguyuban dimana sering diadakan pertemuan – pertemuan seperti pengajian, arisan dan acara lainnya. Untuk itu, kami memanfaatkan kesempatan tersebut dalam memasarkan produk kerajinan tangan kami yaitu metode mulut ke mulut, awalnya kami membawa beberapa contoh produk kemudian apabila ada pesanan kami langsung memproduksinya. Akhirnya usaha kerajinan tangan yang kami kembangkan kini dikenal warga sekitar rumah kami...”

Bedasarkan hasil wawancara diatas bahwa sistem pemasaran mulut ke mulut merupakan metode pemasaran yang efektif bagi pengembangan suatu usaha yang berskala kecil (mikro) dikarenakan sistem pemasaran

tersebut merupakan salah satu metode yang efektif karena menggunakan kekuatan rekomendasi pribadi bagi orang terdekat dan tersiar dengan cepat.

(2). Sistem Pemasaran Konsinyasi (Titip Jual)

Metode lain yang digunakan pada pemasaran produk UMKM di Kelurahan Lesanpuro adalah melalui sistem pemasaran konsinyasi (titip jual). Metode ini cukup digemari kebanyakan orang dalam berbisnis, dengan modal sedikit namun juga bisa menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan. Metode ini biasanya dilakukan dengan menitipkan barang yang dijual kepada pemilik warung atau toko. Biasanya hal ini di jumpai pada warung kecil dengan cara menerima barang atau produk dari supplier dan distributor melalui sistem titip jual atau konsinyasi. Dalam sistem ini, pemilik toko dapat meminimalisir resiko kerugian dan mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. Selain itu pemilik barang juga mendapat keuntungan dari hasil penjualannya. Metode pemasaran melalui konsinyasi atau titip jual ini juga diterapkan oleh beberapa pelaku UMKM di Lesanpuro, salah satunya adalah Ibu Maria Maqda sebagai pelaku UMKM di bidang budidaya jamur. Pada budidaya jamur tiram yang beliau kembangkan, Ibu Maria menggunakan metode pemasaran konsinyasi (titip jual) karena jika dijual secara langsung minat masyarakat terhadap produk jamur tiram yang beliau kembangkan masih rendah. Pada akhirnya ibu Maria mengembangkan produk Usaha Mikro Kecil Menengahnya menggunakan metode pemasaran konsinyasi (titip jual) pada beberapa supermarket terdekat yang konsumennya terdiri dari beragam

kalangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Maria Maqda sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di bidang Budidaya jamur jenis tiram pada tanggal 8 Mei 2016 jam 13.00 :

“...Pada pengembangan usaha mikro di bidang budidaya jamur tiram yang kami tekuni saat ini dalam hal pemasaran bisa dikatakan tidak mudah, dikarenakan tidak semua orang menyukai jamur tiram. Untuk itu demi keberlangsungan usaha yang kami jalani ini, metode pemasaran yang kami kembangkan adalah sistem konsinyasi (titip jual) dengan beberapa supermarket yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Lesanpuro. Nantinya apabila produk jamur tiram kami laku maka pihak supermarket akan menyeter sejumlah uang dari harga yang kami tentukan, namun pihak supermarket juga mendapatkan keuntungan karena dari harga jual yang kami tentukan mereka juga turut menetapkan harga jual mereka sendiri. Sehingga kami dan pihak supermarket sama – sama mendapat keuntungan...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dengan menerapkan sistem konsinyasi (Titip Jual) dapat mendatangkan keuntungan pada kedua belah pihak baik itu pemilik barang maupun pemilik toko karena bagi pemilik toko mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal, begitu juga pemilik barang juga dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan seperti pada pemasaran produk jamur diatas.

(3). Menjajakan produk secara langsung

Sistem pemasaran lainnya yang digunakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah menjajakan langsung produk yang dimilikinya, seperti pedagang pada umumnya yang menjajakan dagangannya secara langsung. Hal ini dikarenakan beberapa pelaku UMKM yang ada di Lesanpuro masih memiliki pandangan bahwa cara yang paling mudah untuk memasarkan produk mereka dengan menjajakan langsung

produk yang mereka punya, selain itu antara penjual dan konsumen berinteraksi secara langsung. Salah satu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro yang pemasarannya menggunakan metode tersebut adalah pada bidang kerajinan tas. Pemasaran dengan menggunakan metode ini dirasa mudah oleh pengrajin tas, seperti menjajakan produk tas ini pada gerai atau stan pada beberapa pasar maupun tempat – tempat keramaian lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Taufiq Zailani sebagai pengrajin tas di Kelurahan Lesanpuro yang menerapkan sistem pemasaran dengan menjajakan produk tas secara langsung pada tanggal 7 Mei 2016 jam 14.50 WIB :

“...Pemasaran yang kami lakukan adalah dengan menjajakan langsung yaitu seperti menggunakan kios atau stan pada tempat-tempat keramaian. Karena cara ini yang paling mudah dan kami mengerti, selain itu kami juga langsung berinteraksi dengan calon konsumen kami. Jika menggunakan iklan nantinya tas hasil produksikami akan kalah dengan tas buatan industri berskala besar...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah pada salah satu pemasaran produk tas, metode yang digunakan adalah dengan menjajakan langsung produk tas tersebut dikarenakan usaha yang dikembangkan masih pada skala kecil, sehingga harus menjemput pelanggan yaitu dengan menjajakan barang dagangannya secara langsung. Sehingga dapat berinteraksi langsung dengan calon konsumen.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan BKBPM dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang

a. Faktor Pendukung dalam Mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro

(1). Faktor Sumber Daya Manusia

- a). Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro pada umumnya masih sedikit yang tersentuh program pelatihan dan pengembangan UMKM, hal ini nampak bahwa dari 17.400 penduduk usia produktif hanya 94 yaitu sekitar 0,54% yang tersentuh oleh pelatihan. Sehingga untuk pengembangannya masih terbentang seluas-luasnya untuk potensi lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ir. Darmawan Setiabudi selaku koordinator BKM pada tanggal 29 April 2016 jam 09.00 WIB :

“..Kelurahan Lesanpuro memiliki sekitar 17.400 penduduk produktif namun yang tersentuh pada program pelatihan hanya sedikit sekitar 0,54 persen saja, Apabila program pelatihan keterampilan terus diadakan maka akan berdampak positif bagi pemberdayaan penduduk yang berusia produktif ini dan kesempatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih sangat diperlukan dan kesempatan masih sangatlah luas..”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif pada Kelurahan Lesanpuro program-program yang bersifat memberdayakan masyarakat masih sangat diperlukan dan kesempatan pelaksanaan program pemberdayaan masih luas

b). Penduduk di Kelurahan Lesanpuro terbagi menjadi Barat dan Timur Jalan Ki Ageng Gribig, sebelah Timur Jalan Ki Ageng Gribig yaitu terdiri dari RW 07; 08; 10 dan 11. Wilayah RW tersebut merupakan kawasan perumahan dan penduduknya terdiri dari penduduk yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan penduduk yang ada di wilayah barat Jalan Ki Ageng Gribig yang terdiri dari RW 01; 02; 03; 04; 05; 06; 09 pada umumnya berlatar belakang pendidikan dasar, di lain sisi program program pelatihan yang bersifat inovatif untuk kemajuan UMKM sangat direspons positif oleh masyarakat di wilayah RW 07; 08; 10 dan 11 yang penduduknya lebih cepat menerima perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga ke 4 RW inilah yang memicu dan ikut membina RW lainnya untuk mengembangkan UMKM di wilayah Kelurahan Lesanpuro. Hal tersebut menjadi modal dasar untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro. Hal ini sesuai dengan pendapat Lukman Santoso S.AP selaku Sekretaris Kelurahan Lesanpuro pada tanggal 9 Mei 2016 jam 09.30 WIB:

“...Wilayah Kelurahan Lesanpuro memiliki sekitar 11 RW. Pada lokasi RW 07, 08, 09 dan 11 mayoritas masyarakatnya berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Sehingga warga dari keempat RW tersebut sangatlah mudah menerima suatu hal-hal baru yang berkembang di masyarakat. Seperti pada program pemberdayaan masyarakat, mereka sangatlah antusias dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga kami

sering melibatkan beberapa warga dari keempat RW ini dalam kepanitiaan internal pada suatu program pemberdayaan masyarakat seperti pada pelatihan kemarin khususnya. Sehingga dapat dikatakan keempat RW ini terlibat dalam pembinaan dan memicu RW lainnya yang notabene masyarakatnya mayoritas berlatar belakang pendidikan dasar seperti RW 01; 02; 03; 04; 05; 06; 09...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya beberapa kawasan RW di Kelurahan Lesanpuro yang mayoritas masyarakatnya memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi, dapat mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat sebagai panitia internal maupun dalam pembinaan seperti pada pelatihan yang diadakan oleh BKBPM.

- c). Hasil (*Output*) dari pelatihan ketrampilan UMKM memicu banyaknya penduduk di Kelurahan Lesanpuro yang mempunyai pemikiran untuk mengembangkan UKM di kelurahan tersebut, hal ini sudah sesuai dengan program pengembangan UMKM oleh BKBPM, seperti pendapat Purwaningsi, S.Sos pada tanggal 10 Mei 2016 jam 09.55 WIB:

“...Melihat hasil dari pelatihan keterampilan kepada beberapa warga Kelurahan Lesanpuro yang kini dapat dikatakan mengalami peningkatan penghasilan dan menjadi pengusaha mikro kecil menengah. Pada akhirnya dapat memicu warga lainnya untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil menengah juga. Selain itu warga yang dahulu menjadi pelatihan keterampilan yang kini sudah menjai pelaku UMKM tersebut juga ikut berbagi pengalaman dari keterampilan yang mereka dapat...”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas adalah dengan adanya peserta pelatihan yang kini menjadi pelaku UMKM maka dapat memicu warga lainnya untuk ikut mengembangkan/ menjadi pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Lesanpuro selain itu beberapa warga yang menjadi peserta pelatihan juga ikut berbagi pengalaman dalam keterampilan yang mereka dapatkan dari pelatihan tersebut.

(2). Faktor Sumber Dana/ Biaya

Faktor pendanaan sangat penting untuk pengembangan dan pembentukan UMKM di Kelurahan Lesanpuro. Hal ini telah terbukti, dana hibah dari pemerintah sebesar 75 juta rupiah pada tahun anggaran 2014-2015 bisa mendukung terbentuknya beberapa UMKM di wilayah Kelurahan Lesanpuro. Contoh: UMKM yang bergerak dibidang kerajinan tangan, pembuatan tas, budidaya jamur dan komputer (desain grafis). Hal ini sesuai dengan pendapat Ir. Darmawan Setiabudi pada tanggal 29 April 2016 jam 10.30:

“...Adanya dana hibah dari pemerintah yang penyalurannya melalui BKBPB sekitar 75 Juta rupiah tersebut salah satu pengalokasiannya adalah untuk program pemberdayaan masyarakat ini, karena dengan adanya pelatihan maka akan mendorong terbentuknya UMKM yang ada di Kelurahan Lesanpuro...”

(3). Faktor Jarak dan lokasi (Aksesibilitas)

Jarak dan lokasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengembangan UMKM seperti pada pemasaran maupun kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dari suatu usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kelurahan Lesanpuro, terletak pada lokasi yang strategis. Terhitung jarak Kelurahan Lesanpuro dari pusat kota lebih kurang 5 km. Selain itu, Kelurahan Lesanpuro sebagian wilayahnya merupakan kawasan perumahan Sawojajar yang dikenal sebagai kota satelit, dikarenakan pada perumahan ini dikenal dengan kawasan yang ramai dan berkembang pesatnya perdagangan dan memiliki segala fasilitas tanpa harus keluar jauh ke pusat kota seperti pendidikan, sektor jasa, maupun perkantoran. Sehingga dalam hal pemasaran para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang berada pada Kelurahan Lesanpuro dapat lebih mudah, baik itu memasarkan di dalam kawasan Kelurahan Lesanpuro sendiri maupun pusat kota Malang. Selain itu untuk pemasaran ke luar kota maupun luar negeri juga lebih mudah, dikarenakan jaringan telekomunikasi sudah layak seperti internet dan wilayah Kelurahan Lesanpuro memiliki tipologi kelurahan yang berpotensi pada bidang perdagangan serta jasa. Jadi apabila pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) pemasarannya sukses pada kota lain untuk pengiriman para pengusaha mikro kecil tersebut juga lebih mudah

dikarenakan banyaknya layanan jasa kilat pengiriman yang berada pada kawasan Kelurahan Lesanpuro.

Pada penyediaan bahan baku bagi Pelaku UMKM di bidang kerajinan tangan, tas dan budidaya jamur mudah dalam penyediaannya, dikarenakan tempat penyedia bahan baku pembuatan kerajinan tangan maupun tas yang lokasinya tidak terlalu jauh seperti kawasan pusat perdagangan pasar besar Malang.

b. Faktor Penghambat dalam Mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro

(1). Permodalan

Permasalahan permodalan menjadi masalah utama dan penghambat untuk pengembangan UMKM di wilayah Kelurahan Lesanpuro. Hal ini disebabkan oleh :

a. Banyaknya pengusaha UMKM yang modal usahanya hanya cukup untuk membeli bahan baku saja dan hasil perputarannya sangat kecil sehingga tidak bisa untuk mengembangkan usahanya, bantuan keuangan yang diharapkan dari pemerintah sangat sulit didapatkan, sehingga sangat menghambat perkembangan UMKM.

Menurut Purwanto selaku pengrajin tas pada tanggal 30 April 2016 jam 10.30 bahwa :

“...Tas yang mereka jual di pasaran hasilnya hanya dapat membeli bahan baku saja, dikarenakan banyaknya tas buatan Cina dijual dengan harga yang lebih murah. Sehingga produksi yang kami jual tidak bisa laku secepat

produk dari Cina tersebut, hal inilah yang menyebabkan terhambatnya pengembangan UMKM pembuatan tas ...”

- b. Banyak pengusaha UMKM yang sulit mendapatkan bantuan dana perbankan untuk mengembangkan usaha kecil yang mereka jalani, hal ini disebabkan berbagai persyaratan yang dicantumkan pihak perbankan meminta jaminan sedangkan pelaku UMKM yang mayoritas kaum menengah ke bawah pada umumnya tidak mempunyai jaminan. Keadaan seperti ini akan selalu menghambat perkembangan UMKM.

(2). Pelaksanaan koordinasi antar instansi

Pada pengembangan UMKM di kota Malang, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) memiliki peran menjadi fasilitator yaitu memberikan pelatihan keterampilan dalam pengembangan UMKM, namun pada kenyataannya terdapat tumpang tindih pada fungsi dengan instansi lainnya antara lain: Dinas Koperasi UKM dan Dinas perindustrian/perdagangan. Hal ini nampak pada tugas pokok atau fungsi pada masing-masing instansi yaitu :

- a. **Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM)**

Pada Fungsi BKBPM terdapat “pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan usaha sektor informal”.

- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Pada bidang perdagangan terdapat fungsi: “Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha”

c. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

Pada Dinas koperasi dan UKM kota Malang terdapat fungsi: pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi usaha kecil dan menengah”

Menurut Arum Pawestri, ST, MT, M.Sc Selaku Kasubid pengembangan potensi masyarakat BKBPM Kota Malang Pada tanggal 29 April 2016 jam 10.30 WIB :

“...Pada pengembangan UMKM, terdapat ketumpang tindihan peran yaitu dalam pemberian pelatihan, tumpang tindihnya peran ini terlihat pada fungsi antara BKBPM, Disperindag, serta Dinas Koperasi dan UKM. Hal ini nampak pada Tupoksi masing-masing instansi tersebut, dengan adanya kesamaan peran ini dapat dikatakan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengembangan UMKM, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Alangkah baiknya jika kedepannya terdapat koordinasi mengenai peran dalam pengembangan UMKM seperti pembagian peran maupun penyatuan peran sehingga tidak terputus pada satu peran saja, mengingat selama ini peran BKBPM terbatas hanya pada pelatihan saja sehingga ruang gerak instansi ini terbatas...”

(3). Pemasaran Produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Dalam proses produksi ada beberapa element penunjang yaitu manusia, modal dan hasil produksi. Untuk pengembangan usahanya setiap produk yang dihasilkan harus terjual secara cepat sehingga perputaran usahanya akan lebih besar dan berkembang, sebagai contoh

pada pengrajin tas. Menurut Purwanto selaku pengrajin tas pada tanggal 30 April pada pukul 10.45 :

“... Menunjukkan banyak produk UMKM yang tidak laku dijual meskipun produk tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditentukan; Produk manual yang dihasilkan UMKM masih kurang diminati para pelanggan. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat perkembangan UMKM. Sebagai contoh pada kerajinan pembuatan tas yang kami hasilkan, produk tas buatan kami masih kurang diminati oleh pelanggan. Hal ini disebabkan oleh produk yang dibuat kalah bersaing dengan tas buatan industri baik model atau varian”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat yaitu salah satu permasalahan pada produk UMKM di Lesanpuro terletak pada pemasarannya. Hal ini karena pada proses produksinya UMKM seperti pada pengrajin tas masih menggunakan teknologi manual sehingga varian yang dihasilkan terbatas.

C. Analisis data hasil penelitian

1. Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:20-27) pemerintah memiliki fungsi pembangunan, fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks. Pada Pemerintah Kota Malang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) melakukan upaya dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Hal ini merupakan langkah awal bagi Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM Kota Malang dalam membangun masyarakat kelurahan Lesanpuro melalui sektor UMKM agar masyarakat Kelurahan Lesanpuro menjadi lebih berdaya dan terbebas dari kemiskinan. Menurut Thoha (1997:80) dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan, uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Beberapa peran BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan

Menurut Rappaport (1984:3) *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Upaya pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat di Kelurahan Lesanpuro agar siap menjadi pelaku usaha di sektor UMKM sehingga lebih berdaya dan lebih berwawasan di bidang kewirausahaan serta menjadi pelaku usaha yang inovatif.

Pelatihan yang diadakan di Lesanpuro terdiri dari 4

Pelatihan yaitu:

- (1). Pembuatan tas
- (2). Pelatihan Budidaya jamur

- (3). Pelatihan komputer (desain grafis)
- (4). Kerajinan tangan (*Handycraft*)

Pelatihan tersebut bersifat nonfisik dengan total peserta 94 orang serta biaya dari pemerintah dan sedikit dana dari swadaya masyarakat. Dari pelatihan tersebut diharapkan peserta atau masyarakat Kelurahan Lesanpuro dapat menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masing-masing bidang pelatihan yang mereka ikuti. Hal ini sesuai dengan tujuan dari suatu pemberdayaan masyarakat adalah adanya tujuan yang dicapai seperti yang di kemukakan oleh Ambar (2004:80) bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007, 1-2) dalam suatu proses pemberdayaan terdapat proses pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Proses pengkapasitasan manusia tersebut, diberikan melalui pelatihan ketrampilan dalam pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di Kelurahan Lesanpuro yang dilaksanakan oleh pihak BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) bekerjasama

dengan (BKM) Badan Keswadayaan Masyarakat beserta masyarakat pada tanggal 22 Mei 2014. Pelatihan ini dihadiri oleh total peserta 94 orang yang terbagi menjadi 4 bidang pelatihan. Pada bidang pelatihan tas terdapat 23 peserta, pelatihan budidaya jamur 23 peserta, pelatihan komputer 25 peserta dan pelatihan 23 peserta. Dampak dari pelatihan ini diharapkan mampu menjadikan peserta sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bidang masing-masing sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menanggulangi kemiskinan.

Dengan memberikan pelatihan tersebut harapan kedepannya peserta atau masyarakat Kelurahan Lesanpuro dapat menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masing-masing bidang pelatihan yang mereka ikuti.

Pada pelaksanaan pelatihan di Kelurahan Lesanpuro, BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) hanya bersifat mengawasi, Pelaksana yang berada di lapangan saat pelatihan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Hal ini sesuai dengan peran pemerintah koordinator dimana pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penetapan suatu kebijakan (Arsyad 1999:120)

b. Penyalur Dana Hibah pelatihan

Pada peran BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Malang sebagai penyalur dana hibah yang Bersumber dari APBN 95 % dan dari APBD 5% diterimakan secara bertahap yaitu tahap I 60% (dari APBN), tahap II 35 % (dari APBN) dan tahap III 5% (dari APBD). Sesuai dengan permendagri No 39 Tahun 2011 yang mengatakan “hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional” Pada dana hibah yang disalurkan kepada Kelurahan Lesanpuro ini peruntukannya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan berupa pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang berada pada kawasan Kelurahan Lesanpuro.

c. Fasilitator pelaksanaan pelatihan

Menurut Arsyad (1999:120) Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam kemajuan dan kesejahteraan pembangunan di daerah, salah satunya sebagai fasilitator Pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di

daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik. Pada pelatihan yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro, BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberayaan Masyarakat) memfasilitasi dan merealisasikan usulan-usulan program peningkatan pemberdayaan yang berasal dari MUSRENBANGKEL (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) dengan melibatkan organisasi pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan seperti BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Lesanpuro.

d. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

Peran masyarakat pada pelatihan yang diadakan di Kelurahan Lesanpuro ini adalah sebagai objek penerima pelatihan dan panitia internal dari beberapa masyarakat.

❖ Sebagai objek penerima pelatihan

Konosuke Matsushita (dalam Suhendra, 1988:31) menyatakan: *“we make people before we make product”*. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa sebelum memproduksi barang dan jasa, kita menyiapkan sumber daya manusianya terlebih dahulu untuk membuat barang dan jasa tersebut dan juga sebagai konsumen yang mempunyai daya beli. Dalam Pelatihan keterampilan yang diadakan di

Kelurahan Lesanpuro ini masyarakat merupakan sasaran pada pemberdayaan melalui pelatihan tersebut. Dengan harapan hasil dari pelatihan ini, masyarakat/ peserta pelatihan tersebut akan mempunyai ketrampilan tambahan dan dapat menjadi pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Kelurahan Lesanpuro sehingga dapat menanggulangi masalah kemiskinan pada kelurahan tersebut.

❖ **Sebagai panitia internal pelatihan**

Menurut Sewell Coppock (dalam Suhendra 2006:77) alasan penting bagi perencanaan pembangunan untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan yaitu pemerintah selaku perencana dapat menggali aspirasi masyarakat. Pada pelaksanaan pelatihan ketrampilan di Lesanpuro yaitu pada saat proses persiapan hingga hari pelaksanaan sebagai panitia melibatkan masyarakat sendiri. Hal ini dikarenakan Agar calon peserta penerima pelatihan lebih tepat sasaran dan lebih mengetahui karakteristik serta demografi pada masyarakat di Kelurahan Lesanpuro akan tetapi nantinya tetap ada laporan pertanggungjawaban kepada BKBPM.

2. Hasil (*Output*) pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setelah dilakukan pelatihan Keterampilan

a. Perkembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Jamasy (2004:42) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Lesanpuro tersebut membawa dampak yang cukup signifikan bagi beberapa peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini nampak pada satu tahun setelah pelatihan yaitu periode tahun 2015-2016. Beberapa peserta berhasil menjadi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro. Selain itu, mereka mendapatkan kenaikan penghasilan rata-rata antara 18,18 % sampai 50 %, hal ini membuktikan bahwa keempat pelatihan tersebut memiliki pengaruh terhadap penghasilan sebagian besar dari peserta keempat pelatihan yang diselenggarakan di Kelurahan Lesanpuro dan dapat mengentaskan kemiskinan sebagaimana menurut Suryawati, (2004: 122) diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.

b. Inovasi - inovasi produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro

Menurut Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dan Forda UKM Jawa Timur (2007 : 80) Agar produk dapat diterima masyarakat adalah dengan membuat inovasi pada desain agar dipandang lebih unggul dan sebelum produk diluncurkan, selalu dilakukan penelitian – penelitian. Baik dalam hal teknologi maupun daya serap pasarnya. Demi keberlangsungan Usaha Kecil Mikro Menengah yang berada di Kelurahan Lesanpuro memerlukan suatu inovasi, yaitu dengan mengubah desain bentuk produk agar selalu *up to date* sehingga calon pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut. Inovasi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut membutuhkan suatu upaya atau usaha agar dalam pengembangannya menjadi pesat melalui suatu inovasi, dimana tujuan awal dari sebuah inovasi adalah agar produk – produk yang dikeluarkan tidak terkesan monoton dan ketinggalan jaman. Begitu juga dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Lesanpuro juga memerlukan suatu inovasi, agar produk yang dihasilkan tidak monoton dan membosankan.

Hal ini nampak pada salah satu pengrajin tas yang mengembangkan inovasi pada bahan pembuatan yaitu menggunakan kain levis, kulit sintetis dan tambahan atribut klub

sepak bola agar produk tasnya dapat bersaing dengan produk tas buatan industri lainnya.

Selain itu pada pelaku Usaha mikro Kecil Menengah di bidang kerajinan tangan (*Handycraft*) berinovasi dalam merubah desain produk menjadi kerajinan yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu bahan yang digunakan juga terbilang cukup mudah dan ramah lingkungan untuk didapatkan seperti kalender bekas, kertas bungkus serta kain sisa hasil potongan baju (kain perca).

Pada pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah di Kelurahan Lesanpuro juga menghsailkan peluang dalam pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) seperti pada pembangunan biogas yaitu pada limbah hasil pembuangan biogas (bioslurry) juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bioslurry dapat digunakan pada bidang pertanian yang berfungsi sebagai pupuk tanaman.

c. Metode pemasaran produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro

Menurut Daryanto (2011 : 1) pemasaran adalah “suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain”. Pemasaran yang dilakukan masyarakat yaitu

pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kelurahan Lesanpuro pada umumnya masih menggunakan metode yang sederhana, dikarenakan beberapa pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan modal dan kurang mengerti sistem informasi digital. Metode yang digunakan dalam pemasaran produk UMKM di Lesanpuro diantaranya menggunakan metode mulut ke mulut, menggunakan perjanjian konsinyasi (titip jual) serta menjajakan dagangannya secara langsung. Walaupun sederhana pada dasarnya sistem pemasaran yang para pelaku usaha tersebut terapkan cukup efektif dan efisien.

3. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan BKBPM dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

a. Faktor Pendukung dalam Mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro

(1). Faktor Sumber Daya Manusia

Menurut Hariandja (2002 : 2) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Kelurahan Lesanpuro memiliki cukup banyak jumlah penduduk usia produktif yaitu sekitar 17.400 penduduk usia produktif, namun hanya 94 yaitu sekitar 0,54% yang tersentuh oleh pelatihan. Sehingga untuk pengembangannya masih terbentang seluas-luasnya.

Selain itu dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, program - program pelatihan yang bersifat inovatif untuk kemajuan UMKM sangat direspons positif oleh masyarakat di wilayah RW 07; 08; 10 dan 11 yang penduduknya lebih cepat menerima perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, Dikarenakan pada wilayah RW tersebut penduduknya rata-rata berlatar belakang Pendidikan Tinggi, Sedangkan wilayah RW 01; 02; 03; 04; 05; 06; 09 pada umumnya berlatar belakang pendidikan dasar, sehingga ke 4 RW inilah yang memicu dan ikut membina RW lainnya untuk mengembangkan UMKM di wilayah Kelurahan Lesanpuro.

Dari *Output* dari pelatihan ketrampilan UMKM yaitu sebagian peserta yang lebih berdaya dengan menjadi pelaku pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan mengalami peningkatan pendapatan memicu banyaknya penduduk di Kelurahan Lesanpuro yang mempunyai pemikiran untuk mengembangkan UMKM di kelurahan tersebut.

(2). Faktor Sumber Dana/ Biaya

Sesuai dengan permendagri No 39 Tahun 2011 yang mengatakan “hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan

keolahragaan non-profesional. Kelurahan Lesanpuro mendapat dana hibah dari pemerintah sebesar 75 juta rupiah pada tahun anggaran 2014-2015. Bantuan pendanaan ini bisa mendukung terbentuknya beberapa UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di wilayah Kelurahan Lesanpuro melalui kegiatan Pelatihan dan kini hasilnya dapat dirasakan oleh beberapa peserta pelatihan yang kini menjadi dan beberapa pembangunan fisik.

(3). Faktor Faktor Jarak dan lokasi (Aksesibilitas)

Menurut Susantono (2004:24): Aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan. Karakteristik sistem transportasi ditentukan oleh aksesibilitas. Aksesibilitas memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan atau tata guna lahan. Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada pola perjalanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini kemudian mempengaruhi jaringan transportasi dan akan pula memberikan pengaruh pada sistem transportasi secara keseluruhan. Jika melihat Kelurahan Lesanpuro terletak pada lokasi yang strategis. Terhitung jarak Kelurahan Lesanpuro dari pusat kota lebih kurang 5 km. Selain itu, Kelurahan Lesanpuro sebagian wilayahnya merupakan kawasan perumahan Sawojajar yang dikenal sebagai kota satelit, dikarenakan pada perumahan ini dikenal dengan kawasan yang ramai dan

berkembang pesatnya perdagangan dan memiliki segala fasilitas tanpa harus keluar jauh ke pusat kota seperti pendidikan, sektor jasa, maupun perkantoran. Sehingga untuk menjangkau wilayah Kelurahan Lesanpuro ini tidaklah sulit selain itu, apabila pelaku UMKM akan membeli bahan baku dari bidang usaha mereka misal kerajinan pembuatan tas maupun Kerajinan tangan (*Handycraft*) jarak menuju pusat perdagang juga terhitung dekat lebih kurang 5 km.

b. Faktor Penghambat dalam Mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro

(1). Faktor permodalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Nugraha (2011:9) Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Jika melihat pada Kelurahan Lesanpuro, banyaknya pengusaha UMKM yang modal usahanya hanya cukup untuk membeli bahan baku saja dan hasil perputarannya sangat kecil sehingga tidak bisa untuk mengembangkan usahanya, bantuan keuangan yang diharapkan dari pemerintah sangat sulit didapatkan, sehingga sangat menghambat perkembangan UMKM. Selain itu Banyak pengusaha UMKM yang sulit mendapatkan bantuan dana perbankan ntuk mengembangkan usaha kecil yang mereka jalani,

hal ini disebabkan berbagai persyaratan yang dicantumkan pihak perbankan meminta jaminan sedangkan pelaku UMKM yang mayoritas kaum menengah ke bawah pada umumnya tidak mempunyai jaminan.

(2). Tumpang Tindihnya Peran BKBPM dalam Pelatihan UMKM dengan dinas lainnya.

Menurut Soekanto (2002:243) Mengatakan Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Namun, pada pengembangan UMKM di kota Malang, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang memiliki peran menjadi fasilitator yaitu memberikan pelatihan keterampilan dalam pengembangan UMKM, namun pada kenyataannya terdapat tumpang tindih pada fungsi dengan instansi lainnya antara lain: Dinas Koperasi UKM dan Dinas perindustrian/ perdagangan Kota Malang yaitu ksamaan peran dalam memberikan pelatihan kepada calon pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

(3). Pemasaran Produk UMKM

Menurut Daryanto (2011 : 1) Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai

satu sama lain. Untuk pengembangan suatu usaha, setiap produk yang dihasilkan harus terjual secara cepat sehingga perputaran usahanya akan lebih besar dan berkembang. Namun pada pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Lesanpuro terdapat kendala dalam pemasaran. Yaitu salah satunya pada UMKM pembuatan tas, permasalahan yang dihadapi adalah pada pemasaran dimana produk yang mereka hasilkan masih kalah bersaing dari tas-tas buatan Tiongkok yang pemasarannya lebih luas, sedangkan pengrajin tas di Lesanpuro memiliki keterbatasan yaitu pada jangkauan pemasaran karena tas produksi di Kelurahan Lesanpuro masih menggunakan teknik manual sehingga jumlah yang di produksi terbatas. Selain itu konsumen lebih berminat dengan produk buatan Cina (Tiongkok) yang pemasarannya melalui *online*.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan judul “Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah” studi pada BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) dan Kelurahan Lesanpuro Kota Malang, dengan mengacu pada penyajian data, pembahasan, serta analisis data maka peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran yang dapat menjadi masukan bagi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang dalam pada pengembangan dan pembentukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Lesanpuro dapat disimpulkan:

a. Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

- i. Upaya pemerintah daerah/ BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Penyelenggaraan pelatihan keterampilan, penyaluran dana hibah untuk pelatihan, fasilitator pelaksanaan pelatihan, penggerakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan.

- ii. Upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Lesanpuro, dilakukan melalui pelatihan- pelatihan diantaranya pelatihan Kerajinan tangan; pembuatan tas; budidaya jamur; komputer yang diadakan oleh BKBPM bekerjasama dengan pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Lesanpuro dan juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai panitia internal.

b. Hasil (*Output*) pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah setelah dilakukan pelatihan Keterampilan

- i. Hasil pelatihan yang dilaksanakan oleh BKBPM sudah banyak menghasilkan pelaku usaha UMKM antara lain Kerajinan tangan, pembuatan tas, budidaya jamur, komputer. Hal ini dapat dikatakan terdapat peningkatan pada pemberdayaan masyarakat/ masyarakat yang berdaya.
- ii. Pada program pelatihan yang intensif ternyata ada korelasi (hubungan) yang positif dengan meningkatnya penghasilan peserta sebelum pelatihan dan sesudah pada keempat pelatihan keterampilan tersebut.
- iii. Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Lesanpuro, beberapa pelaku UMKM yang dahulunya merupakan peserta pelatihan mengadakan sebuah inovasi yaitu pada pengembangan desain produk agar lebih menarik calon konsumen dan dapat bersaing dengan desain produk tas dari

industri besar. Selain itu pada pembangunan fisik yang dilakukan pada Kelurahan Lesanpuro juga menimbulkan peluang dalam berwirausaha pada produk pendukung pertanian oleh beberapa warga RW 09 seperti larutan *bioslury* sebagai pupuk yang berasal dari ampas kotoran sapi dari bahan bakar biogas tersebut.

- iv. Selain melakukan inovasi pengembangan produk, dalam pengembangan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) metode pemasaran yang dipergunakan adalah metode mulut ke mulut, menggunakan perjanjian konsinyansi (titip jual) serta menjajakan dagangannya secara langsung.

c. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan BKBPM dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

i. Faktor Pendukung

- ❖ Pada Kelurahan Lesanpuro 17.400 penduduknya merupakan penduduk usia produktif, sehingga dalam pengembangan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat memiliki kesempatan yang luas.
- ❖ Kelurahan Lesanpuro memiliki beberapa kawasan RW yang sebagian besar penduduknya dari kalangan yang berlatar belakang pendidikan tinggi (perguruan tinggi) yaitu RW 07; 08; 10 dan 11 sehingga apabila program program pelatihan yang bersifat inovatif untuk kemajuan UMKM sangat direspons positif oleh masyarakat

di wilayah RW ini selain itu warga dari keempat RW ini yang memicu dan ikut dalam pembinaan warga RW lain dalam program – program pemberdayaan masyarakat.

- ❖ Pada pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro, BKBPM berkoordinasi dengan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Lesanpuro. Sehingga peserta pelatihan mendapatkan binaan lebih lanjut.
- ❖ Adanya dana hibah dari pemerintah pada tahun anggaran 2014-2015 sebesar 75 juta rupiah yang salah satu alokasinya untuk program pelatihan keterampilan ini, sehingga saat ini pada tahun 2016 memunculkan para pelaku UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) di Kelurahan Lesanpuro.
- ❖ Akses lokasi yang mudah dijangkau dan berdekatan dengan pusat kota memudahkan dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro seperti pada pemasaran dan penyediaan bahan baku.

ii. Faktor Penghambat

- ❖ Pada pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memiliki kesamaan peran (tumpang tindih) antara BKBPM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Yaitu dalam hal pelatihan kepada masyarakat sebagai calon pelaku UMKM. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengembangan UMKM.

- ❖ Terbatasnya peran BKBPM dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro, yaitu hanya melakukan pendampingan dan pelaksana pelatihan saja. Pada pembinaan selanjutnya BKBPM tidak memiliki peran sehingga tidak adanya kontrol maupun evaluasi setelah pelatihan.
- ❖ Untuk memecahkan masalah permodalan yang dikeluhkan oleh pelaku UMKM di kelurahan Lesanpuro dan untuk pemberdayaan BKBPM hanya mengandalkan dana hibah dari pemerintah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan dana hibah tersebut berakhir pada tahun 2015 sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pelatihan di tahun berikutnya mengalami kendala.
- ❖ Pada proses pemasaran produk UMKM Kelurahan Lesanpuro terdapat permasalahan pada pemasaran dikarenakan barang yang mereka produksi kalah bersaing dengan barang import yang murah buatan Cina seperti pada UMKM tas dan kerajinan tangan.

2. Saran

1. Untuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang, sebaiknya kedepannya membangun koordinasi dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM seperti Dinas Koperasi dan UKM atau DISPERINDAG Kota Malang yaitu dengan pembagian tugas dan peran yang jelas sebagai misalkan dalam pelatihan yang diberikan bagi masyarakat calon pelaku UMKM Instansi yang

berperan adalah BKBPM, jika Usaha Kecil Mikro Menengah tersebut sudah berjalan, selanjutnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menindaklanjuti dalam pembinaan yaitu melakukan pendataan Usaha Kecil Mikro Menengah tersebut dan melakukan pembinaan hingga pelaku UMKM tersebut dapat mandiri hingga usaha kecil mereka berjalan lancar dengan dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai instansi yang mewadahi dalam pemasaran produk. Sehingga dengan koordinasi antar instansi tersebut maka diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan daya saing daerah di Kota Malang

2. Untuk instansi pemerintah dalam membuat suatu tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sebaiknya lebih cermat, agar tidak ada peran ganda atau tumpang tindih pada suatu fungsi yang ada pada instansi tersebut. Apabila terdapat kesamaan peran alangkah baiknya jika peran yang sama tersebut di fokuskan pada satu instansi saja. Misal pada permasalahan kesamaan peran pelatihan pada pengembangan UMKM di Kota Malang pada instansi BKBPM, Dinas Koperasi dan UKM, serta Disperindag Kota Malang sebaiknya peran pelatihan ini difokuskan pada salah satu instansi saja.
3. Pada pemasaran dan mempromosikan produk UMKM yang ada di kelurahan Lesanpuro sebaiknya ada dinas yang mewadahi atau membantu pada pemasarannya, agar tidak kalah bersaing dengan produk-

produk impor dari luar negeri seperti Cina. Sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk –produk dari luar negeri.

4. Untuk kontinuitas pelatihan pada tahun berikutnya, perlu diupayakan ketersediaan dana dari sumber selain dana hibah misal dana APBD untuk kegiatan pelatihan yang terstruktur dan terprogram.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincoln. 1991. *Ikhtisar Teori dan Soal Jawab Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE
- Azis.2015.” *P2KKP: Berubah Tapi Tetap, Tetap Tapi Berubah*”. Diakses pada 20 Februari 2016 dari <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=7804&catid=2&>
- Bambang, Riyanto. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* Yogyakarta: BPFE.
- BPS Jatim. 2013. “*Data Persentase Penduduk Miskin*” Diakses pada tanggal 10 Februari 2016 dari <http://jatim.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek>.
- BPS. 2015. “ *Data Kemiskinan Indonesia tahun 2015*. Diakses pada tanggal 10 Februari 2016 dari <http://bps.go.id/brs/view/1158>.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daryanto. 2011. *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Dharmmesta, Basu Swastha., Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPFE
- Dwijdowijoto, N Riant dan Wrihatnolo R Randy. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Elia.2013. “*Macam-macam Kriteria Kemiskinan*”. Diakses pada tanggal 6 Februari 2016 dari <http://historystorymemory.blogspot.co.id/2013/03/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html#>.
- Hall, Anthony dan James Midgley. 2004. *Social Policy for Development*. London: Sage Publication, Ltd.
- Hariandja, Marihot T.E, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Hikmat, Hary, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora.

Iyas, Yusuf. “Peran Dan Fungsi Pemerintahan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat”. Diakses Pada 27 Maret 2016 dari

<http://iiasyusuf.blogspot.com/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>.

Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika.

Kuwarasan. 2013. “Sejarah PNPM Mandiri”. Diakses pada 20 Februari 2016 dari <http://juragensejarah.blogspot.co.id/2013/09/sejarah-pnpm-lengkap.html>.

Kotler, Philip; Armstrong, Garry. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

Kusumo, Agung R.W. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inovasi Produk Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Pemasaran (Studi pada Industri Batik Skala Besar dan Sedang Di Kota dan Kabupaten Pekalongan)*. Semarang Jawa Tengah: UNDIP (Online), diakses 8 Juni 2016

Kuwarasan. 2013. “Sejarah PNPM Mandiri”. Diakses pada 20 Februari 2016 dari <http://juragensejarah.blogspot.co.id/2013/09/sejarah-pnpm-lengkap.html>

Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munir, Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.

Nugraha, Ardi. 2011. *Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendapatan, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Pengusaha Industri*. Skripsi. Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta diakses pada tanggal 3 Juni 2016 dari:

<http://download.portalgaruda.org/article.php?3Farticle%3D195495%26val%3D4721%26title%3DPENGARUH%2520KARAKTERISTIK%2520KEWIRAUSAHAAN>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dana Hibah.

Poerwadarminta, W.J.S. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Raharso. Sri. 2006. *Inovasi di Industri Eceran : Mampukan Berperan Sebagai Mediator antara Orientasi Pasar dan Kinerja Organisasi*. Jurnal Bisnis Strategi, Vol 15, No. 1, Program Magister Manajemen. Universitas Diponegoro.

- Raho Bernard. 2007, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Rappaport, J. 1984. *Studies in Empowerment: Introduction to the issue, Prevention in Human Issue*. USA.
- Riza, Risyanti & Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Samuel Edward Finer, *Comparative Government*, 1974.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenaga kerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2011. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Suparlan, D. P. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Surjono, Agus. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Suryawati Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Susan Irawati. 2006. *Manajemen Keuangan*. Bandung: Pustaka.
- Susanta Gatut, Syamsudin Azrin. 2009. *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Depok: Raih Asa Sukses



- Susantono, Bambang. 2004. *Langkah Kecil Yang Kita Lakukan Menuju Transportasi Yang Berkelanjutan*. Jakarta : Masyarakat Transportasi Indonesia.
- Swift C, Levin G1987. *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*. USA: J Primary Prevention.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (edisi revisi). Bandung : Refika Aditama.
- Tamin, O.Z.1997. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Bandung: ITB
- Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Tjiptono, Fandi. 2008, *Strategi Bisnis Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Universitas Surabaya, Fakultas Ekonomi & FORDA UKM Jawa Timur. *Kewirausahaan UKM*. 2007. Surabaya: Graha Ilmu.
- Usman, Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____.2013. “*Pengertian dan Definisi Peran*”. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016 dari https://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html.
- _____. 2011. “*Tinjauan Pustaka (Pengertian Peran)*”. Diakses pada tanggal 9 Februari 2016 dari <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> .
- Badan Pusat Statistik (BPS).
- Kementrian Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM). 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Surat Pengantar Riset Fakultas





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 5991 /UN10.3/PG/2016

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Jl. Ahmad Yani No. 98 Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Rizky Deandra Ernawan
Alamat : Jl. Danau Sidenreng C3 D02 Sawojajar Kelurahan Lesanpuro Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang
NIM : 125030507111003
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Administrasi Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna
Penanggulangan Kemiskinan (Study Pada DPUPBB, BKBPM &
Masyarakat Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang).
Lamanya : ± 2 bulan / 25 April 2016 – 25 Juni 2016
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 19 April 2016



Choirul Saleh, Dr. M. Si
NIP. 19600112 198701 1 001

M : 08



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2.Surat Pengantar Riset

BAKESBANGPOL





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254

MALANG

Kode Pos 65125

Malang, 20 April 2016

Kepada

Yth.

di

MALANG

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 072/193.04.P/35.73.405/2016

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
I.	Rekomendasi Permohonan Ijin Penelitian RIZKY DEANDRA ERNAWAN.	1(satu) lembar	Di kirim dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG



Ir. GAMBANG SUTARIJADI.

Pembina Muda
NIP. 195801011992031003





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254

MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/193.04.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Jurusan Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 5992/UN10.3/PG/2016 tanggal 19 April 2016 Perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : RIZKY DEANDRA ERNAWAN.
- b. NIM : 125030507111003.
- c. Judul : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat guna Penanggulangan Kemiskinan.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data tugas skripsi yang berlokasi di :

- Kelurahan Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang.
- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 21 Mei 2016**.

Malang, 20 April 2016

KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG



Tembusan :
Yth. Sdr. - Ketua Jurusan Adm. Publik FIA Univ.
Brawijaya Malang;
- Camat Kedungkandang Kota Malang;
- Mahasiswa Ybs;



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.Instrumen Penelitian (Kuesioner)



❖ KUESIONER PADA PETUGAS BKBPM DI KELURAHAN LESANPURO

1. Apakah tugas pokok bapak/ ibu selaku petugas BKBPM yang ditempatkan pada Kelurahan Lesanpuro, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ?
2. Apa saja upaya BKBPM dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembenukan dan pengembangan UMKM ?
3. Bagaimana proses perencanaan pelatihan dan pemberian keterampilan pada masyarakat dan masyarakat pelaku usaha pada Kelurahan Lesanpuro yang dilakukan oleh BKBPM ?
4. Berasal dari manakah sumber pendanaan Pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan/ pemberian keterampilan serta bantuan modal kepada masyarakat dan pelaku usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Lesanpuro?
5. Bagaimana pengelompokan UMKM yang ada di Kelurahan dan apa tujuan dari pengelompokan tersebut?

❖ KUESIONER KEPADA PELAKU UMKM DI KELURAHAN LESANPURO

1. Mengapa Bapak/ibu tertarik mengembangkan usaha yang saat ini bapak/ ibu tekuni ?
2. Adakah kendala pelaksanaan usaha yang bapak/ibu kembangkan saat ini ?
3. Bagaimanakah cara atau metode pemasaran produk UMKM yang bapak/ibu kembangkan ?
4. Apakah ada inovasi pada pengembangan produk pada usaha yang bapak/ibu jalankan? Jika ada seperti apakah inovasi tersebut ?

❖ KUESIONER KEPADA PESERTA PELATIHAN DAN KURSUS KETERAMPILAN YANG TIDAK MEMBENTUK USAHA DAN TIDAK MELANJUTKAN USAHANYA

1. Mengapa bapak/ibu tidak tertarik mengembangkan usaha yang telah diberikan bimbingan berupa pelatihan dan kursus keterampilan yang telah bapak/ ibu ikuti ?

❖ KUESIONER KEPADA KETUA BKM (BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT) KELURAHAN LESANPURO

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang perlunya pembangunan infrastruktur di Kelurahan Lesanpuro berkaitan dengan pengembangan UMKM di Kelurahan Lesanpuro jika dipandang dari sudut ekonomi maupun usaha ?
2. Bagaimana kelanjutan pembinaan masyarakat dan pelaku usaha Mikro Kecil Menengah setelah diberikan keterampilan ?

**4. Contoh Proposal Permohonan Dana
Kegiatan Pelatihan di Kelurahan
Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang**



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF PUBLIC WORKS



WORLD
BANK



PROGRAM
NASIONAL
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MANDIRI

PNPM

MANDIRI
PERKOTAAN

PROPOSAL

Tahap : I

PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

KSM : DAUR ULANG / HANDY CRAFT
KELURAHAN : LESANPURO
KECAMATAN : KEDUNGKANDANG
KOTA : MALANG

PADA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM - MP
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEBUTUHAN

No	Nama Pekerjaan	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	
				PNPM-MP	Swadaya
1	Pelatihan Kerajinan dari Daur Ulang / Handy Craft	Kel. Lesanpuro	1	7.500.000	500.000
2					
JUMLAH					8.000.000



DAFTAR ISI

No	KELENGKAPAN DOKUMEN	CODE
1	COVER	
2	DAFTAR ISI	
3	SURAT PENGANTAR	
4	BUKU BIMBINGAN LAPANGAN	
5	FORMULIR VERIVIKASI USULAN	
6	ORGANISASI KEGIATAN	
7	BERITA ACARA PEMBENTUKAN TIM KSM	
8	BERTITA ACARA HASIL RAPAT UP-BKM TENTANG KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KSM	
9	BERITA ACARA KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT	
10	DAFTAR SWADAYA MASYARAKAT	
11	BERITA ACARA PEMBENTUKAN KSM	
12	DAFTAR HADIR	
13	RENCANA ANGGARAN PELAKSANA (RAB)	
14	DAFTAR NAMA CALON PENERIMA PELATIHAN	
15	IDENTITAS KSM	
16	SELEKSI TERHADAP NEGATIF LIST	

*) Untuk menguatkan isi dokumen Proposal, lampiran bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan

**) Untuk lokasi kegiatan yang berada dilokasi bukan pada sebaran KK miskin tetapi menimbulkan dampak yang nyata diwilayah sebaran KK miskin.

***) Dokumen – dokumen lain (ijin bangunan, surat sah tanah, Uji Lab Air bersih dll)

**BKM " PELITA HARAPAN"
KELURAHAN LESANPURO**

SURAT PENGANTAR

**KSM DAUR ULANG
KELURAHAN LESANPURO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG**

Malang 2014

Kepada Yth :

No : Ketua BKM LESANPURO
Lampiran : 1 Berkas Kelurahan LESANPURO
Hal : Proposal pengajuan Dana Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM DAUR ULANG Kelurahan LESANPURO, sesuai dengan hasil rembuk/musyawarah, tanggal 2014, yang telah menetapkan usulan pelaksanaan kegiatan, yaitu :

No	Nama Pekerjaan	Volume	Total Biaya (Rp)		Lokasi
			Swadaya	BLM	
1	Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Daur Ulang	1	500.000	7.500.000	Gedung Serba Guna Kelurahan Lesanpuro

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas kerjasama dan dukungannya disampaikan banyak terima kasih.

Ketua KSM





Dra. Nurbeti

**BKM PELITA HARAPAN"
KELURAHAN LESANPURO**

BUKU BIMBINGAN LAPANGAN

Kelurahan : LESANPURO
Kecamatan : KEDUNGKANDANG
Kota : MALANG

MINGGU KE-	NAMA	HARI/TANGGAL	JABATAN	URAIAN	TANDA TANGAN
I.	M. Wirahman J.	2-06 2014	faskel	-Tanda tangan Anggota KSM. di lengkapi	
II.	M. Wirahman J.	9-06 2014.	faskel	-Penerima Manfaat Di lsi serta FotoCopy anggota KSM.	

*) Diperbanyak sesuai kebutuhan dilampirkan di Proposal

Malang, 2014

Di buat Oleh
KSM DAUR ULANG

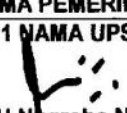


Dra. Nurbeti.

BKM " PELITA HARAPAN"**KELURAHAN LESANPURO****FORMULIR VERIFIKASI USULAN**

Kelurahan : LESANPURO
 Kecamatan : KEDUNGKANDANG
 Kota : MALANG

NO	ASPEK YANG DIVERIFIKASI	PENILAIAN KELAYAKAN		CATATAN (PENYEMPURNAAN)
		YA	TIDAK	
A	ASPEK ORGANISASI			
1	Adakah pengurus, anggota, sekertariat kantor atau alamat domisili ?	✓		
2	Apakah Tim KSM DAUR ULANG sudah terbentuk dengan susunan anggotanya ?	✓		
3	Apakah panitia merupakan pemanfaat dan pemelihara sarana & prasarana ?	✓		
4	Adakain kontribusi swadaya masyarakat ?	✓		
B	ASPEK MANAJEMEN, TEHNIK KEGIATAN			
1	Apakah kegiatan yang diusulkan sesuai dokumen PJM Pronangkis ?	✓		
2	Apakah penerima manfaat dominan adalah warga miskin (minimal 70 % adalah warga miskin) ?	✓		
3	Adakah kesepakatan harga hasil survey (minimal 3 toko setempat) ?			
4	Apakah jumlah nilai BLM PNPM-MP yang diajukan tidak melebihi 50 Juta Rupiah ?	✓		
5	Apakah rencana kegiatan tidak bertentangan dengan daftar kegiatan terlarang ?	✓		
6	Apakah perhitungan RAB swadaya & BLM/ PNPM-MP ?	✓		
7	Adakah rencana pengadaan penggunaan dana ?			
8	Adakah daftar penerima manfaat ?	✓		
9	Adakah struktur organisasi KSM DAUR ULANG kegiatan ?	✓		

JUSTIFIKASI KELAYAKAN		
NAMA PEMERIKSA	REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI	TANDA TANGAN
1 NAMA UPS  Drh. H Nagroho, NP. MP	LAYAK/ LAYAK DENGAN PENYEMPURNAAN/ TIDAK SEMPURNA	1.
2 NAMA FASKEL M Wirahman J		2.

**BKM " PELITA HARAPAN"
KELURAHAN LESANPURO**

**BERITA ACARA
Hasil Rapat UP-BKM tentang
Kelayakan Usulan Kegiatan KSM DAUR ULANG**

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 bulan April tahun 2014 pada jam 19.00 s.d Selesai wib bertempat di Gedung Serba guna Lesanpuro, telah dilakukan rapat UP BKM untuk membahas kelayakan usulan kegiatan KSM DAUR ULANG sebanyak 1 usulan kegiatan, dengan hasil sebagaimana berikut ini :

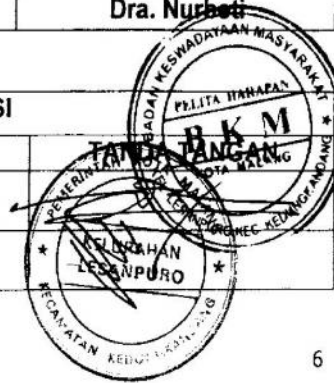
Uraian Kegiatan		Rekomendasi kelayakan
1	Nama Pekerjaan : Pelatihan Kerajinan Daur Ulang	LAYAK untuk dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM-MP yang ada
2	Lokasi : Gedung Serba Guna Lesanpuro	
3	Volume : 1	
4	Nilai kegiatan : Rp. 8.000.000,00	
	a. Swadaya : Rp. 500.000,00	
	b. BLM PNPM-MP : Rp. 7.500.000,00	
	c. APBD Lainnya :	
	d. Total (a+b+c) : Rp. 8.000.000,00	
5	Nama Pakem :	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 April 2014

		DI USULKAN OLEH :
Faskel	UPS	Ketua KSM
M Wirahman J	Drh.H. Nugroho NP,MP	Dra. Nurboti

MENGETAHUI SAKSI-SAKSI	
NAMA	JABATAN
1 Ir. H Darmawan Setiabudi	Kordinator BKM
2 Jajan Heryana,S.Sos.M.si	Lurah



**BKM " PELITA HARAPAN"
KELURAHAN LESANPURO**

**BERITA ACARA
Kesanggupan Swadaya masyarakat
Terhadap
Usulan kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Daur Ulang**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 bulan Mei tahun 2014 bertempat di Aula Serba Guna Lesanpuro Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil rembuk/musyawarah warga, kami yang bertanda tangan dibawah ini mewakili dan atas nama warga masyarakat Kelurahan Lesanpuro menyatakan bahwa jika usulan kegiatan KSM DAUR ULANG disetujui oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), kami sepakat dan sanggup untuk memberikan kontribusi swadaya masyarakat sebagaimana terdapat dalam Proposal (Volume Kontribusi Masyarakat) usulan kegiatan sarana prasarana KSM DAUR ULANG.

Rincian kontribusi swadaya masyarakat yang ada didalam Proposal akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang akan didanai dari BLM melalui Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai penetapan usulan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Jika kontribusi swadaya masyarakat tersebut diatas tidak dapat terealisasikan maka kami menyadari dan bersedia menerima sanksi yang telah disepakati/ditetapkan bersama.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar musyawarah/rembuk warga agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Mei 2014



Dibuat
Ketua KSM DAUR ULANG


Dra. Nurbeti

BKM " PELITA HARAPAN"

KELURAHAN LESANPURO

**DAFTAR SWADAYA MASYARAKAT
PNPM Mandiri – Perkotaan**

Nama KSM/Panitia : DAUR ULANG
Alamat : Gedung Serba Guna Lesanpuro
BKM : Pelita Harapan
Kelurahan : Lesanpuro
Kecamatan : Kedungkandang
Kota : Malang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	BENTUK SWADAYA	VOLUME & SATUAN	TANDA TANGAN
1	Dra. Nurbeti	P	RT09 RW08	Uang	100.000	
2	Evi Tutut H.	P	RT09 RW08	Uang	100.000	
3	Ika Ratn Setyawati, SS	P	RT09 RW08	Uang	100.000	
4	Arien Dwi Anah, SE	P	RT09 RW08	Uang	100.000	
5	Erni Agustin S, MM	P	RT09 RW08	Uang	100.000	

**BKM " PELITA HARAPAN"
KELURAHAN LESANPURO**

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KSM DAUR ULANG/PANITIA**

Kota : Malang Nama Panitia : KSM DAUR ULANG
 Kecamatan : Kedungkandang Sekretariat :
 Kelurahan : Lesanpuro Jml. Anggota : 5 Org Pr
 BKM : Pelita Harapan

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan warga yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 19 bulan Mei tahun 2014 yang dihadiri oleh. 23 peserta, maka telah ditetapkan **Pembentukan Panitia KSM DAUR ULANG** , Pada hari ini telah disepakati dan ditetapkan nama-nama anggota yang terpilih secara demokratis sebagai berikut :

No	Nama	L/P	Alamat		Posisi *)	Tanda Tangan
			RW	RT		
1.	Dra. Nurbeti	P	08	09	Ketua	
2.	Evi Tutut H.	P	08	09	Sekretaris	
3.	Ika Ratna S, SS	P	08	09	Bendahara	
4.	Arien Dwi Anah, SE	P	08	09	Anggota	
5.	Erni Agustin S, MM	P	08	09	Anggota	

*) Posisi dalam kepanitiaan, seluruh panitia melampirkan foto copy KTP
 Pembentukan KSM DAUR ULANG , telah didasarkan pada hasil Pemetaan Swadaya, PJM dan Renta Pronangkis serta telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang kami capai dalam berbagai pertemuan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Apabila pernyataan kami di kemudian hari terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup untuk menerima serta melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan oleh BKM.
 Demikian Berita Acara ini kami buat atas dasar kesepakatan bersama seluruh anggota serta kami lampirkan usulan teknis dalam satu berkas.

Mengetahui



JAJAN HERYANA, S.Sos, M.si

Pembina
 NIP 19700711 199703 1 005



Ketua BKM,

DR. DARMAWAN SETIABUDI

An. Pertemuan Warga
 Ketua KSM DAUR
 ULANG,

Dra. NURBETI

**BKM " PELITA HARAPAN"
KELURAHAN LESANPURO**

**DAFTAR HADIR
PERTEMUAN WARGA**

Hari/tgl : Senin, 19 Mei 2014
Tempat : BALAI RW:08
Acara : Pembentukan KSM DAUR ULANG

Kelurahan : Lesanpuro
Kecamatan : Kedungkandang
Jam : 19.00 s.d selesai

No	Nama	L/P	Alamat		Telepon	Tanda Tangan
			RW	RT		
01	Deni P.		02	02		
02	Rurianto		04	01		
03	Eni Hariyati	P	03	03	0341-7564163	
04	Evi Tutut	P	08	09	0341-711121	
05	Erni A.	P	08	09		
06	Kurnati	P	6	1		
07	Pan Heni	P	08	3		
08	Rinda Nuraini	P	4	2		
09	Amirudin	L	01	01		
10	Aminanti A.	P	08	09	0341-7769010	
11	Pahmadawati	P	08	09		
12	Wirahman J.	L	-	-	Farkel.	
13	Mamir Sof.	P	3	6		
14	Yucanda	P	08	2		
15	Wahyuninghyas	P	8	2		
16	Dra. Nurben	P	09	09	082132297237	
17	Wiwik	P	08	3		
18	M. Redi	L	06	06	0341-8177261	
19	Bu. Gerlis	P	08	01		
20	Rukanti	PP	4	2	083834661231	
21	Julia Eka	P	4	1	0341-7116231	
22	Hadi	L	08	01		
23	Ika	P	08	09	0341-711414	
24						
25						



Malang, 19 Mei 2014
Fasilitator Kelurahan

M Wirahman J

**BKM " PELITA HARAPAN"
KELURAHAN LESANPURO**

**RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN
PNPM Mandiri – Perkotaan**

Nama KSM/Panitia : KSM DAUR ULANG
 Alamat : Gedung Serba Guna Lesanpuro
 BKM : Pelita Harapan
 Kelurahan : Lesanpuro
 Kecamatan : Kedungkandang
 Kota : Malang


NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	SUMBER DANA / JUMLAH HARGA (Rp.)		JUMLAH (Rp.)
					BLM PNPMP	SWADAYA	
1	2	5	4	6	7=4x6	8=4x6	9=7+8
A	Sarana Pelatihan						
1	Sewa Sound System dan Gedung	bh	1	150.000	-	150.000	150.000
2	Dokumentasi	bh	1	150.000	-	150.000	150.000
3	Kebersihan	Org	1	100.000	-	100.000	100.000
	SUB TOTAL BIAYA (A)				-	400.000	400.000
B	Fasilitas dan Bahan Pelatihan						
1	Bunga	Bh/4x	25	12.500	1.250.000	-	1.250.000
2	Bros	Bh/4x	25	6.000	600.000	-	600.000
3	Tempat/Kranjang	bh	25	25.000	625.000	-	625.000
4	Gunting	bh	25	9.200	230.000	-	230.000
5	Senar		25	3.000	300.000	-	300.000
6	Kawat	mtr	100	3.000	300.000	-	300.000
7	Pelipis Hijau	roll	10	7.500	75.000	-	75.000
8	Manik A, 1 Pon	roll	11	65.000	715.000	-	715.000
9	Manik B, 1 Pon	roll	11	65.000	715.000	-	715.000
10	Bando/ Kunci	bh	50	1.000	50.000	-	50.000
11	ATK	set	25	10.000	250.000	-	250.000
12	Nara Sumber	org	2	250.000	500.000	-	500.000
13	Transport Peserta	org	25	25.000	625.000	-	625.000
14	Benner	bh	1	65.000	65.000	-	65.000
15	Modul Pelatihan	bh	25	15.000	375.000	-	375.000
	SUB TOTAL BIAYA (B)				6.675.000	-	6.675.000
C	Konsumsi						
1	Makan	Porsi	25	15.000	375.000	-	375.000
2	Snack	Porsi	25	5.000	125.000	-	125.000
3	Air Mineral	Dus	2	22.500	45.000	-	45.000
	SUB TOTAL BIAYA (C)				545.000	-	545.000
D	UMUM / LAIN-LAIN						
1	Pembuatan Proposal	Eks	5		100.000	-	100.000
2	LPJ	Eks	5		150.000	-	150.000
3	Materai	lbr	5	6.000	30.000	-	30.000
4	Pembukaan Rekening KSM		1		-	100.000	100.000
	SUB TOTAL BIAYA (D)				280.000	100.000	380.000
	TOTAL BIAYA (A s/d D)				7.500.000	500.000	8.000.000



Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan dengan cara : () Gotong royong (✓) Semi Gotong royong () dikontrakkan

Di Periksa ;

Diajukan oleh ;
KSM Daur Ulang / Panitia


Dra. Nurbeti



BKM " PELITA HARAPAN"

KELURAHAN LESANPURO


**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA PELATIHAN PEMBUATAN KERAJINAN
DARI DAUR ULANG/HANDY CRAFT
PNPM Mandiri – Perkotaan**

Nama KSM /Panitia : KSM DAUR ULANG
 Alamat : Lesanpuro
 BKM : Pelita Harapan
 Kelurahan : Lesanpuro
 Kecamatan : Kedungkandang
 Kota : Malang

No	Nama	Umur	L/P	Alamat		Kategori	
				RW	RT	Miskin	Non Miskin
1	Wiwik Ambarsih U.	44	P	1	7	✓	
2	Sapikya	49	P	1	7	✓	
3	Anik Nur Hamidah	24	P	2	1	✓	
4	Zulakha	20	P	2	1	✓	
5	Wasrukan	34	P	3	3	✓	
6	Juliani	37	P	3	3	✓	
7	Yulia Eka	21	P	4	1	✓	
8	Roitul Jannah	35	P	4	1	✓	
9	Tiyani	28	P	6	1	✓	
10	Kunarti	35	P	6	1	✓	
11	Paimi	43	P	6	1	✓	
12	Puji Lestari	22	P	6	1	✓	
13	Siti Fatimah	58	P	9	5	✓	
14	Alimah	45	P	9	6	✓	
15	Pf'asri	40	P	9	5	✓	
16	Ernawati	29	P	9	5	✓	
17	Sri Hartini	41	P	1	6	✓	
18	Ngatiani	39	P	1	6	✓	
19	Cuttriyah	31	P	2	1	✓	
20	Sumartun	32	P	2	4	✓	
21	Kamsiatun	58	P	3	6	✓	
22	Mamik Sefyan	32	P	3	6	✓	
23	Rindah Nuraini	32	P	4	2	✓	
24	Luluk Wijati	29	P	4	2	✓	
25	Rukiati	39	P	4	2	✓	


Lurah Lesanpuro,
KEKURAHAN LESANPURO
AN HERYANA, S.Sos, M.si
 Pembina
 NIP 19700711 199703 1 005

**An. Pertemuan Warga
Ketua KSM DAUR ULANG**


Dra. NURBETI

BKM " PELITA HARAPAN"**KELURAHAN LESANPURO**

Judul Usulan Kegiatan : Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Daur Ulang

IDENTITAS KSM/PANITIA

Nama KSM/Panitia : KSM DAUR ULANG
 Alamat :
 Kelurahan : Lesanpuro
 Kecamatan : Kedungkandang
 Kota : Malang

SUSUNAN ANGGOTA KSM DAUR ULANG / PANITIA

No.	Nama	L/P	Umur	Alamat		Telepon	Status Sosial	
				RW	RT		Miskin	Non miskin
01	Dra. Nurbeti	P	54	08	09	082132297237	-	✓
02	Evi Tutut H.	P	58	08	09	0341-711121	-	✓
03	Ika Ratnawati, SS	P	41	08	09	0341-711414	-	✓
04	Arin Dwi Anah, SE	P	47	08	09	0341-7709010	-	✓
05	Erni Agustin S., MM	P	54	08	09	-	-	✓

*) *Fotocopy KTP dilampirkan***INFORMASI USULAN KEGIATAN**

Pertanyaan	Jawaban		
Apa nama usulan kegiatan sosial yang diusulkan?	Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Daur Ulang		
Dimana tempat / lokasi kegiatan sosial yang diusulkan?	Kelurahan Lesanpuro		
Apa dasar pertimbangan usulan kegiatan dan lokasi kegiatan tersebut diusulkan?	Pengembangan Jumlah SDM Untuk memperbanyak Kwantitas dan Kualitas		
Apa saja lingkup kegiatan yang terkait dengan kegiatan sosial yang diusulkan, bagaimana tata urutan kegiatannya dan rencana pelaksanaannya?	No.	Lingkup Kegiatan	Waktu Kegiatan
	1	Pendataan	1 minggu
	2	Survey	1 minggu
	3	Persiapan	1 Minggu







	4	Pelaksanaan	1 minggu
Apa manfaat yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga miskin, terkait dengan kegiatan sosial yang diusulkan?	Membantu Penambahan income Keluarga		
Berapa banyak perkiraan jumlah warga yang dapat memperoleh manfaat sebagaimana maksud di atas?	Jumlah Keseluruhan Warga Penerima Manfaat	Jumlah Warga Miskin sebagai Penerima Manfaat	
 ²⁵orang ²⁵ orang	
Berapa Rp total kebutuhan biaya untuk melakukan kegiatan yang diusulkan? *)			Rp. 8.000.000,-
Berapa Rp swadaya masyarakat yang dapat dihimpun untuk mendukung kegiatan sosial yang diusulkan ?			Rp. 500.000
Berapa Rp dana kegiatan sosial yang diusulkan ke PNPM-MP?			Rp. 7.500.000,-

*) Kebutuhan biaya secara terperinci (*terlampir*)

*) Nama- nama (identitas) penerima manfaat (*terlampir*)

Demikian usulan kegiatan ini kami susun dengan sebenar-benarnya.

Diajukan ke BKM tanggal,.....bulan.....tahun 2014.

Nama-nama Anggota KSM DAUR ULANG (Pengusul)		Ketua KSM DAUR ULANG,	Justifikasi Faskel,
Nama	Tanda tangan		
Dra. Nurbeti		 (Dra. Nurbeti)	(M Wirahman J)
Evi Tutut H.			
Ika Ratnawati , SS			
Arin Dwi Anah .SE			
Emi Agustin S., MM			






**BKM " PELITA HARAPAN"
KELURAHAN LESANPURO**

SELEKSI TERHADAP NEGATIF LIST

Seleksi terhadap daftar kegiatan terlarang (Negatif List)
Apakah usulan-usulan kegiatan termasuk dalam salahsatu kegiatan yang
dilarang dibiayai oleh dana BLM PNPM-MP ?

No	Jenis Kegiatan	YA	TIDAK
1	Pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah		✓
2	Pembangunan dan rehabilitasi kantor BKM		✓
3	Pembangunan dan rehabilitasi kantor atau Gedung Pemerintah		✓
4	Produk-produk yang merugikan bagi lingkungan hidup, antara lain pestisida, tembakau atau produk yang terkait, secara substansial merusak lapisan ozon, bahan-bahan material dan asbes, kegiatan produksi cairan atau gas yang mempengaruhi atau mencapai tingkat emisi yang berbahaya, kegiatan yang memakai, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan-bahan dan buangan limbah yang sangat berbahaya, penyimpanan atau kegiatan di area yang dilindungi, atau usulan perikanan yang tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan Dinas Perikanan.		✓
5	Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti perdagangan senjata, perjudian serta kegiatan yang melanggar norma-norma agama dan sosial; jual beli obat-obatan terlarang; kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan, pembebasan lahan dan permukiman kembali, perlindungan dampak lingkungan dan penduduk serta nilai-nilai lokal setempat.		✓
6	Deposito atau upaya pemupukan bunga dari Bank yang bertentangan dengan ketentuan PNPM-MP		✓
7	Kegiatan politik praktis , seperti : kampanye, sumbangan kepada kegiatan dan lembaga partai Politik, Pemilu dan Pilkada		✓
8	Kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan Visi, Misi, Prinsip dan nilai-nilai PNPM-MP		✓

 M Wirahman J Kepala Desa	9/6 2014	 Drh.H Nugroho NP.MP	 Dra. Nurbeti
---	-------------	--	--

*) Disesuaikan dengan bidang usulan kegiatan,
ditanda tangani oleh **UPS untuk usulan Sosial** dengan mencantumkan **nama terang & tanggal** verifikasi

KTP ANGGOTA KSM DAUR ULANG

**PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG**

NIK : 35730361160002

Nama	NURBETHA		
Tempat/Tgl Lahir	MALANG	26-11-1980	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah	: A
Alamat	JL. DANAU BELAYAN V C4D/1		
RT/RW	: 009/008		
KelDesa	: LESANPURO		
Kecamatan	: KEDUNGKANDANG		
Agama	: ISLAM		
Status Perkawinan	: KAWIN		
Pekerjaan	: GURU		
Kewarganegaraan	: WNI		
Berlaku Hingga	: 26-11-2017		



KOTA MALANG
05-07-2012

**PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG**

NIK : 3573035712570002

Nama	EYU TUTUT HANDAYANI		
Tempat/Tgl Lahir	MALANG	17-12-1967	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah	: O
Alamat	JL. DANAU BELAYAN V C4C/2		
RT/RW	: 009/008		
KelDesa	: LESANPURO		
Kecamatan	: KEDUNGKANDANG		
Agama	: ISLAM		
Status Perkawinan	: DEKAT MATI		
Pekerjaan	: MENGIURUS RUMAH TANGGA		
Kewarganegaraan	: WNI		
Berlaku Hingga	: 17-12-2017		



KOTA MALANG
05-07-2012

**PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG**

NIK : 3573036102730004

Nama	KA RATNA SETYAWATI, SS		
Tempat/Tgl Lahir	MALANG	21-02-1973	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah	: O
Alamat	JL. DANAU BELAYAN V C4 C-15		
RT/RW	: 009/008		
KelDesa	: LESANPURO		
Kecamatan	: KEDUNGKANDANG		
Agama	: ISLAM		
Status Perkawinan	: KAWIN		
Pekerjaan	: MENGURUS RUMAH TANGGA		
Kewarganegaraan	: WNI		
Berlaku Hingga	: 21-02-2017		



KOTA MALANG
05-07-2012

**PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG**

NIK : 3573036301670002

Nama	ARREN DWI ANAH		
Tempat/Tgl Lahir	MALANG	23-01-1987	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah	: B
Alamat	JL. DANAU BELAYAN IV C4 B11		
RT/RW	: 009/008		
KelDesa	: LESANPURO		
Kecamatan	: KEDUNGKANDANG		
Agama	: ISLAM		
Status Perkawinan	: KAWIN		
Pekerjaan	: WIRASWASTA		
Kewarganegaraan	: WNI		
Berlaku Hingga	: 23-01-2017		



KOTA MALANG
05-07-2012

**PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG**

NIK : 3573035008600004

Nama	ERNI AGUSTIN SUSWARSIH		
Tempat/Tgl Lahir	MALANG	10-08-1980	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah	: A
Alamat	JL. DANAU BELAYAN V C4 C-25		
RT/RW	: 009/008		
KelDesa	: LESANPURO		
Kecamatan	: KEDUNGKANDANG		
Agama	: ISLAM		
Status Perkawinan	: KAWIN		
Pekerjaan	: PEGAWAI NEGERI SIVIL (PNS)		
Kewarganegaraan	: WNI		
Berlaku Hingga	: 10-08-2017		



KOTA MALANG
06-07-2012

